



disdukcapil
Jabar

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2023



SAMBUTAN

PJ GUBERNUR JAWA BARAT



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seperti yang kita ketahui bersama, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemerintah Daerah berkewajiban menyajikan data kependudukan berskala Provinsi. Data ini diolah dan disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, berdasarkan data yang disediakan oleh Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Melalui penyusunan **Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**, diharapkan kebutuhan data kependudukan oleh berbagai pihak, baik instansi Pemerintah maupun Swasta, dapat terpenuhi. Saya sangat mengapresiasi upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dalam menyusun dan menerbitkan buku ini.

Saya memahami bahwa dalam penyusunan data kependudukan, terdapat kemungkinan adanya perbedaan data yang disebabkan oleh perbedaan konsep, metodologi, dan Teknik pengumpulan data. Namun, perlu diingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan yang telah dikonsolidasikan secara nasional dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui SIAK, merupakan data yang sah dan dapat digunakan untuk semua keperluan, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Oleh karena itu, saya yakin bahwa data statistik kependudukan yang disajikan dalam Buku Profil ini telah terverifikasi dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pengguna. Di



masa depan, saya berharap kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi penyedia sumber data pendukung dapat terus ditingkatkan, sehingga data yang disajikan semakin informatif, akurat, dan faktual.

Akhirnya kepada seluruh pihak dan tim yang telah terlibat dalam penyusunan buku profil ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN



SAMBUTAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat hidayah-Nya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 telah selesai disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Profil perkembangan kependudukan ini disusun dengan menyajikan data statistik kependudukan yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2023 yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data yang disediakan oleh SIAK telah dikonsolidasi secara Nasional dan telah dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

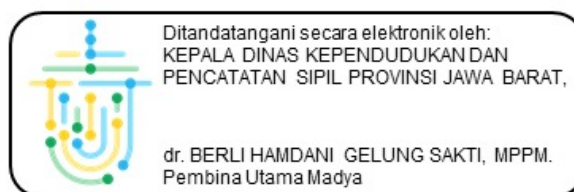
Publikasi Profil Perkembangan Kependudukan dapat dimanfaatkan oleh instansi/lembaga pengguna untuk berbagai keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi (Pemilu dan Pilkada), penegakan hukum dan pencegahan kriminal serta untuk keperluan lainnya.



Kami menyadari bahwa penyusunan Buku Profil ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan berbagai sumber yang belum maksimal. Untuk itu kami menerima saran, masukan dan kritikan demi penyempurnaan Buku Profil di masa yang akan datang.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penerbitan buku profil ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Bandung, Juni 2024





DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT	i
SAMBUTAN KEPALA DINAS DISDUKCAPIL PROV JAWA BARAT	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Ketentuan Umum	3
BAB II	
GAMBARAN UMUM	10
A. Sejarah Singkat	10
B. Letak Geografis	12
C. Gambaran Umum Demografi	15
D. Kondisi Pengembangan Ekonomi	16
E. Potensi Daerah.....	18
1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	18
2. Pertambangan dan Energi.....	21
3. Industri Manufaktur	22
4. Pariwisata	23
5. Transportasi dan Komunikasi	25
F. Sumber Data	26
BAB III	
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	28
A. Kuantitas Penduduk.....	28
1. Jumlah dan Sebaran Penduduk	28
a. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	29
b. Kepadatan Penduduk	36
c. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	42
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	44
a. Rasio Jenis Kelamin.....	45



b.	Piramida Penduduk	48
c.	Rasio Ketergantungan	50
3.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	53
a.	Angka Perkawinan Kasar	60
b.	Angka Perkawinan Umum	63
c.	Rata-rata Umur perkawinan Pertama	65
d.	Angka Perceraian Kasar	66
e.	Angka Perceraian Umum	70
4.	Keluarga	71
a.	Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	72
b.	Hubungan dengan Kepala Keluarga	74
c.	Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	75
d.	Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	77
e.	Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	79
f.	Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	83
g.	Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan	85
5.	Penduduk Menurut Karakter Sosial.....	87
a.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	87
b.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	90
c.	Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan	96
d.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah	99
B.	Kualitas Penduduk	101
1.	Kesehatan	101
a.	Kelahiran	101
1)	Angka Kelahiran Kasar	102
2)	Angka Kelahiran Umum	105
3)	Rasio Anak dan Perempuan	105
b.	Kematian	110
1.	Angka Kematian Kasar	113
2.	Angka Kematian Bayi	114
3.	Angka Kematian Neonatal	116
4.	Angka kematian Post Neonatal	116
5.	Angka Kematian Balita	116
6.	Angka Kematian Ibu	117
2.	Pendidikan	117
a.	Angka Melek Huruf	118
b.	Angka Partisipasi Kasar	119



c. Angka Partisipasi Murni	124
d. Angka Penduduk Putus Sekolah.....	126
e. Proporsi dan Jumlah Kerja dan Angkatan Kerja	132
1) Jumlah Proporsi Tenaga Kerja (<i>Manpower</i>).....	132
2) Proporsi Penduduk Angkatan Kerja	136
3) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).....	142
3. Sosial.....	144
C. Mobilitas	152
1. Mobilitas Masuk	152
2. Mobilitas Keluar	154

BAB IV

DOKUMEN KEPENDUDUKAN	157
A. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	157
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	160
C. Kepemilikan Kartu Pencatatan Sipil	163
1. Akta Kelahiran.....	163
2. Akta Kematian.....	166
3. Akta Perkawinan	169
4. Akta Perceraian.....	172
5. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	174

BAB V

KESIMPULAN.....	177
DAFTAR PUSTAKA	179



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Data Jumlah Penduduk Jawa Barat 9 Tahun Terakhir	15
Tabel 3.1	
Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin	30
Tabel 3.2	
Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota Penyangga Ibu Kota.....	33
Tabel 3.3	
Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota Bandung Raya	35
Tabel 3.4	
Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/kota	38
Tabel 3.5	
Penduduk Provinsi Jawa Barat 9 Tahun Terakhir	43
Tabel 3.6	
Penduduk Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023.....	44
Tabel 3.7	
Rasio Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota.....	46
Tabel 3.8	
Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Per Kabupaten/Kota	51
Tabel 3.9	
Status Perkawinan berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 3.10	
Status Perkawinan berdasarkan Kelompok Umur.....	57
Tabel 3.11	
Status Perkawinan berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	58
Tabel 3.12	
Angka Perkawinan Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota	62
Tabel 3.13	
Angka Perkawinan Umum berdasarkan Kabupaten/Kota	63
Tabel 3.14	
Persentase Perempuan Lajang berdasarkan Kelompok Umur sebagai Bahan Perhitungan SMAM.....	65
Tabel 3.15	
Angka Perceraian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota	68
Tabel 3.16	
Angka Perceraian Umum berdasarkan Kabupaten/Kota.....	70
Tabel 3.17	
Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga.....	73



Tabel 3.18	
Hubungan dengan Kepala Keluarga	74
Tabel 3.19	
Kepala Keluarga berdasarkan Umur	75
Tabel 3.20	
Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 3.21	
Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin	80
Tabel 3.22	
Kondisi Kepala Keluarga dan Status Kawin	81
Tabel 3.23	
Kepala Keluarga berdasarkan Status Pendidikan	84
Tabel 3.24	
Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	86
Tabel 3.25	
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan	87
Tabel 3.26	
Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kabupaten/Kota	91
Tabel 3.27	
Jumlah Penduduk menurut Agama	95
Tabel 3.28	
Jumlah Penduduk menurut Kecacatan.....	97
Tabel 3.29	
Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Darah	100
Tabel 3.30	
Angka Kelahiran Kasar.....	103
Tabel 3.31	
Rasio Anak dan Perempuan	107
Tabel 3.32	
Angka Kematian	111
Tabel 3.33	
Angka Kematian Kasar.....	113
Tabel 3.34	
Angka Melek Huruf	118
Tabel 3.35	
Angka Partisipasi Kasar SD	120
Tabel 3.36	
Angka Partisipasi Kasar SMP	122
Tabel 3.37	
Angka Partisipasi Kasar SMA.....	123



Tabel 3.38	
Angka Partisipasi Murni	125
Tabel 3.39	
Angka Penduduk Putus Sekolah SD dan SMP	127
Tabel 3.40	
Angka Penduduk Putus Sekolah SMA dan SMK.....	129
Tabel 3.41	
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Pekerjaan	133
Tabel 3.42	
Proporsi Tenaga Kerja	135
Tabel 3.43	
Proporsi Angkatan Kerja.....	137
Tabel 3.44	
Proporsi Penduduk Tidak Bekerja	139
Tabel 3.45	
Proporsi Penduduk Bekerja.....	141
Tabel 3.46	
Angka Partisipasi Kerja	143
Tabel 3.47	
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	145
Tabel 3.48	
Jumlah Penduduk berdasarkan Migrasi Masuk Antar Kabupaten/Kota	152
Tabel 3.49	
Jumlah Penduduk berdasarkan Migrasi Keluar Antar Kabupaten/Kota	154
Tabel 4.1	
Keluarga yang Sudah Terdaftar (Pemilik Kartu Keluarga).....	158
Tabel 4.2	
Jumlah Kepemilikan KTP Elektronik	161
Tabel 4.3	
Jumlah Kepemilikan Akta Lahir	164
Tabel 4.4	
Jumlah Kepemilikan Akta Mati.....	167
Tabel 4.5	
Jumlah Kepemilikan Akta Kawin.....	170
Tabel 4.6	
Jumlah Kepemilikan Akta Cerai	172
Tabel 4.7	
Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak.....	174



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Kerajaan Tarumanegara	10
Gambar 2.2	
Gedung Sate.....	11
Gambar 2.3	
Peta Provinsi Jawa Barat	12
Gambar 2.4	
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat	16
Gambar 2.5	
Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	17
Gambar 2.6	
Angka Produksi Pertanian	19
Gambar 2.7	
Pertambangan dan Energi.....	21
Gambar 2.8	
Industri Manufaktur.....	22
Gambar 2.9	
Pariwisata.....	24
Gambar 2.10	
Transportasi dan Komunikasi	25
Gambar 3.1	
Grafik Persebaran Penduduk Jawa Barat	32
Gambar 3.2	
Grafik Kabupaten/Kota Terpadat di Jawa Barat	40
Gambar 3.3	
Grafik Kabupaten/Kota Terendah di Jawa Barat	41
Gambar 3.4	
Grafik Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat.....	49
Gambar 4.1	
KTP Elektronik	160
Gambar 4.2	
Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran Per Kabupaten/Kota.....	166



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu strategis dari pembangunan suatu wilayah adalah isu kependudukan. Isu kependudukan bersifat lintas sektor, bukan saja berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk saja, isu kependudukan juga berhubungan dengan pengintegrasian berbagai aspek kedalam perencanaan pembangunan dan pencapaian pembangunan kependudukan itu sendiri. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk serta pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Dengan demikian data kependudukan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai pada data *by name by address* menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dan tepat sasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi



tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Data dan informasi tersebut wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan (Pasal 49).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam *database* kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal”. Hal tersebut yang mendasari pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai data kependudukan ini perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dibuat untuk memberikan gambaran kondisi kependudukan di Daerah, serta prospek kependudukan di masa yang akan datang. Di sisi lain penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengacu kepada hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merupakan salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

B. Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan skala Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai salah satu informasi yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan khususnya bagi *stakeholder* di Provinsi Jawa Barat, dan umumnya bagi seluruh pihak yang memerlukan data terkait dengan perkembangan kependudukan di Jawa Barat dalam bentuk ikhtisar meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah:

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi; dan
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Ketentuan Umum

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);



4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap semester, yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
8. Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);



13. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992);
 16. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (UU No 52 Tahun 2009);
 17. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010);
 18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
 19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 20. Kematian atau mortalitas menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik);
-



21. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita;
22. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja);
23. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
24. Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
25. Mobilitas Penduduk Non Permanen (*circucaltion/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik melaju (*commuting*) dan menginap/mondok;
26. Penduduk Musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
27. Mobilitas Penduduk Ulang Alik atau nglaju (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
28. Migrasi Kembali (*return migration*) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu pendataan bertempat tinggal didaerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal didaerah yang berbeda;
29. Migrasi Semasa Hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi di mana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
30. Migrasi risen (*recent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi)



- dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
31. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
 32. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk dipertanian dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkiraan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
 33. Penduduk Usia Kerja (Produktif) adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
 34. Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha;
 35. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
 36. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/ *survey* atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
 37. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
 38. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
 39. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda- tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
 40. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
 41. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk;



42. Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*) banyaknya kelahiran setiap 1000 Wanita yang berusia 15- 49 tahun dalam satu tahun;
 43. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
 44. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
 45. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
 46. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/MMR*) adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
 47. Pengeluaran Untuk Makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
 48. Angka Partisipasi Kasar /APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
 49. Angka Partisipasi Murni/APM adalah persentase jumlah peserta didik Sekolah Dasar usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
 50. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pemanfaatan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
-



Profil Perkembangan Penduduk Jawa Barat Tahun 2023

Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Provinsi Jawa Barat dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang.

LANDASAN KONSTITUSIONAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

SUMBER DATA

Hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

TUJUAN PENYUSUNAN

Sebagai salah satu informasi yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan khususnya bagi *stakeholder* di Provinsi Jawa Barat dan umumnya bagi seluruh pihak yang memerlukan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup bahasan yang dikaji dalam laporan ini mencakup kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat

Temuan arkeologi di Anyer menunjukkan adanya budaya logam perunggu dan besi sejak sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman Buni (Bekasi kuno) dapat ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon. Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam Aksara Wengi (yang digunakan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansekerta yang sebagian besar menceritakan para Raja Tarumanagara. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian Barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari Tahun 932 M. Kerajaan Sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang Kota Bogor).



Gambar 2.1

Kerajaan Tarumanegara

Dari tahun 1567 sampai 1579, di bawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, Kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, Ibu Kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ketangan Kesultanan Banten. Sementara untuk wilayah Priangan (Jawa Barat bagian Tenggara) jatuh ketangan Kesultanan Mataram.



Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuursvormingwet* Tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah Provinsi. Sebelum Tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden (Tatar Soenda)* atau *Pasoendan*, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.



Gambar 2.2
Gedung Sate

Pada 19 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)*, dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh *United Nations Commission for Indonesia (UNCI)* sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada Tahun 2000, wilayah Provinsi Jawa Barat berkurang, dengan berdirinya Provinsi Banten di Bagian Barat.

Pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat berada di Kota Bandung, atau tepatnya di Gedung Sate, yang sebelumnya merupakan Markas

Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang kemudian sekitar tahun 1980-an berubah menjadi Kantor Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat hingga kini.

B. Letak Geografis

Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5050`–7050` Lintang Selatan dan 104048`–108048` Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah yang terdiri atas: Secara geografis terletak pada 106° 22' 13" Bujur Timur–108° 50' 1,4" Bujur Timur, dan 5° 54' 49,58" Lintang Selatan–7° 49' 15,52" Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya meliputi:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Provinsi Banten.



Gambar 2.3

Peta Provinsi Jawa Barat

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam. Di wilayah sebelah Utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai. Wilayah Tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari Barat hingga ke Timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah Barat Daya Kota Cirebon. Sedangkan untuk wilayah Selatan, didominasi oleh daerah berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal. Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur *Circum Pacific* dan *Mediteran*, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai



dengan masih banyaknya gunung berapi aktif sehingga memiliki resiko gempa bumi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021, iklim daerah Jawa Barat termasuk tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°C-34°C dan curah hujan yang beragam. Curah hujan di Jawa Barat menurut data BMKG berada pada rentang curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun. Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 150 mm, dan periode musim hujan dengan curah hujan lebih dari 150 mm. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau Tahun 2022 Secara administrasi pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Pangandaran serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, serta terdiri dari 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5.312 Desa. Masyarakat Provinsi Jawa Barat terdiri dari sebagian besar Suku Sunda sehingga dalam kehidupan sehari-hari penduduk dalam berkomunikasi memakai Bahasa Sunda dengan berbagai macam dialek daerah dan Bahasa Indonesia. Sebagian kecil penduduk memakai Bahasa Jawa Cirebonan dan Jawa Dermayon sebagai bahasa sehari-hari, terutama pada Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik topografi wilayah pegunungan curam di selatan, wilayah lereng bukit yang landai di tengah, wilayah dataran luas di utara, dan wilayah aliran sungai. Wilayah pegunungan curam (9,5 persen) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, dan wilayah lereng bukit yang landai (36,48 persen) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 mdpl, serta wilayah dataran landai (54,02 persen) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 mdpl.



Kondisi topografi Pesisir Utara Jawa Barat yang terdiri atas dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0–5 persen, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus Laut Jawa, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Adapun, kondisi topografi wilayah Pantai Selatan Jawa Barat merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia.

Aktivitas geologi di wilayah Provinsi Jawa Barat menghasilkan beberapa zona fisiografi yang satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan morfologi, petrologi, dan struktur geologinya. Van Bemmelen (1949), membagi daerah Jawa Barat ke dalam 4 (empat) besar zona fisiografi, masing-masing dari utara ke selatan adalah Zona Dataran Pantai Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat banyak pola kelurusan bentang alam yang diduga merupakan hasil proses pensesaran. Jalur sesar tersebut umumnya berarah barat-timur, utara-selatan, timur laut-barat daya, dan barat laut-tenggara. Secara regional, struktur sesar berarah timurlaut-baratdaya dikelompokkan sebagai Pola Meratus, sesar berarah utara-selatan dikelompokkan sebagai Pola Sunda, dan sesar berarah barat-timur dikelompokkan sebagai Pola Jawa. Struktur sesar dengan arah barat-timur umumnya berjenis sesar naik, sedangkan struktur sesar dengan arah lainnya berupa sesar mendatar. Sesar normal umum terjadi dengan arah bervariasi.

Dari sekian banyak struktur sesar yang berkembang di Provinsi Jawa Barat, ada 3 (tiga) struktur regional yang memegang peranan penting, yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Baribis, dan Sesar Lembang. Ketiga sesar tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh van Bemmelen (1949) dan diduga ketiganya masih aktif hingga sekarang.

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam, di wilayah sebelah utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai. Wilayah tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon, sedangkan untuk wilayah selatan didominasi oleh daerah



berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal. Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur Circum Pacific dan Mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi aktif sehingga memiliki resiko gempa bumi.

C. Gambaran Umum Demografi

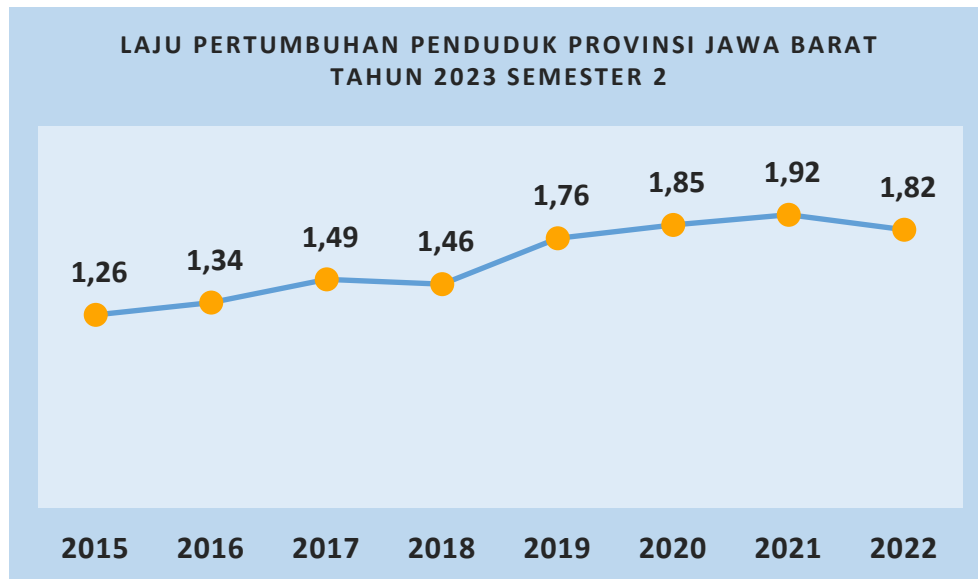
Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Jawa Barat tercatat sebanyak **49.339.670** jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah **24.987.540** jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah **24.352.130** jiwa. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk Jawa barat menjadi **49.572.392** jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah **25.101.104** jiwa (**50.64 %**) dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah **24.471.288** jiwa (**49.36 %**). Adapun perkembangan penduduk dalam 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Data Jumlah Penduduk Jawa Barat 9 Tahun Terakhir

NO	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	LPP
1	2015	21.976.271	21.219.417	43.195.688	-
2	2016	22.275.690	21.464.469	43.740.159	1,26
3	2017	22.590.755	21.771.384	44.362.139	1,34
4	2018	22.915.986	22.245.339	45.161.325	1,49
5	2019	23.223.993	22.555.604	45.779.597	1,46
6	2020	23.893.514	23.249.109	47.142.623	1,76
7	2021	24.423.410	23.796.684	48.220.094	1,85
8	2022	24.987.540	24.352.130	49.339.670	1,92
9	2023	25.268.145	24.631.847	49.899.992	1,82

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Berdasarkan pada Tabel 2.1 jumlah penduduk Jawa Barat dalam kurun waktu sembilan tahun terus mengalami peningkatan baik dianalisis berdasarkan jenis kelamin atau pun berdasarkan jumlah total keseluruhan penduduk Jawa Barat. Adapun laju peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat dalam 1,74% selama sembilan tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.4

Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Gambar 2.4 menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk selama sembilan tahun terakhir. Dilihat berdasarkan grafik di atas persentase laju penduduk pada Tahun 2023 sebesar 1,82%.

Peningkatan penduduk harus ditangani dengan baik dan komprehensif, pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait perlu melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan berkesinambungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu pertambahan jumlah penduduk, akan menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, kesehatan dan sebagainya.

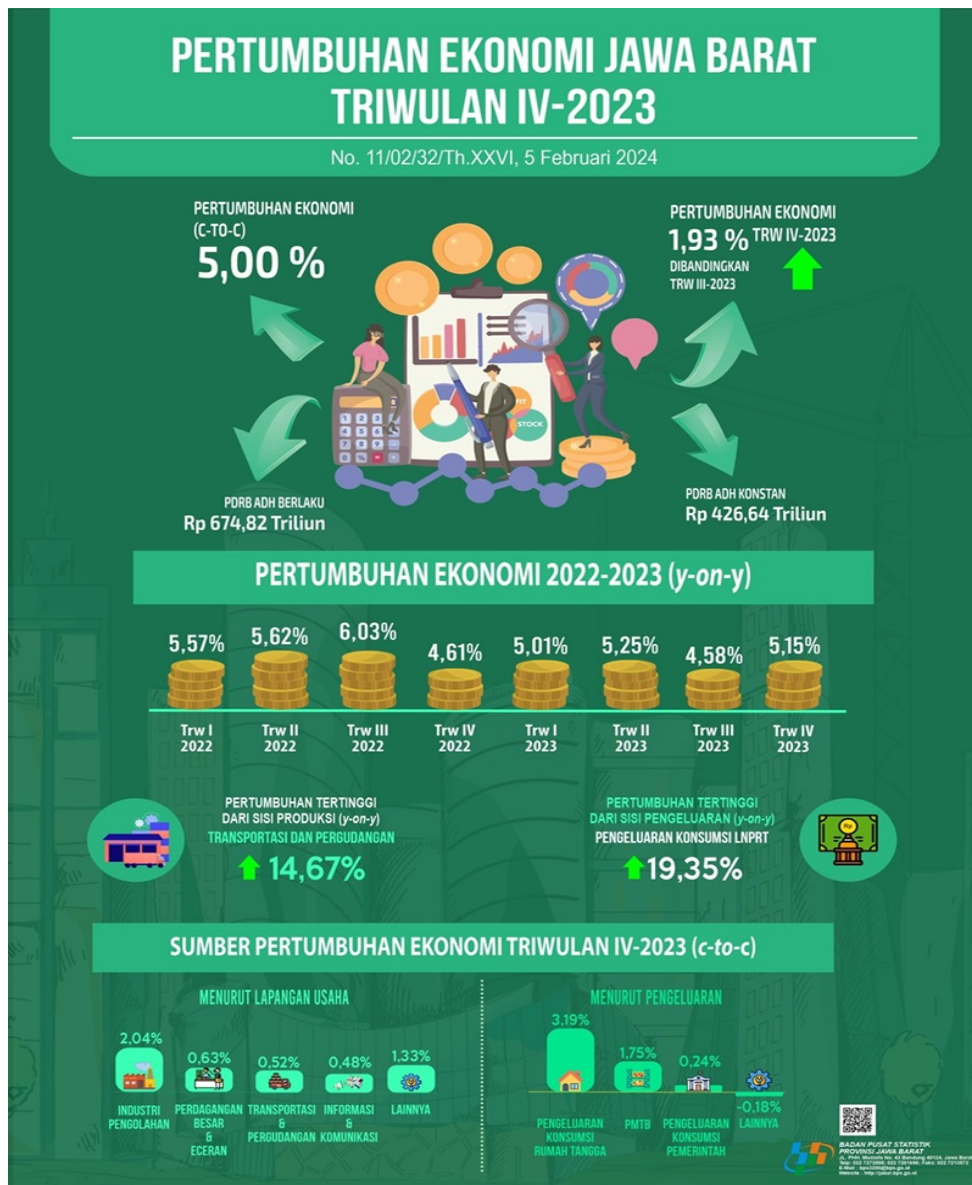
Keadaan sosial budaya Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan terlihat sebagai masyarakat yang ramah, memiliki toleransi yang tinggi dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, diliputi semangat gotong royong yang tinggi serta masih mempertahankan adat istiadat yang ada.

D. Kondisi Pengembangan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tahun 2023 pada Triwulan I yaitu 5,01% kemudian pada Triwulan II Tahun 2023 menuju angka 5,25%.



Pada Tahun 2023 Triwulan III mengalami penurunan menjadi angka 4,58 % dan pada Triwulan IV mengalami kenaikan menjadi 5,15%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mulai Triwulan I Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dalam persen dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Grafik 2.3 tersebut, ekonomi Jawa Barat pada Triwulan ke IV Tahun 2023 terhadap Triwulan ke IV Tahun 2022 mengalami



pertumbuhan sebesar 5,00 persen (C-TO-C). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,67 persen.

E. Potensi Daerah

Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing apalagi berbicara potensi. Mulai dari potensi yang bersifat alami ataupun potensi yang terbentuk sebagai buah dari pembangunan yang dilakukan. Adapun potensi daerah di Jawa Barat yang bersifat alami adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia. Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto nasional telah menurun secara signifikan dalam setengah abad terakhir, saat ini sektor pertanian masih memberikan pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia.

Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian merupakan hal sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang pertanian, yaitu peningkatan produksi pangan terutama menuju pencapaian surplus beras, stabilisasi harga pangan, pemantapan penganeekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal, perlindungan dan pemberdayaan petani; serta peningkatan kesejahteraan petani. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah ke arah itu adalah dengan menerapkan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.



Gambar 2.6

Angka Produksi Pertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian. Karakteristik lahan pertanian inilah yang sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian dan juga keragamannya.

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pada tahun 2023, tercatat luas panen padi sebesar 1.580.873,21 hektar dengan produksi sebesar 9.095.938,03 ton (angka sementara). Sedangkan produksi beras tercatat sebesar 5.252.741,61 ton.

b. Hortikultura

Pada tahun 2023, produksi buah-buahan terbesar adalah pisang yaitu sebesar 14.356.997 kwintal, untuk tanaman hias produksi terbesar adalah krisan yaitu 213.576.390 tangkai. Sementara itu produksi sayur sayuran di Jawa Barat di dominasi oleh tomat yaitu sebesar 2.680.727



kwintal, untuk tanaman biofarmaka produksi terbesar adalah kapulaga sebesar 76.051.665 kg dan disusul oleh jahe sebesar 30.186.202 kg.

c. Perkebunan

Sub sektor perkebunan sampai sekarang masih mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian. Peluang bisnis perkebunan di Jawa Barat masih bisa ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari produksi perkebunan Jawa Barat masih menunjukkan peningkatan walaupun tidak untuk semua komoditas.

Provinsi Jawa Barat memiliki perkebunan yang dikelola oleh perkebunan besar milik negara dan swasta serta perkebunan rakyat, komoditi potensialnya adalah teh, kelapa, kelapa sawit, tebu dan karet. Pada tahun 2023, luas areal perkebunan rakyat yang terluas adalah tanaman kelapa dalam seluas 141.442 ha dan luas areal Perkebunan Rakyat terkecil adalah tanaman jambu mete seluas 22 ha. Sedangkan produksi hasil perkebunan rakyat yang terbesar adalah kelapa deres sebanyak 134.965 ton.

d. Kehutanan

Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, selain sebagai tempat produksi oksigen dan hasil hutan, hutan juga memberikan manfaat untuk penyeimbang lingkungan dari bahaya kerusakan.

Luas kawasan hutan di Jawa Barat terdiri dari 3 bagian yaitu: Hutan Lindung, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Hutan Produksi. Pada tahun 2023, Hutan Lindung memiliki luas sebesar 230.122,22 ha. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam memiliki luas sebesar 172.179,78 ha, sedangkan hutan produksi memiliki luas sebesar 392.320,11ha. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi kayu bulat pada tahun 2023 adalah 105.563,88 m³.

e. Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Jawa Barat berupa ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2022, jumlah ternak sapi potong sebanyak 377.505 ekor, sapi perah 110.005 ekor, kerbau 61.296 ekor, kuda 8.643 ekor, kambing 1.373.978 ekor, domba 8.468.224 ekor dan babi 2.824 ekor.

Pada tahun 2023, produksi daging ternak terbesar di provinsi Jawa Barat adalah daging ternak sapi sebesar 76.287.198,67 kg. Sedangkan

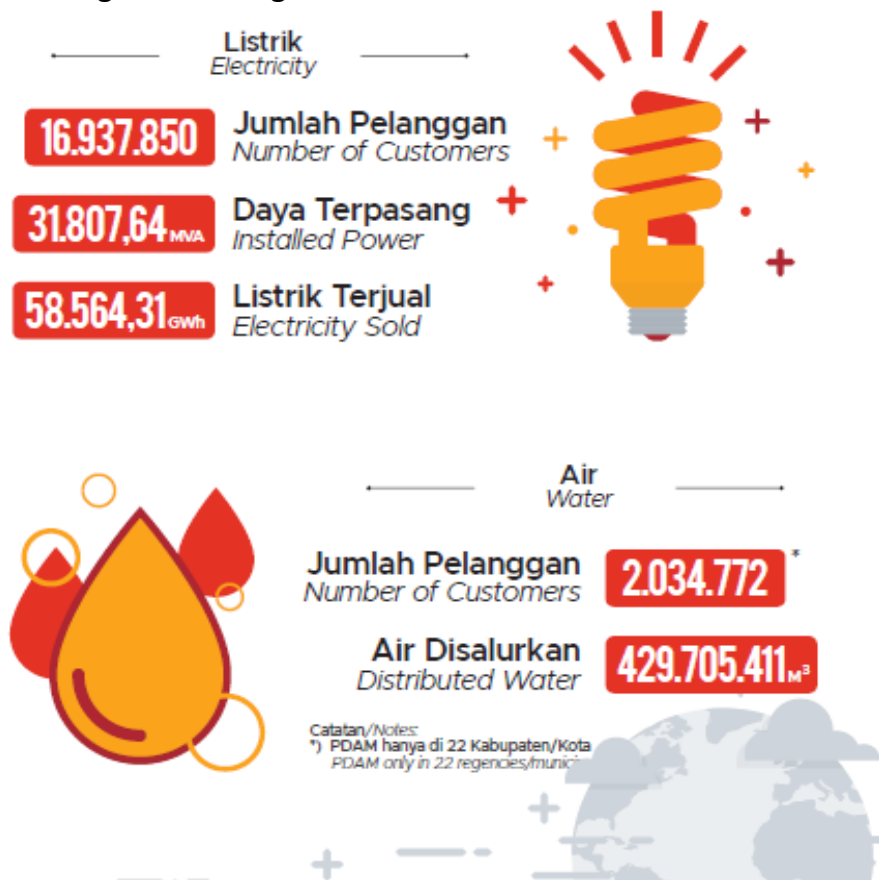


produksi untuk daging unggas yang terbesar adalah ayam broiler/pedaging sebesar 899.558.379,62 kg

f. Perikanan

Pada tahun 2022, produksi perikanan tangkap di laut sebanyak 261.554 ton dan di perikanan tangkap di perairan darat 16.055 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap sebanyak 277.609 ton.

2. Pertambangan dan Energi



Gambar 2.7

Pertambangan dan Energi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Kebutuhan energi Listrik akan bertambah sejalan dengan berkembangnya pembangunan perekonomian di sektor perindustrian dan pertambahnya pengguna listrik rumah tangga, tahun 2023 jumlah pelanggan listrik di Jawa Barat sebanyak 16.937.850 pelanggan dengan daya terpasang sebesar 31.807,64 MVA energi listrik yang terjual sebanyak 58,56 GWh. Semenjak tahun 2015, jumlah perusahaan air bersih di Provinsi Jawa



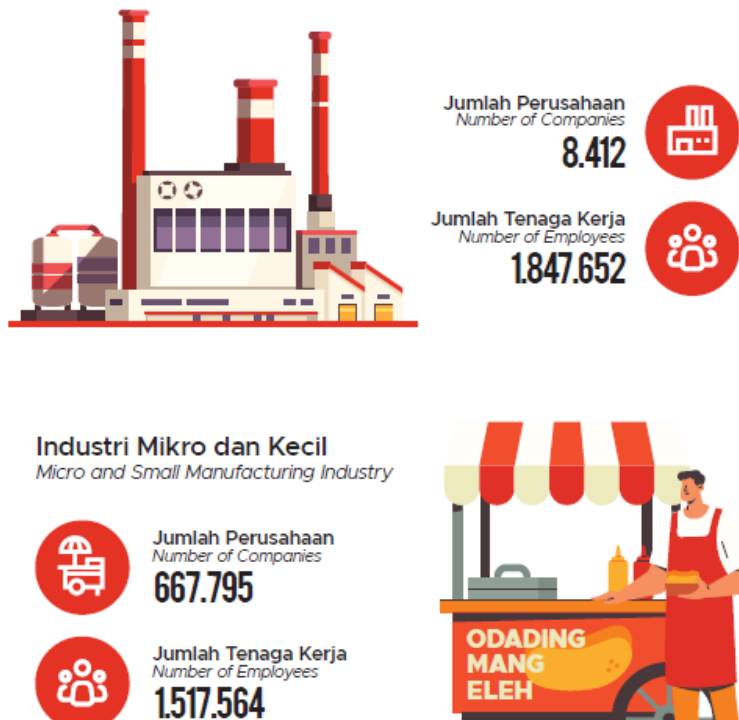
Barat sampai dengan tahun 2023 masih tetap, yaitu sebanyak 22 perusahaan. Jumlah pelanggan air bersih menunjukkan trend fluktuatif akan tetapi terus menunjukkan peningkatan jumlah. Jumlah pelanggan PAM pada tahun 2023 sebanyak 2 juta pelanggan.

Berdasarkan kelompok pelanggan, pola distribusi jumlah pelanggan terbesar masih ditempati oleh pelanggan dari sektor non niaga yaitu rumah tangga, instansi pemerintah dan pelanggan khusus dengan jumlah di tahun 2022 mencapai 1,89 juta pelanggan.

Berdasarkan volume air bersih yang disalurkan menunjukkan pola yang berfluktuasi, dimana air bersih yang disalurkan terus mengalami perubahan volume dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 sebesar 429,7 juta m³. Berdasarkan kelompok penggunaanya, kelompok non niaga masih merupakan pengguna air PAM terbesar dengan volume yang tersalurkan mengalami peningkatan yaitu dari 413,53 juta m³ pada tahun 2021 menjadi 429,70 juta m³ di tahun 2022.

3. Industri Manufaktur

a. Industri Besar dan Sedang



Gambar 2.8

Industri Manufaktur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat



Pada akhir tahun 2021 terdapat 8.412 perusahaan/usaha dan sekitar 1.847.652 orang yang bekerja di perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Barat. Jumlah tersebut terdiri atas pekerja sektor produksi yaitu pekerja yang langsung bekerja di dalam proses produksi dan pekerja administrasi serta penunjang lainnya; yaitu pekerja selain pekerja produksi seperti pimpinan perusahaan, staf direksi, pegawai administrasi, keuangan, pemasaran, kebersihan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2021 nilai produksi di Provinsi Jawa Barat mencapai 1.941.177 miliar rupiah atau turun sebesar 7,34 persen dibandingkan tahun 2020.

Biaya investasi adalah semua biaya yang dipakai untuk memproduksi suatu barang seperti bahan baku dan penolong, bahan bakar dan pelumas, listrik dan pengeluaran lainnya tapi tidak termasuk upah gaji, pajak tak langsung, serta sewa tanah. Biaya investasi yang dipakai oleh seluruh perusahaan industri di Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 1.034.564 miliar rupiah, terjadi penurunan sebesar 11,39 persen dibandingkan tahun 2020

b. Industri Mikro dan Kecil

Jumlah Industri Mikro dan Kecil di Jawa Barat tahun 2022 meningkat menjadi 667.795 perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap juga meningkat menjadi 1.512.564 orang. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Garut sebanyak 69.365 usaha, sementara jumlah tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 156.408 orang.

4. Pariwisata

Dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah, sektor pariwisata memiliki andil yang sangat besar. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya maka suatu daerah dapat menarik para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk datang dan berwisata di daerahnya. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel/penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya.

Pada tahun 2023, jumlah akomodasi pada hotel berbintang sebanyak 598 akomodasi dengan jumlah kamar yang tersedia 54.235 kamar dan 84.576 tempat tidur. Sementara pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya

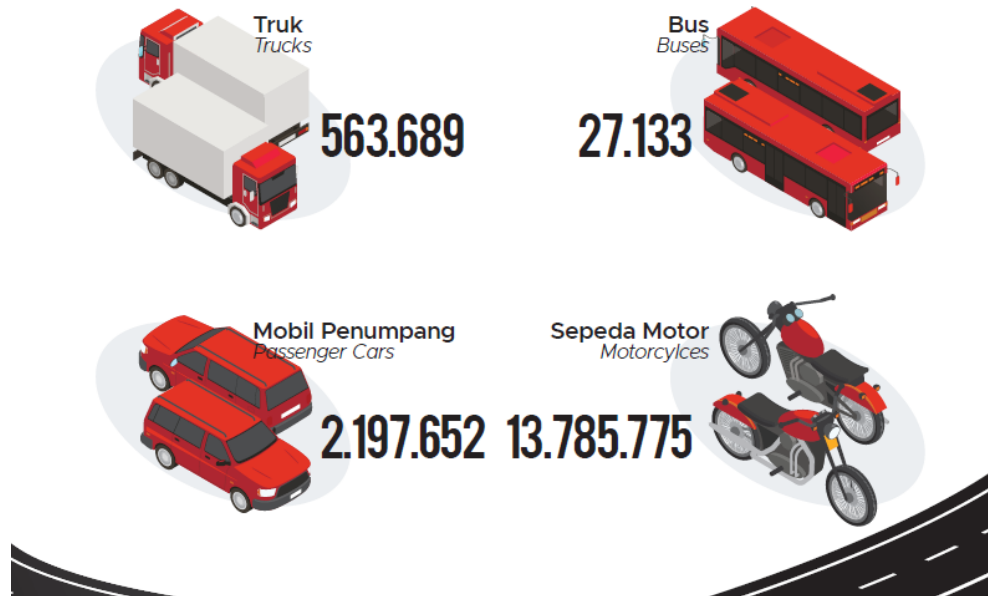


5. Transportasi dan Komunikasi

Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

Number of Registered Motor Vehicles in Jawa Barat

2023



Gambar 2.10

Transportasi dan Komunikasi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

a. Perhubungan Darat

Perhubungan darat, udara, laut merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar perannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah. Di Jawa Barat peranan perhubungan darat cukup dominan terutama untuk menyalurkan produk industri berbagai daerah terutama di Pulau Jawa, dan bahan baku yang melalui pelabuhan laut Tanjung Priok. Selain itu, perhubungan darat sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan perekonomian di pedesaan. Panjang jalan di Jawa Barat pada akhir tahun 2023 adalah 23.009,91 km. Sebagian besar jalan di Provinsi Jawa Barat merupakan jalan



aspal dengan proporsi sebanyak 76,37 persen dan sebanyak 58,70 persen merupakan jalan dengan kondisi baik.

b. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan meliputi kendaraan pribadi, Dinas dan Kendaraan umum.

Populasi kendaraan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 masih didominasi oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor yaitu sebanyak 13.785.775 unit atau 83,18 persen dari populasi kendaraan yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Di urutan kedua adalah mobil penumpang yang merupakan gabungan dari jenis mobil sedan, jeep dan station wagon sebanyak 2.197.652 unit, sedangkan jumlah bus/microbus pada tahun 2023 sebanyak 27.133 unit. Sedangkan untuk moda angkutan kota/desa pada tahun 2023 sebanyak 105.137 unit dengan sebaran tertinggi di Kabupaten Bogor sebanyak 55.485 unit dan terendah di Kabupaten Pangandaran hanya sebanyak 50 unit.

F. Sumber Data

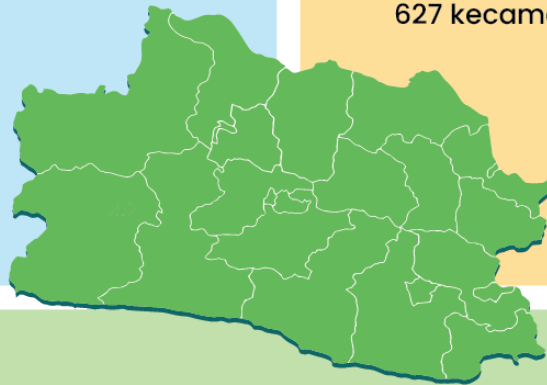
1. Data registrasi penduduk dan pencatatan sipil baik yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara operasional maupun laporan secara manual status per 31 Desember 2023, menjadi sumber utama dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Data penduduk tersebut sebelumnya telah dikonsolidasikan dengan *data center* Kementerian Dalam Negeri (hasil perekaman e-KTP). Dengan demikian kondisi data yang disajikan dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini menggambarkan kondisi kependudukan secara *de jure* dan sangat tergantung pada kedisiplinan penduduk dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota c.q. Kelurahan setempat.
2. Data kependudukan yang berasal dari lintas sektor terkait.



Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

Letak Geografis

Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5°50"–7°50" Lintang Selatan dan 104°48"–108°48" Bujur Timur.



Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 27 kabupaten/kota meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, terdiri dari 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa.



Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat



Jumlah
49.899.992 jiwa



Laki-Laki
25.268.145 jiwa



Perempuan
24.631.847 jiwa

Potensi Ekonomi



Pertanian



Perikanan



Perhutanan



Pariwisata



Perhubungan



BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 49.899.992, yang terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak 25.268.145 jiwa (50,64%) dan perempuan sebanyak 24.631.847 jiwa (49,36%). Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 49.339.670 jiwa. Sehingga dalam satu tahun jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebanyak 560.322 jiwa atau naik sebesar 1,12%.

Sebagai Provinsi dengan jumlah populasi terbesar se-Indonesia, tidak lantas menjadi keuntungan bagi Provinsi Jawa Barat, karena pada dasarnya persebaran penduduk di Jawa Barat merupakan satu permasalahan yang harus dihadapi. Persebaran penduduk tidak seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Populasi penduduk terpusat pada beberapa daerah sementara daerah lainnya persebaran dan kepadatannya lebih rendah. Daerah-daerah penyangga ibukota Jawa Barat dan daerah Bandung Raya merupakan daerah yang mempunyai sebaran dan kepadatan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudahan akses akan berbagai kebutuhan menjadikan daerah penyangga ibukota Jawa Barat dan daerah Bandung Raya banyak dikunjungi dan menjadi tempat tinggal favorit di Provinsi Jawa Barat.



Untuk melihat jumlah dan sebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat ada baiknya dibahas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebaran penduduk dapat dilihat dari proporsi penduduk, kepadatan penduduk dalam suatu daerah, dan laju pertumbuhan penduduk. Data dibawah ini menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan di Provinsi Jawa Barat.

a. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tujuannya adalah untuk menyediakan berbagai sarana dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan jenis kelamin dari penduduk yang ada. Tabel 3.1. memperlihatkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada proporsi penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.1
Proporsi penduduk menurut jenis kelamin

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
3201	BOGOR	2.846.258	5,70	2.712.627	5,44	5.558.885	11,14
3202	SUKABUMI	1.416.916	2,84	1.373.404	2,75	2.790.320	5,59
3203	CIANJUR	1.298.946	2,60	1.236.056	2,48	2.535.002	5,08
3204	BANDUNG	1.907.055	3,82	1.842.117	3,69	3.749.172	7,51
3205	GARUT	1.406.452	2,82	1.347.497	2,70	2.753.949	5,52
3206	TASIKMALAYA	997.093	2,00	961.128	1,93	1.958.221	3,92
3207	CIAMIS	642.917	1,29	638.284	1,28	1.281.201	2,57
3208	KUNINGAN	624.827	1,25	606.945	1,22	1.231.772	2,47
3209	CIREBON	1.236.316	2,48	1.201.583	2,41	2.437.899	4,89
3210	MAJALENGKA	681.959	1,37	672.844	1,35	1.354.803	2,72
3211	SUMEDANG	607.848	1,22	597.837	1,20	1.205.685	2,42
3212	INDRAMAYU	973.142	1,95	960.806	1,93	1.933.948	3,88
3213	SUBANG	817.798	1,64	818.435	1,64	1.636.233	3,28
3214	PURWAKARTA	525.101	1,05	511.667	1,03	1.036.768	2,08
3215	KARAWANG	1.281.826	2,57	1.257.555	2,52	2.539.381	5,09
3216	BEKASI	1.614.695	3,24	1.582.311	3,17	3.197.006	6,41
3217	BANDUNG BARAT	939.958	1,88	907.138	1,82	1.847.096	3,70
3218	PANGANDARAN	221.825	0,44	220.380	0,44	442.205	0,89



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
3271	KOTA BOGOR	570.333	1,14	557.075	1,12	1.127.408	2,26
3272	KOTA SUKABUMI	183.332	0,37	181.580	0,36	364.912	0,73
3273	KOTA BANDUNG	1.287.427	2,58	1.281.680	2,57	2.569.107	5,15
3274	KOTA CIREBON	176.706	0,35	175.641	0,35	352.347	0,71
3275	KOTA BEKASI	1.257.169	2,52	1.256.500	2,52	2.513.669	5,04
3276	KOTA DEPOK	973.283	1,95	968.077	1,94	1.941.360	3,89
3277	KOTA CIMAHI	289.159	0,58	286.360	0,57	575.519	1,15
3278	KOTA TASIKMALAYA	384.805	0,77	373.010	0,75	757.815	1,52
3279	KOTA BANJAR	104.999	0,21	103.310	0,21	208.309	0,42
TOTAL		25.268.145	50,64	24.631.847	49,36	49.899.992	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

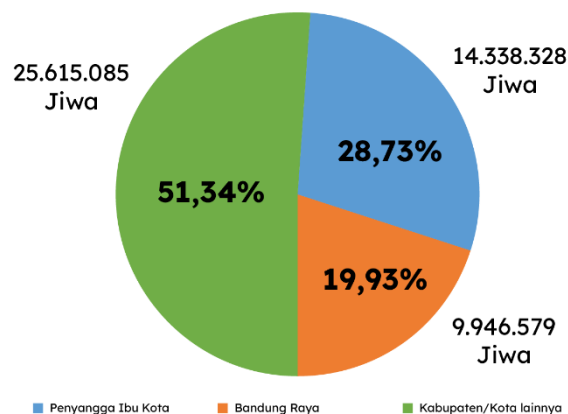




Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Provinsi Jawa Barat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan disebabkan karena:

- a) Banyaknya penduduk produktif yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat yang datang untuk bekerja. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota sangat memungkinkan banyaknya lapangan kerja. Demikian juga dengan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat industri.
- b) Di Provinsi Jawa Barat juga terdapat beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menjadi tujuan penduduk untuk melanjutkan pendidikannya

SEBARAN PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 SEMESTER 2



Gambar 3.1

Grafik Persebaran Penduduk Jawa Barat

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Sebaran penduduk di daerah penyangga Ibu kota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 14.338.328 Jiwa (28,73 %) dari total seluruh penduduk.

Adapun rincian per Kab/Kota dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota Penyangga Ibu Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	2.846.258	5,70	2.712.627	5,44	5.558.885	11,14
3216	BEKASI	1.614.695	3,24	1.582.311	3,17	3.197.006	6,41
3271	KOTA BOGOR	570.333	1,14	557.075	1,12	1.127.408	2,26
3275	KOTA BEKASI	1.257.169	2,52	1.256.500	2,52	2.513.669	5,04
3276	KOTA DEPOK	973.283	1,95	968.077	1,94	1.941.360	3,89
TOTAL		7.261.738	14,55	7.076.590	14,18	14.338.328	28,73

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Persebaran jumlah penduduk di daerah penyangga ibu kota pada dasarnya dipengaruhi sulitnya mencari tempat tinggal di Ibu Kota Negara. Banyak penduduk daerah penyangga ibu kota yang bekerja di Ibu Kota Negara. Sulit dan mahal tempat tinggal di Ibu Kota Negara menyebabkan banyak penduduk mencari tempat tinggal di daerah-daerah penyangga. Hal ini dikarenakan harga pasaran tempat tinggal di daerah penyangga lebih murah dan dapat menjangkau tempat kerja. Selain itu, daerah penyangga ibu kota saat ini sudah mempunyai fasilitas yang sangat memadai.

Selain bertempat tinggal di daerah penyangga ibu kota, pertumbuhan jumlah penduduk di daerah penyangga ibu kota juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya industri yang berkembang di daerah penyangga ibukota dan sekitarnya.

Selain daerah penyangga ibukota, sebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat berada di wilayah Bandung Raya sebanyak 19,93% dari total penduduk atau 9.946.579 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggal di daerah Bandung Raya ini cukup besar jika dibandingkan dengan banyak pembagian wilayah di Provinsi Jawa Barat. Daerah Bandung Raya meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Tabel 3.3 memperlihatkan jumlah penduduk yang tinggal di daerah Bandung Raya dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3.3
Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota Bandung Raya*

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3204	BANDUNG	1.907.055	3,82	1.842.117	3,69	3.749.172	7,51
3211	SUMEDANG	607.848	1,22	597.837	1,20	1.205.685	2,42
3217	BANDUNG BARAT	939.958	1,88	907.138	1,82	1.847.096	3,70
3273	KOTA BANDUNG	1.287.427	2,58	1.281.680	2,57	2.569.107	5,15
3277	KOTA CIMAHI	289.159	0,58	286.360	0,57	575.519	1,15
TOTAL		5.031.447	10,08	4.915.132	9,85	9.946.579	19,93

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Wilayah Bandung Raya selain sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi, juga merupakan pusat perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan. Ketiga hal tersebut menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut, dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Barat. Walaupun demikian, sebaran penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, masih didominasi oleh wilayah Kabupaten/Kota penyangga Ibu Kota Jakarta.

Banyaknya jumlah penduduk di Bandung Raya juga dipengaruhi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk dari luar daerah. Selain itu juga di sekitar Bandung Raya banyak lembaga pendidikan yang terkenal di Indonesia. Kondisi ini menjadikan wilayah Bandung Raya menjadi tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Selain itu jikapun lembaga pendidikan itu berada di luar daerah Bandung Raya, akan tetapi penduduk yang melanjutkan pendidikan dilembaga tersebut cenderung untuk memilih tinggal di daerah Bandung Raya. Hal ini dikarenakan mudahnya akses untuk memperoleh informasi serta sarana yang menunjang kelancaran pendidikannya. Selain itu juga dengan tinggal di daerah Bandung Raya lebih mudah untuk mencari hiburan, sehingga dapat menghilangkan tekanan akibat lamanya menuntut ilmu.

Sementara apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk di daerah Bandung Raya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Hal ini semakin memperkuat bahwa daerah Bandung Raya merupakan daerah yang menarik bagi kaum pendatang untuk memperoleh mata pencaharian serta pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang.



Pada Tabel 3.4 di bawah memperlihatkan kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat bahwa dengan luas 37.044 Km² dihuni oleh 49.899.992 jiwa atau per Km² dihuni oleh 1,347 jiwa, naik 6 jiwa per Km² dari tahun sebelumnya yang dengan jumlah kepadatan 1.332 jiwa.

Tabel 3.4
Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/kota

Kode Wil	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan (Jiwa/KM ²)
		N	%		
32	JAWA BARAT	49.899.992	100,00	37.044,86	1.347
3201	BOGOR	5.558.885	11,14	2.991,78	1.858
3202	SUKABUMI	2.790.320	5,59	4.164,15	670
3203	CIANJUR	2.535.002	5,08	3.631,92	698
3204	BANDUNG	3.749.172	7,51	1.740,84	2.154
3205	GARUT	2.753.949	5,52	3.101,24	888
3206	TASIKMALAYA	1.958.221	3,92	2.705,86	724
3207	CIAMIS	1.281.201	2,57	1.595,94	803
3208	KUNINGAN	1.231.772	2,47	1.192,90	1.033
3209	CIREBON	2.437.899	4,89	1.076,76	2.264
3210	MAJALENGKA	1.354.803	2,72	1.330,17	1.019
3211	SUMEDANG	1.205.685	2,42	1.566,20	770
3212	INDRAMAYU	1.933.948	3,88	2.076,06	932
3213	SUBANG	1.636.233	3,28	2.165,55	756
3214	PURWAKARTA	1.036.768	2,08	993,09	1.044
3215	KARAWANG	2.539.381	5,09	1.913,71	1.327
3216	BEKASI	3.197.006	6,41	1.251,05	2.555
3217	BANDUNG BARAT	1.847.096	3,70	1.283,44	1.439



Kode Wil	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan (Jiwa/KM ²)
		N	%		
3218	PANGANDARAN	442.205	0,89	1.128,15	392
3271	KOTA BOGOR	1.127.408	2,26	111,37	10.123
3272	KOTA SUKABUMI	364.912	0,73	48,31	7.553
3273	KOTA BANDUNG	2.569.107	5,15	166,59	15.421
3274	KOTA CIREBON	352.347	0,71	39,47	8.928
3275	KOTA BEKASI	2.513.669	5,04	213,04	11.799
3276	KOTA DEPOK	1.941.360	3,89	199,91	9.711
3277	KOTA CIMAHI	575.519	1,15	42,43	13.563
3278	KOTA TASIKMALAYA	757.815	1,52	183,94	4.120
3279	KOTA BANJAR	208.309	0,42	131,01	1.590

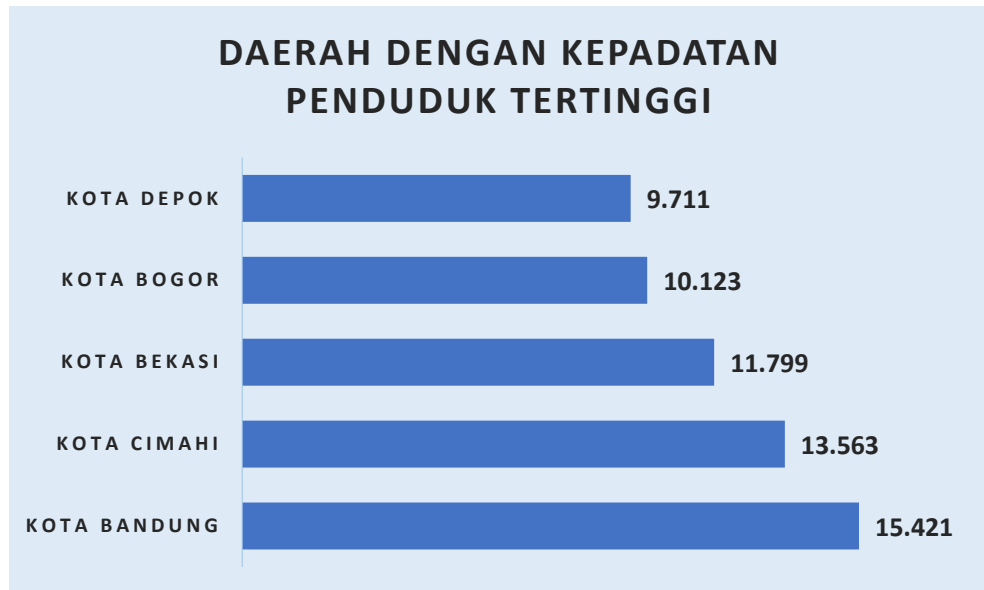
Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

** Luas Wilayah Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022





Persebaran Penduduk di Jawa Barat apabila dilihat dari setiap Kabupaten/Kota, kepadatan penduduk didominasi oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Kota. Kota Bandung merupakan wilayah terpadat dengan 15.421 jiwa/Km², disusul Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Bogor sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:

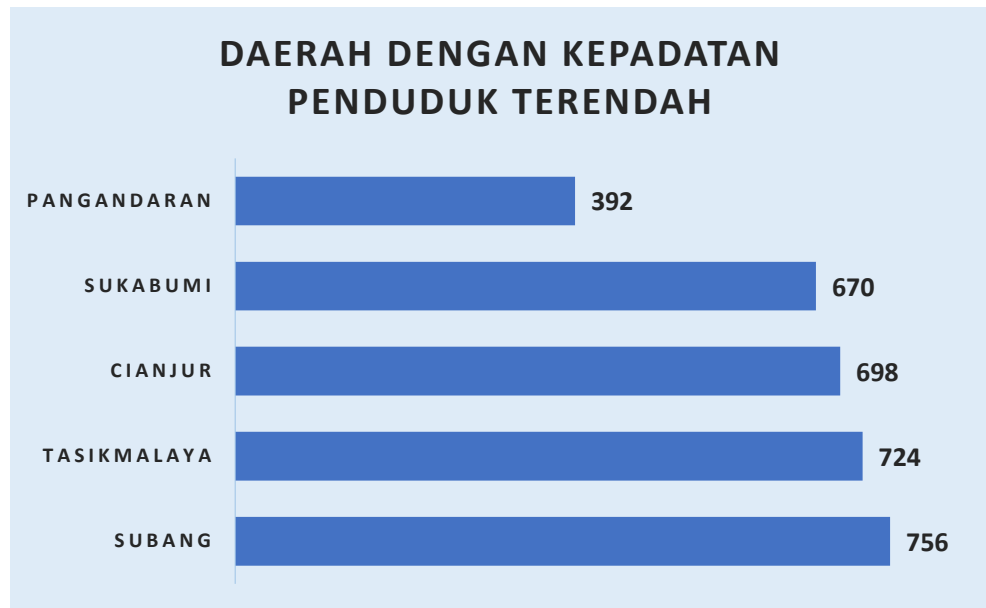


Gambar 3.2

Grafik Kabupaten/Kota Terpadat di Jawa Barat

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Sementara itu untuk beberapa daerah lainnya terjadi kebalikan dari daerah-daerah diatas karena memiliki kepadatan terendah yakni di Kabupaten Pangandaran yaitu sebanyak 392 Jiwa/Km². Terendah berikutnya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Subang seperti terlampir pada Gambar berikut;



Gambar 3.3

Grafik Kabupaten/Kota Terendah di Jawa Barat

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepadatan penduduk di suatu daerah faktor pertama adalah kelahiran, jika banyak kelahiran yang terjadi, maka semakin padat juga kondisi di suatu daerah. Faktor kedua adalah ekonomi. Sebagian besar daerah memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dari daerah yang lain. Hal ini ditentukan dari seberapa banyak tempat industri, peluang kerja dan jumlah pendapatannya. Faktor yang ketiga adalah kondisi alam dan letak geografis wilayah yang memiliki cuaca atau iklim yang mendukung untuk menjadi tempat tinggal atau tempat bekerja. Biasa daerah dengan kondisi demikian, lebih diminati oleh penduduk. Letak geografis juga menentukan suatu tempat apakah tempat tersebut untuk dijadikan tempat tinggal atau tempat bekerja. Misalnya dekat jauhnya dengan sekolah, pusat pemerintah, pusat perbelanjaan dan infrastruktur jalan untuk akses keluar masuk daerah tersebut.



c. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah. Dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan perpindahan (migrasi). Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu, migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah penduduk, dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/*in migration* dan keluar/*out migration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto (*net migration*).

LPP tentunya tidak terlepas dari membandingkan jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah dalam beberapa tahun. Laju pertumbuhan penduduk tentunya akan terlihat jika ada perbedaan jumlah penduduk antara tahun yang satu dibandingkan dengan tahun lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam satu daerah. Demikian juga dengan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dengan melihat jumlah penduduk dalam beberapa tahun. Berikut adalah data jumlah penduduk Jawa Barat dalam 8 (delapan) tahun terakhir.

Penghitungan LPP menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$$

Keterangan Rumus:

r : Laju Pertumbuhan Penduduk
t : Tahun Awal – Tahun Dasar



$$\text{Pt : Penduduk Tahun 2023} \quad \text{P0 : Penduduk Tahun 2015}$$
$$r = \left\{ \left(\frac{49.899.992}{43.195.688} \right)^{(1/9)} - 1 \right\} \times 100 = 1.82$$

Angka LPP tersebut boleh jadi kurang mencerminkan angka sebenarnya, namun itulah fakta yang dapat disajikan berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam *Database* SIAK. Idealnya dilakukan kolaborasi metodologi yang dilakukan oleh BPS dan DUKCAPIL, sehingga dapat saling melengkapi. Sinergitas antara kedua belah pihak sangat perlu dilakukan, sehingga data yang lebih akurat dapat disajikan kepada pemangku kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan (*decision making*), utamanya dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Tabel 3.5 memperlihatkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dalam delapan tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penduduk Provinsi Jawa Barat 9 Tahun Terakhir

NO	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	LPP
1	2015	21.976.271	21.219.417	43.195.688	-
2	2016	22.275.690	21.464.469	43.740.159	1,26
3	2017	22.590.755	21.771.384	44.362.139	1,34
4	2018	22.915.986	22.245.339	45.161.325	1,49
5	2019	23.223.993	22.555.604	45.779.597	1,46
6	2020	23.893.514	23.249.109	47.142.623	1,76
7	2021	24.423.410	23.796.684	48.220.094	1,85
8	2022	24.987.540	24.352.130	49.339.670	1,92
9	2023	25.268.145	24.631.847	49.899.992	1,82

Sumber: *Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami penambahan 6.704.304 jiwa dalam jangka waktu Sembilan tahun. Pertambahan penduduk yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat ini memperlihatkan bahwa:

- Provinsi Jawa Barat mempunyai daya tarik yang besar bagi para pendatang, diantaranya disebabkan oleh banyaknya daerah



industri di Provinsi Jawa Barat, khususnya di daerah penyangga ibu kota.

- b) Provinsi Jawa Barat juga menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa perguruan tinggi yang ternama di Indonesia.

2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Kebutuhan yang berkaitan dengan umur dan jenis kelamin mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Dalam bidang kesehatan, setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia. Sedangkan kelompok penduduk usia lanjut, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Tabel 3.6 memperlihatkan penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.6

Penduduk Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	00-04	1.914.929	3,84	1.795.438	3,60	3.710.367	7,44
2	05-09	2.263.741	4,54	2.119.324	4,25	4.383.065	8,78
3	10-14	2.269.558	4,55	2.129.153	4,27	4.398.711	8,82
4	15-19	1.683.193	3,37	1.629.088	3,26	3.312.281	6,64
5	20-24	2.188.960	4,39	2.085.228	4,18	4.274.188	8,57
6	25-29	2.077.563	4,16	1.957.070	3,92	4.034.633	8,09
7	30-34	1.946.905	3,90	1.870.680	3,75	3.817.585	7,65
8	35-39	1.842.773	3,69	1.805.530	3,62	3.648.303	7,31



NO	UMU R	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
9	40-44	1.955.304	3,92	1.979.578	3,97	3.934.882	7,89
10	45-49	1.725.451	3,46	1.781.409	3,57	3.506.860	7,03
11	50-54	1.593.957	3,19	1.586.328	3,18	3.180.285	6,37
12	55-59	1.237.867	2,48	1.258.721	2,52	2.496.588	5,00
13	60-64	976.618	1,96	983.808	1,97	1.960.426	3,93
14	65-69	692.013	1,39	686.372	1,38	1.378.385	2,76
15	70-74	449.676	0,90	439.443	0,88	889.119	1,78
16	> 75	449.637	0,90	524.677	1,05	974.314	1,95
TOTAL		25.268.145	50,64	24.631.847	49,36	49.899.992	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Provinsi Jawa Barat paling banyak berada di kelompok umur 10-14 tahun yaitu sejumlah 4.398.711 jiwa dan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah kelompok umur 70-74 dengan jumlah 889.119 jiwa.

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 orang penduduk perempuan. RJK berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan rumah sakit bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. RJK dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam suatu daerah. RJK pun dapat melihat perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian suatu daerah dengan RJK yang berbeda akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kebutuhan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian berdasarkan RJK ini, maka penyediaan sarana tergantung kepada berapa banyak rasio jenis kelamin ini.

Tabel berikut memperlihatkan Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 3.7

Rasio Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
3201	BOGOR	2.846.258	2.712.627	5.558.885	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
3202	SUKABUMI	1.416.916	1.373.404	2.790.320	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
3203	CIANJUR	1.298.946	1.236.056	2.535.002	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
3204	BANDUNG	1.907.055	1.842.117	3.749.172	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
3205	GARUT	1.406.452	1.347.497	2.753.949	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
3206	TASIKMALAYA	997.093	961.128	1.958.221	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
3207	CIAMIS	642.917	638.284	1.281.201	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3208	KUNINGAN	624.827	606.945	1.231.772	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
3209	CIREBON	1.236.316	1.201.583	2.437.899	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
3210	MAJALENGKA	681.959	672.844	1.354.803	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3211	SUMEDANG	607.848	597.837	1.205.685	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
3212	INDRAMAYU	973.142	960.806	1.933.948	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3213	SUBANG	817.798	818.435	1.636.233	Dlm 100 Pr ada 100 Lk
3214	PURWAKARTA	525.101	511.667	1.036.768	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
3215	KARAWANG	1.281.826	1.257.555	2.539.381	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
3216	BEKASI	1.614.695	1.582.311	3.197.006	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
3217	BANDUNG BARAT	939.958	907.138	1.847.096	Dlm 100 Pr ada 104 Lk



KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
3218	PANGANDARAN	221.825	220.380	442.205	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3271	KOTA BOGOR	570.333	557.075	1.127.408	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
3272	KOTA SUKABUMI	183.332	181.580	364.912	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3273	KOTA BANDUNG	1.287.427	1.281.680	2.569.107	Dlm 100 Pr ada 100 Lk
3274	KOTA CIREBON	176.706	175.641	352.347	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3275	KOTA BEKASI	1.257.169	1.256.500	2.513.669	Dlm 100 Pr ada 100 Lk
3276	KOTA DEPOK	973.283	968.077	1.941.360	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3277	KOTA CIMAHI	289.159	286.360	575.519	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
3278	KOTA TASIKMALAYA	384.805	373.010	757.815	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
3279	KOTA BANJAR	104.999	103.310	208.309	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
TOTAL		25.268.145	24.631.847	49.899.992	Dlm 100 Pr ada 103 Lk

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Barat sebesar 103, yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 orang penduduk laki-laki. RJK di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 ini tidak berbeda jauh dengan RJK pada tahun 2022. RJK penduduk paling mencolok terdapat di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur sebesar 105, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 104. Dibeberapa daerah tersebut setiap 100 perempuan terdapat 104 sampai 105 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa disemua daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk laki-laki lebih besar apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan.

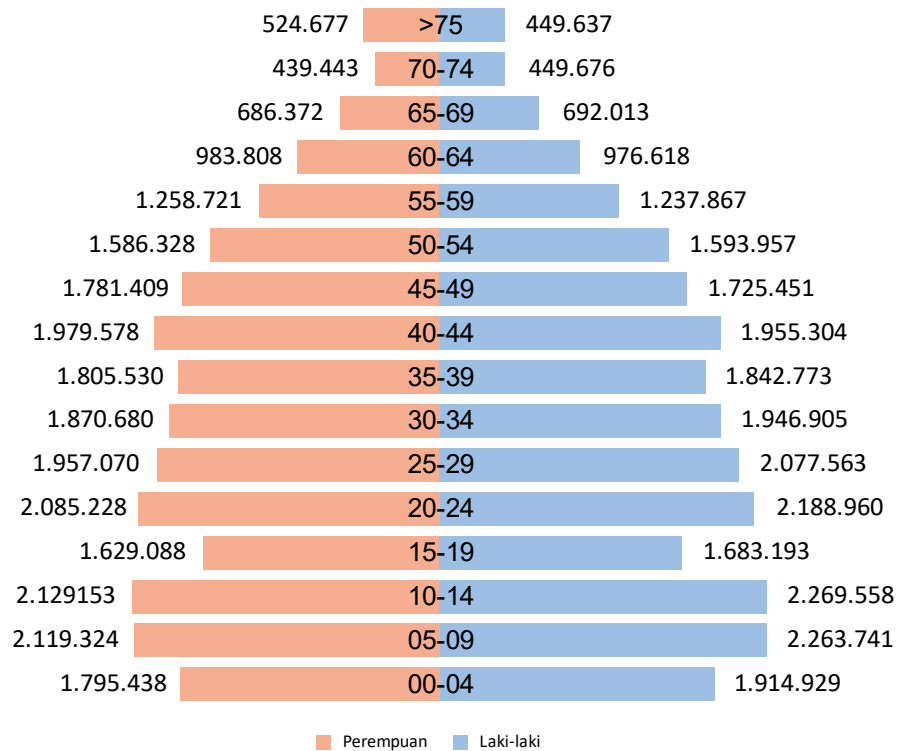
b. Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan dalam bentuk grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida) menunjukkan jumlah penduduk (dalam hal ini diwakili dengan persentase jumlah penduduk), sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur 5 tahunan. Dasar piramida dimulai dengan umur termuda hingga ke puncak kelompok umur tertua. Bagian kiri piramida adalah penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan struktur penduduk muda/*expansive*, dengan struktur penduduk muda lebih besar dibandingkan kelompok usia di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolute tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.



Piramida penduduk Provinsi Jawa Barat juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan piramida yang menunjukkan lebih banyak di kelompok usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun, maka dalam jangka 15 sampai 20 tahun Pemerintah harus mampu merencanakan lapangan pekerjaan bagi penduduk tersebut yang telah menjadi kelompok penduduk yang produktif. Piramida penduduk ini juga dapat digunakan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum. Dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun akan ada banyak pemilih pemula yang harus mendapatkan sosialisasi tentang demokrasi. Gambar 3.3 adalah piramida



Gambar 3.4

Grafik Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Dari bentuk piramida di atas, dapat dipastikan Jawa Barat masih didominasi penduduk usia muda. Khususnya kelompok umur 10-14 tahun menempati urutan pertama yakni 8,82% atau sebanyak 4.398.711 jiwa. Disisi lain kelompok 0-4 tahun mulai berkurang, diduga kecenderungan angka kelahiran mulai menurun, sedangkan kelompok 5-9 tahun lebih banyak dibanding dengan kelompok dibawahnya. Dapat dikatakan angka kematian bayi di Jawa Barat pun memiliki kecenderungan menurun. Namun hal ini perlu didukung dengan data yang lebih akurat, mengingat pelaporan lahir mati masih cenderung rendah. Selain itu yang perlu dicermati adalah kelompok usia sekolah menengah adalah mulai dari usia 10-14 tahun dan 15-19 tahun yang merupakan asset Jawa Barat untuk menjawab tantangan pembangunan 5 sampai dengan 10 tahun kedepan. Perlu persiapan yang komprehensif antara sektor pendidikan dan sector ketenagakerjaan, agar hal tersebut tidak menjadi beban pembangunan dimasa yang akan datang.

c. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah negara tersebut tergolong kedalam negara maju atau negara yang sedang berkembang. Angka DR merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi angka DR menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk pada usia produktif (usia 15 - 64 tahun) yaitu untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum produktif (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas), sedang DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif secara ekonomi. Sebagaimana perhitungan proyeksi ahli demografi bahwa Indonesia akan menikmati



bonus demografi pada Tahun 2020-2030, tidak terkecuali untuk Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.8

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Per Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	USIA MUDA	USIA PRODUKTIF	USIA TUA	DR
3201	BOGOR	1.473.566	3.823.012	262.307	45,41
3202	SUKABUMI	722.869	1.876.096	191.355	48,73
3203	CIANJUR	691.075	1.679.013	164.914	50,98
3204	BANDUNG	963.236	2.562.205	223.731	46,33
3205	GARUT	761.205	1.838.448	154.296	49,80
3206	TASIKMALAYA	455.740	1.309.263	193.218	49,57
3207	CIAMIS	274.671	864.324	142.206	48,23
3208	KUNINGAN	289.817	833.124	108.831	47,85
3209	CIREBON	602.818	1.684.747	150.334	44,70
3210	MAJALENGA	313.215	930.718	110.870	45,57
3211	SUMEDANG	272.140	806.226	127.319	49,55
3212	INDRAMAYU	449.797	1.348.547	135.604	43,41
3213	SUBANG	373.295	1.124.784	138.154	45,47
3214	PURWAKARTA	271.581	705.421	59.766	46,97
3215	KARAWANG	652.649	1.743.380	143.352	45,66
3216	BEKASI	863.384	2.204.272	129.350	45,04
3217	BANDUNG BARAT	479.828	1.245.819	121.449	48,26
3218	PANGANDARAN	93.825	304.700	43.680	45,13
3271	KOTA BOGOR	281.716	783.250	62.442	43,94
3272	KOTA SUKABUMI	91.900	249.106	23.906	46,49
3273	KOTA BANDUNG	595.324	1.786.449	187.334	43,81
3274	KOTA CIREBON	86.310	243.692	22.345	44,59
3275	KOTA BEKASI	599.630	1.777.816	136.223	41,39
3276	KOTA DEPOK	467.820	1.370.847	102.693	41,62
3277	KOTA CIMAHI	132.299	407.906	35.314	41,09
3278	KOTA TASIKMALAYA	184.712	518.931	54.172	46,03
3279	KOTA BANJAR	47.721	143.935	16.653	44,72
TOTAL		12.492.143	34.166.031	3.241.818	46,05

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Tabel diatas menggambarkan komposisi penduduk produktif dan non produktif sebagai dasar perhitungan DR Provinsi Jawa Barat, yang apabila dimasukkan pada formula di bawah ini.

$$DR = \frac{\text{Penduduk Usia Muda} + \text{Penduduk Usia Tua}}{\text{Usia Produktif}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah angka DR Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

$$DR = \frac{12.492.143 + 3.241.031}{34.166.031} \times 100\% = \mathbf{46.05}$$

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia 65 tahun keatas juga dianggap tidak produktif lagi, karena sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 65 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Rasio ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia produktif dan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan Jawa Barat secara umur sebesar 46.05 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung ±46 orang usia non produktif baik anak-anak maupun manula. Angka ini terbilang cukup rendah karena masih di bawah 50. Usia penduduk tua (>65 tahun) secara persentase terhadap jumlah penduduk di Jawa Barat kecil hanya (6,50%).

Angka DR pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar 45,71. Hal ini berarti penduduk produktif semakin kecil menanggung penduduk yang belum produktif atau sudah tidak produktif. Kondisi ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk produktif, sementara itu di sisi lain jumlah penduduk berusia belum produktif semakin berkurang akan tetapi jumlah penduduk yang sudah tidak produktif semakin bertambah. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi angka DR karena penurunan penduduk usia belum produktif lebih tinggi



dibandingkan dengan penambahan penduduk yang sudah tidak produktif.

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki Angka DR tertinggi adalah Kabupaten Cianjur (50,98). Ini berarti di Kabupaten Cianjur ada 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 50 orang penduduk usia non produktif.

3. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Informasi tentang perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya, berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan usia dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan orang tua dalam pengasuhan anak, serta kurang matangnya tingkat emosional pasangan pada saat harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi, cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.9, menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin pada penduduk Provinsi Jawa Barat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 49,61 persen, diikuti dengan status belum kawin 44,09 persen, cerai hidup 2,04 persen, dan cerai mati 4,26 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati lebih rendah dibandingkan perempuan. Sementara, proporsi penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan



perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarganya mempunyai keinginan mapan terlebih dahulu secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Tabel 3.9
Status Perkawinan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM KAWIN	12.204.021	24,46	9.799.009	19,64	22.003.030	44,09
2	KAWIN	12.341.299	24,73	12.412.971	24,88	24.754.270	49,61
3	CERAI HIDUP	344.284	0,69	671.927	1,35	1.016.211	2,04
4	CERAI MATI	378.541	0,76	1.747.940	3,50	2.126.481	4,26
TOTAL		25.268.145	50,64	24.631.847	49,36	49.899.992	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Menarik untuk dicermati bahwa pada status cerai, proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena cerai hidup maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Besarnya persentase penduduk perempuan yang cerai hidup dibandingkan laki-laki, diduga berhubungan dengan kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, hal tersebut seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

Jika status kawin dikaitkan dengan umur, nampak bahwa proporsi tertinggi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 0-24 tahun, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi pada kelompok umur 25-59 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja dan berkeinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Tabel 3.10
Status Perkawinan Berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	00-04	3.710.367	7,44	-	-	-	-	-	-
2	05-09	4.383.065	8,78	-	-	-	-	-	-
3	10-14	4.398.693	8,82	17	0,00	-	-	1	0,00
4	15-19	3.275.671	6,56	36.018	0,07	539	0,00	53	0,00
5	20-24	3.357.624	6,73	899.557	1,80	15.257	0,03	1.750	0,00
6	25-29	1.523.302	3,05	2.441.064	4,89	62.130	0,12	8.137	0,02
7	30-34	598.467	1,20	3.097.375	6,21	102.562	0,21	19.181	0,04
8	35-39	300.066	0,60	3.183.851	6,38	126.126	0,25	38.260	0,08
9	40-44	190.687	0,38	3.504.464	7,02	160.693	0,32	79.038	0,16
10	45-49	111.329	0,22	3.109.832	6,23	153.433	0,31	132.266	0,27
11	50-54	69.311	0,14	2.768.821	5,55	135.123	0,27	207.030	0,41
12	55-59	38.909	0,08	2.083.906	4,18	97.733	0,20	276.040	0,55
13	60-64	21.119	0,04	1.546.816	3,10	68.134	0,14	324.357	0,65



NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		n	%	n	%	n	%	N	%
14	65-69	11.889	0,02	997.293	2,00	42.056	0,08	327.147	0,66
15	70-74	6.385	0,01	582.603	1,17	24.849	0,05	275.282	0,55
16	> 75	6.146	0,01	502.653	1,01	27.576	0,06	437.939	0,88
TOTAL		22.003.030	44,09	24.754.270	49,61	1.016.211	2,04	2.126.481	4,26

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Selanjutnya jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok 25-54 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang berstatus kawin berada pada kelompok umur 30-59 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa laki-laki menunda usia perkawinan biasanya dikarenakan harus mapan secara ekonomi sebelum memasuki jenjang perkawinan.

Tabel 3.11

Status Perkawinan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
00-04	1.914.929	1.795.438	-	-	-	-	-	-
05-09	2.263.741	2.119.324	-	-	-	-	-	-
10-14	2.269.556	2.129.137	2	15	-	-	-	1
15-19	1.679.326	1.596.345	3.830	32.188	35	504	2	51
20-24	1.965.704	1.391.920	220.725	678.832	2.257	13.000	274	1.476



KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
25-29	1.089.635	433.667	969.143	1.471.921	16.729	45.401	2.056	6.081
30-34	467.994	130.473	1.436.851	1.660.524	36.986	65.576	5.074	14.107
35-39	237.395	62.671	1.548.329	1.635.522	47.834	78.292	9.215	29.045
40-44	147.808	42.879	1.732.645	1.771.819	58.588	102.105	16.263	62.775
45-49	80.110	31.219	1.567.652	1.542.180	54.311	99.122	23.378	108.888
50-54	44.898	24.413	1.467.333	1.301.488	47.203	87.920	34.523	172.507
55-59	22.224	16.685	1.138.079	945.827	32.876	64.857	44.688	231.352
60-64	10.959	10.160	890.767	656.049	20.976	47.158	53.916	270.441
65-69	5.435	6.454	616.557	380.736	12.556	29.500	57.465	269.682
70-74	2.477	3.908	389.605	192.998	7.092	17.757	50.502	224.780
>75	1.830	4.316	359.781	142.872	6.841	20.735	81.185	356.754
TOTAL	12.204.021	9.799.009	12.341.299	12.412.971	344.284	671.927	378.541	1.747.940





Menarik untuk diperhatikan adalah mereka yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup tertinggi terdapat di kelompok usia 30-59 tahun, sedangkan proporsi penduduk yang berstatus cerai mati mulai banyak ditemukan di usia 45 tahun keatas.

Tabel 3.10 juga menunjukkan Tahun 2023 adanya penduduk usia 15-19 tahun yang sudah berstatus kawin yang jumlahnya cukup tinggi yakni 36.001 orang dan 32.173 orang di antaranya adalah perempuan. Hal ini memerlukan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan masalah kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan (kesehatan reproduksi) dan pelayanan Keluarga Berencana/KB. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, perlu melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi dan rentannya perkawinan usia dini.

Kondisi lainnya yang cukup menarik untuk dicermati adalah adanya kelompok umur 15-19 tahun ini yang berstatus cerai hidup sebanyak 539 orang, dan berstatus cerai mati sebanyak 53 orang. Penduduk usia 15-19 tahun yang berstatus cerai hidup ini diduga disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan menjadi orang tua, dan kurang matangnya pasangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat berumah tangga, serta seharusnya pasangan-pasangan ini masih duduk dibangku sekolah. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu melakukan edukasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi serta kematangan mental untuk berumah tangga.

a. Angka Perkawinan Kasar

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Usia produktif/usia subur yang berkaitan dengan kelahiran adalah terdapat pada wanita usia 15-49 tahun. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu dan anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk mereproduksi anak, dan



kekurangsiapan secara mental menghadapi masa kehamilan/melahirkan. Demikian pula sebaliknya semakin tua usia saat perkawinan pertama semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Perkawinan juga merupakan salah satu variable antara yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesuburan/fertilitas, antara lain melalui pendek dan panjangnya usia subur yang dilalui Pasangan Usia Subur (PUS) yang menentukan banyaknya kelahiran. Davis dan Blake (1974) mengelompokkan perkawinan sebagai salah satu variabel antara dalam mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas. Dengan demikian perkawinan juga secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Perkawinan merupakan suatu perubahan status, misal perubahan dari status “Belum Kawin” menjadi status “Kawin”. Angka perkawinan kasar adalah persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perhitungan angka ini adalah menggunakan data banyaknya perkawinan yang terjadi pada waktu tertentu termasuk di dalamnya perkawinan pertama dan perkawinan ulang, jadi bukan banyaknya penduduk yang berstatus kawin.

Meskipun perhitungan angka ini masih kasar tetapi dapat menunjukkan kondisi besaran penduduk yang kawin di suatu wilayah. Selain itu, indikator ini masih dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan pelayanan keluarga dan rumah tangga dan lain-lain.



Tabel 3.12

Angka Perkawinan Kasar Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH STATUS KAWIN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	APK
3201	BOGOR	2.664.643	5.495.372	484,89
3202	SUKABUMI	1.422.258	2.773.554	512,79
3203	CIANJUR	1.286.426	2.516.416	511,21
3204	BANDUNG	1.886.932	3.723.179	506,81
3205	GARUT	1.338.843	2.770.532	483,24
3206	TASIKMALAYA	1.010.277	1.947.448	518,77
3207	CIAMIS	667.365	1.272.952	524,27
3208	KUNINGAN	613.714	1.223.209	501,72
3209	CIREBON	1.189.245	2.420.953	491,23
3210	MAJALENGKA	692.783	1.345.378	514,94
3211	SUMEDANG	648.842	1.197.302	541,92
3212	INDRAMAYU	970.159	1.920.505	505,16
3213	SUBANG	875.012	1.624.856	538,52
3214	PURWAKARTA	504.394	1.029.561	489,91
3215	KARAWANG	1.283.939	2.519.882	509,52
3216	BEKASI	1.624.191	3.172.833	511,91
3217	BANDUNG BARAT	942.873	1.834.256	514,04
3218	PANGANDARAN	237.567	440.177	539,71
3271	KOTA BOGOR	515.900	1.122.772	459,49
3272	KOTA SUKABUMI	166.456	361.581	460,36
3273	KOTA BANDUNG	1.217.954	2.555.187	476,66
3274	KOTA CIREBON	154.262	348.912	442,12
3275	KOTA BEKASI	1.202.415	2.496.198	481,70
3276	KOTA DEPOK	907.018	1.927.867	470,48
3277	KOTA CIMAHI	274.468	570.829	480,82
3278	KOTA TASIKMALAYA	357.609	752.546	475,20
3279	KOTA BANJAR	98.725	208.135	474,33
TOTAL		24.754.270	49.572.392	499,36

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Jumlah penduduk pertengahan tahun Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 49.572.392 jiwa, dan jumlah penduduk WNI yang berstatus kawin di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 24.754.270 jiwa dengan demikian angka perkawinan kasar di Provinsi Jawa Barat adalah 499, artinya bahwa dari 1000 penduduk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 terdapat 499 yang berstatus kawin.

b. Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin. Namun disini, pembagiannya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas dimana penduduk bersangkutan lebih beresiko kawin. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena umumnya mereka tidak beresiko kawin. Sehingga angka perkawinan umum menunjukkan informasi yang lebih realitas.

Tabel 3.13

Angka Perkawinan Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH STATUS KAWIN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN USIA >15 TAHUN	APU
3201	BOGOR	2.664.643	4.082.908	652,63
3202	SUKABUMI	1.422.258	2.077.030	684,76
3203	CIANJUR	1.286.426	1.852.455	694,44
3204	BANDUNG	1.886.932	2.793.980	675,36
3205	GARUT	1.338.843	2.036.297	657,49
3206	TASIKMALAYA	1.010.277	1.505.637	671,00
3207	CIAMIS	667.365	1.008.650	661,64
3208	KUNINGAN	613.714	942.604	651,08
3209	CIREBON	1.189.245	1.840.452	646,17
3210	MAJALENGKA	692.783	1.042.608	664,47
3211	SUMEDANG	648.842	935.259	693,76



KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH STATUS KAWIN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN USIA >15 TAHUN	APU
3212	INDRAMAYU	970.159	1.486.714	652,55
3213	SUBANG	875.012	1.265.072	691,67
3214	PURWAKARTA	504.394	768.060	656,71
3215	KARAWANG	1.283.939	1.893.548	678,06
3216	BEKASI	1.624.191	2.350.977	690,86
3217	BANDUNG BARAT	942.873	1.372.187	687,13
3218	PANGANDARAN	237.567	349.713	679,32
3271	KOTA BOGOR	515.900	850.684	606,45
3272	KOTA SUKABUMI	166.456	272.899	609,95
3273	KOTA BANDUNG	1.217.954	1.980.505	614,97
3274	KOTA CIREBON	154.262	265.702	580,58
3275	KOTA BEKASI	1.202.415	1.917.085	627,21
3276	KOTA DEPOK	907.018	1.476.878	614,15
3277	KOTA CIMAHI	274.468	443.679	618,62
3278	KOTA TASIKMALAYA	357.609	574.752	622,20
3279	KOTA BANJAR	98.725	162.062	609,18
TOTAL		24.754.270	37.548.397	659,26

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Jawa Barat pada pertengahan Tahun 2023 sebesar 41.029.553 jiwa dan jumlah penduduk WNI berstatus kawin di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 24.615.043 jiwa. Dengan demikian Angka Perkawinan Umum di Provinsi Jawa Barat adalah 600 jiwa, artinya bahwa dari 1000 penduduk usia 15 tahun lebih di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 terdapat 600 orang penduduk yang berstatus kawin, hal ini menunjukkan gejala bahwa masih adanya perkawinan usia muda. Diharapkan angka perkawinan usia muda semakin menurun, agar kualitas kehidupan yang baik terhadap anak dapat terpenuhi.



c. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (SMAM)

Rata-rata umur kawin pertama atau *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) adalah perkiraan rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Tersedianya indikator ini akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan terutama terhadap penduduk umur muda untuk menunda perkawinan dan agar dapat menyelesaikan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin sedikit pula jumlah anak yang akan dilahirkannya. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek pula masa usia suburnya dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Tabel 3.14

*Persentase Perempuan Lajang Berdasarkan Kelompok Umur
Sebagai Bahan Perhitungan SMAM*

KELOMPOK UMUR	PEREMPUAN LAJANG	PENDUDUK PEREMPUAN	% LAJANG
15-19	1.596.345	1.629.088	97,99
20-24	1.391.920	2.085.228	66,75
25-29	433.667	1.957.070	22,16
30-34	130.473	1.870.680	6,97
35-39	62.671	1.805.530	3,47
40-44	42.879	1.979.578	2,17
45-49	31.219	1.781.409	1,75
JUMLAH PERSENTASE PEREMPUAN LAJANG			201,26
50-54	24.413	1.258.721	1,94

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



1	Diasumsikan Terdapat 100 orang P belum kawin dibawah usia 15 Th (100 X 15 Th)	1500	Tahun
2	Jumlah Prosentase Kelompok Umur 15-49	201,26	Persentase
3	Jumlah Tahun Kelangsungan Hidup Melajang	1006,32	Tahun
4	Jumlah Kelangsungan hidup sebelum umur 50 Th	2506,32	
5	Prosentase umur 45-49 + 50-54/2 (Prosentase Lajang tepat 50 Th)	1,85	Persentase
6	Tahun hidup Melajang sampai tepat 50Th ((hasil poin5) X 50)	92,30	Persentase
7	Jumlah Kelangsunga Hidup Penduduk Kawin s.d umur 50Th	2325,83	Tahun
8	Jumlah Prosentase Pndduk Sintesis Yg Menikah s.d tepat 50Th (100 - (hasil poin5))	98,15	Persentase
9	Disimpulkan Bahwa dari 98,32 % penduduk sintesis yg menikah s.d Tepat berumur 50Th mempunyai 2574,54 Tahun Kelangsungan Hidup Melajang		
10	Angka SMAM	25,53	Tahun
Interpretasi Angka SMAM		25-26	Tahun

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM, akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam mengembangkan program pemberdayaan pemuda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Dari langkah perhitungan SMAM diatas, dihasilkan angka 25,53 yang diinterpretasikan bahwa rata-rata usia kawin pertama di Jawa Barat adalah pada usia 25-26 Tahun.

d. Angka Perceraian Kasar

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh



beberapa hal seperti: kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel 3.15
Angka Perceraian Kasar Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	APK
3201	BOGOR	73.347	5.495.372	13,35
3202	SUKABUMI	64.420	2.773.554	23,23
3203	CIANJUR	49.887	2.516.416	19,82
3204	BANDUNG	64.134	3.723.179	17,23
3205	GARUT	50.832	2.770.532	18,35
3206	TASIKMALAYA	48.827	1.947.448	25,07
3207	CIAMIS	29.244	1.272.952	22,97
3208	KUNINGAN	24.640	1.223.209	20,14
3209	CIREBON	60.848	2.420.953	25,13
3210	MAJALENGKA	41.513	1.345.378	30,86
3211	SUMEDANG	31.331	1.197.302	26,17
3212	INDRAMAYU	54.913	1.920.505	28,59
3213	SUBANG	36.449	1.624.856	22,43
3214	PURWAKARTA	22.842	1.029.561	22,19
3215	KARAWANG	58.530	2.519.882	23,23
3216	BEKASI	36.895	3.172.833	11,63
3217	BANDUNG BARAT	44.746	1.834.256	24,39
3218	PANGANDARAN	11.227	440.177	25,51



Tabel 3.15
Angka Perceraian Kasar Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	APK
3271	KOTA BOGOR	20.483	1.122.772	18,24
3272	KOTA SUKABUMI	9.129	361.581	25,25
3273	KOTA BANDUNG	62.073	2.555.187	24,29
3274	KOTA CIREBON	11.536	348.912	33,06
3275	KOTA BEKASI	32.798	2.496.198	13,14
3276	KOTA DEPOK	31.079	1.927.867	16,12
3277	KOTA CIMAH	14.150	570.829	24,79
3278	KOTA TASIKMALAYA	21.728	752.546	28,87
3279	KOTA BANJAR	8.610	208.135	41,37
TOTAL		1.016.211	49.572.392	20,50

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Jumlah penduduk pertengahan tahun Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 49.572.392 jiwa dan jumlah penduduk WNI yang berstatus cerai hidup di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 1.016.211 jiwa. Dengan demikian Angka Perceraian Kasar di Provinsi Jawa Barat adalah 20,50, artinya bahwa dari 1000 penduduk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 terdapat 20 sampai 21 penduduk yang berstatus cerai hidup.

e. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas atau penduduk yang terkena resiko perceraian atau disebut juga penduduk berumur *divorceable* pada suatu tahun tertentu.

Tabel 3.16

Angka Perceraian Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	APU
3201	BOGOR	73.347	4.082.908	17,96
3202	SUKABUMI	64.420	2.077.030	31,02
3203	CIANJUR	49.887	1.852.455	26,93
3204	BANDUNG	64.134	2.793.980	22,95
3205	GARUT	50.832	2.036.297	24,96
3206	TASIKMALAYA	48.827	1.505.637	32,43
3207	CIAMIS	29.244	1.008.650	28,99
3208	KUNINGAN	24.640	942.604	26,14
3209	CIREBON	60.848	1.840.452	33,06
3210	MAJALENGKA	41.513	1.042.608	39,82
3211	SUMEDANG	31.331	935.259	33,50
3212	INDRAMAYU	54.913	1.486.714	36,94
3213	SUBANG	36.449	1.265.072	28,81
3214	PURWAKARTA	22.842	768.060	29,74
3215	KARAWANG	58.530	1.893.548	30,91
3216	BEKASI	36.895	2.350.977	15,69



KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	APU
3217	BANDUNG BARAT	44.746	1.372.187	32,61
3218	PANGANDARAN	11.227	349.713	32,10
3271	KOTA BOGOR	20.483	850.684	24,08
3272	KOTA SUKABUMI	9.129	272.899	33,45
3273	KOTA BANDUNG	62.073	1.980.505	31,34
3274	KOTA CIREBON	11.536	265.702	43,42
3275	KOTA BEKASI	32.798	1.917.085	17,11
3276	KOTA DEPOK	31.079	1.476.878	21,04
3277	KOTA CIMAHI	14.150	443.679	31,89
3278	KOTA TASIKMALAYA	21.728	574.752	37,80
3279	KOTA BANJAR	8.610	162.062	53,13
TOTAL		1.016.211	37.548.397	27,06

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 37.548.397 jiwa dan jumlah penduduk WNI berstatus cerai hidup di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 1.016.211 jiwa. Dengan demikian Angka Perceraian Umum di Provinsi Jawa Barat adalah 27,06, artinya bahwa dari 1.000 penduduk Provinsi Jawa Barat usia 15 tahun keatas pada Tahun 2023 terdapat 27 orang penduduk yang berstatus cerai hidup.

4. Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.



a. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terkait dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, Keluarga Berencana dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).

Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Jumlah keluarga di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.865.592. Rata-rata jumlah anggota keluarga di Jawa Barat sebanyak 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Jawa Barat lebih banyak merupakan keluarga inti, begitu pula apabila kita perhatikan di setiap Kabupaten/Kota.

Besarnya jumlah keluarga juga menginformasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk disuatu daerah juga tinggi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam jangka waktu tertentu penduduk tersebut memerlukan berbagai sarana dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sarana kesehatan, sarana pendidikan, sampai penyediaan lapangan pekerjaan akan semakin banyak.

Banyaknya anggota keluarga juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi bonus demografi bagi kemajuan suatu daerah. Akan tetapi bonus demografi juga akan menjadi bumerang bagi daerah tertentu. Pesatnya pertumbuhan penduduk jika dibarengi dengan perencanaan pembangunan yang mengacu pada peningkatan kualitas penduduk tentunya menjadi bonus demografi. Akan tetapi jika pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut tidak diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang baik, justru bonus demografi tersebut menjadi hal yang tidak menguntungkan. Akan muncul tingkat ketergantungan penduduk khususnya penduduk usia produktif sehingga



menjadi beban bagi pemerintah. Tabel berikut memperlihatkan rata-rata anggota keluarga sebagai berikut:

Tabel 3.17

Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA		RAK
			N	%	
3201	BOGOR	5.558.885	1.762.656	31,71	3,15
3202	SUKABUMI	2.790.320	970.707	34,79	2,87
3203	CIANJUR	2.535.002	883.223	34,84	2,87
3204	BANDUNG	3.749.172	1.241.546	33,12	3,02
3205	GARUT	2.753.949	907.609	32,96	3,03
3206	TASIKMALAYA	1.958.221	720.051	36,77	2,72
3207	CIAMIS	1.281.201	461.507	36,02	2,78
3208	KUNINGAN	1.231.772	418.708	33,99	2,94
3209	CIREBON	2.437.899	830.506	34,07	2,94
3210	MAJALENGKA	1.354.803	487.611	35,99	2,78
3211	SUMEDANG	1.205.685	440.672	36,55	2,74
3212	INDRAMAYU	1.933.948	705.051	36,46	2,74
3213	SUBANG	1.636.233	620.016	37,89	2,64
3214	PURWAKARTA	1.036.768	348.598	33,62	2,97
3215	KARAWANG	2.539.381	887.495	34,95	2,86
3216	BEKASI	3.197.006	1.021.433	31,95	3,13
3217	BANDUNG BARAT	1.847.096	632.576	34,25	2,92
3218	PANGANDARAN	442.205	162.383	36,72	2,72
3271	KOTA BOGOR	1.127.408	358.779	31,82	3,14
3272	KOTA SUKABUMI	364.912	119.296	32,69	3,06
3273	KOTA BANDUNG	2.569.107	839.742	32,69	3,06
3274	KOTA CIREBON	352.347	115.372	32,74	3,05
3275	KOTA BEKASI	2.513.669	799.108	31,79	3,15
3276	KOTA DEPOK	1.941.360	617.427	31,80	3,14
3277	KOTA CIMAHI	575.519	187.858	32,64	3,06
3278	KOTA TASIKMALAYA	757.815	252.444	33,31	3,00
3279	KOTA BANJAR	208.309	73.218	35,15	2,85
TOTAL		49.899.992	16.865.592	33,80	2,96

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Informasi mengenai jumlah rata-rata anggota keluarga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) atau dapat pula digunakan dalam menyusun perencanaan dibidang permukiman dan tata ruang di Kabupaten/Kota ataupun Provinsi, diantaranya untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, membangun fasilitas dan layanan umum yang seharusnya tersedia seperti rumah sakit, taman bermain atau tempat rekreasi, dan lain-lain.

b. Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua. Termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama, seperti asisten rumah tangga.

Tabel 3.18

Hubungan dengan Kepala Keluarga

NO	STATUS HUBUNGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPALA KELUARGA	13.420.130	3.445.462	16.865.592
2	SUAMI	417	-	417
3	ISTRI	-	11.366.277	11.366.277
4	ANAK	11.463.671	9.406.617	20.870.288
5	MENANTU	1.023	1.320	2.343
6	CUCU	143.686	108.713	252.399
7	ORANG TUA	10.248	76.869	87.117
8	MERTUA	5.583	35.437	41.020
9	FAMILI LAINNYA	193.892	155.763	349.655
10	PEMBANTU	300	1.034	1.334
11	LAINNYA	29.195	34.355	63.550
TOTAL		25.268.145	24.631.847	49.899.992

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



c. Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Data kepala keluarga berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin diperlukan dalam melihat komposisi keluarga dalam kelompok usia produktif (15-64 Tahun) atau keluarga dengan kepala keluarga dengan usia tua (manula). Kelompok umur dengan jumlah kepala keluarga tertinggi ada di rentang usia 40-44 dengan jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.841.402 orang dan kepala keluarga perempuan sebanyak 285.566 orang dengan total sebanyak 2.126.968. Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa ada kepala keluarga berada pada kelompok usia yang masih muda yaitu dibawah usia 20 tahun. kelompok yang menjadi kepala keluarga dengan usia dibawah 20 tahun yaitu usia 15-19 tahun. Laki-laki yang menjadi kepala keluarga usia di bawah 20 tahun berjumlah 16.516 orang dan kepala keluarga Perempuan berjumlah 14.873 dengan total kepala keluarga berusia dibawah 20 tahun sejumlah 31.389 .

Tabel 3.19
Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	15-19	16.516	14.873	31.389
2	20-24	299.541	77.579	377.120
3	25-29	1.074.433	136.409	1.210.842
4	30-34	1.541.227	174.853	1.716.080
5	35-39	1.650.151	208.430	1.858.581
6	40-44	1.841.402	285.566	2.126.968
7	45-49	1.668.627	329.084	1.997.711
8	50-54	1.565.350	377.580	1.942.930
9	55-59	1.224.413	398.310	1.622.723
10	60-64	969.021	404.704	1.373.725
11	65-69	686.171	361.622	1.047.793
12	70-74	444.624	279.850	724.474
13	> 75	438.654	396.602	835.256
TOTAL		13.420.130	3.445.462	16.865.592

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Meningkatnya kepala keluarga yang berusia di bawah 20 tahun dapat disebabkan karena beberapa hal:

1. Orang tua dari anak-anak tersebut sudah tidak ada, baik itu karena kedua orang tuanya meninggal dunia atau berada ditempat lain dikarenakan sudah berpisah.
2. Kedua orang tua tidak diketahui keberadaannya, sementara tidak ada orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini menjadikan anak yang paling tua yang berjenis kelamin laki-laki dijadikan kepala keluarga.
3. Kedua orang tua tidak berada dekat dengan anak-anak tetapi masih ada anggota keluarga dekat tetapi sudah tidak satu rumah atau dapur. Hal ini mengakibatkan anak-anak mempunyai dapur sendiri dan membentuk keluarga yang terpisah dengan keluarga besarnya.
4. Ada sebagian kecil anak laki-laki yang masih dibawah umur tetapi sudah melangsungkan pernikahan sehingga membentuk keluarga sendiri.
5. Anak tersebut merantau dan berpisah dengan keluarga dan membentuk keluarga sendiri.

d. Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Taber 3.20
Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	1.418.681	8,41	343.975	2,04	1.762.656	10,45
3202	SUKABUMI	764.688	4,53	206.019	1,22	970.707	5,76
3203	CIANJUR	698.040	4,14	185.183	1,10	883.223	5,24
3204	BANDUNG	1.011.008	5,99	230.538	1,37	1.241.546	7,36
3205	GARUT	723.071	4,29	184.538	1,09	907.609	5,38
3206	TASIKMALAYA	557.865	3,31	162.186	0,96	720.051	4,27
3207	CIAMIS	359.624	2,13	101.883	0,60	461.507	2,74
3208	KUNINGAN	333.320	1,98	85.388	0,51	418.708	2,48
3209	CIREBON	657.579	3,90	172.927	1,03	830.506	4,92
3210	MAJALENGKA	383.157	2,27	104.454	0,62	487.611	2,89
3211	SUMEDANG	351.483	2,08	89.189	0,53	440.672	2,61
3212	INDRAMAYU	541.361	3,21	163.690	0,97	705.051	4,18
3213	SUBANG	474.722	2,81	145.294	0,86	620.016	3,68
3214	PURWAKARTA	276.335	1,64	72.263	0,43	348.598	2,07
3215	KARAWANG	706.425	4,19	181.070	1,07	887.495	5,26
3216	BEKASI	850.976	5,05	170.457	1,01	1.021.433	6,06
3217	BANDUNG BARAT	510.232	3,03	122.344	0,73	632.576	3,75

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3218	PANGANDARAN	128.459	0,76	33.924	0,20	162.383	0,96
3271	KOTA BOGOR	284.149	1,68	74.630	0,44	358.779	2,13
3272	KOTA SUKABUMI	91.583	0,54	27.713	0,16	119.296	0,71
3273	KOTA BANDUNG	664.468	3,94	175.274	1,04	839.742	4,98
3274	KOTA CIREBON	88.183	0,52	27.189	0,16	115.372	0,68
3275	KOTA BEKASI	641.901	3,81	157.207	0,93	799.108	4,74
3276	KOTA DEPOK	494.781	2,93	122.646	0,73	617.427	3,66
3277	KOTA CIMAHI	151.015	0,90	36.843	0,22	187.858	1,11
3278	KOTA TASIKMALAYA	200.162	1,19	52.282	0,31	252.444	1,50
3279	KOTA BANJAR	56.862	0,34	16.356	0,10	73.218	0,43
TOTAL		13.420.130	79,57	3.445.462	20,43	16.865.592	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Masih adanya kepala keluarga perempuan dalam jumlah yang cukup banyak menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada keluarga yang harus dikepalai oleh perempuan, hal ini dikarenakan:

- a) Keluarga tersebut terpisah dari laki-laki yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Perpisahan ini dapat terjadi karena mempunyai tempat tinggal yang jauh sehingga membentuk keluarga sendiri-sendiri. Perpisahan tersebut juga dapat terjadi karena perceraian baik itu pisah cerai hidup maupun cerai mati sehingga perempuan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga.
- b) Di Provinsi Jawa Barat sebagai tujuan dari para pendatang memungkinkan seorang perempuan merantau sendiri baik itu sebagai tenaga kerja maupun untuk melanjutkan pendidikan mempunyai keluarga sendiri. Dengan demikian, seorang perempuan yang merantau menjadi kepala keluarga. Jika dalam kumpulan para pendatang tidak ada laki-laki, maka perempuan akan mengambil alih sebagai kepala keluarga.

Kondisi-kondisi tersebut sangat memungkinkan seorang perempuan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Selain itu secara tidak nyata tentunya masih banyak keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Di Provinsi Jawa Barat masih ada daerah yang menjadi daerah tempat tenaga kerja untuk mencari pekerjaan keluar daerah bahkan keluar negeri. Berkerja diluar daerah atau luar negeri tentunya akan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Dengan kondisi demikian peran kepala keluarga diambil alih oleh perempuan.

e. Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Infomasi tentang karakteristik kepala keluarga merupakan informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Tabel di bawah menunjukkan jumlah dan proporsi kepala keluarga menurut status kawin. Umumnya kepala keluarga di



Provinsi Jawa Barat berstatus kawin yakni 78,65% proporsi kepala keluarga laki-laki berstatus kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga perempuan, masing-masing 72,91% (laki-laki) dan 5,73% (perempuan). Di samping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 3,80%. Proporsi kepala keluarga laki-laki lebih tinggi yaitu 2,60% dari kepala keluarga perempuan yang hanya 1,20%. Komposisi Kepala Keluarga dengan status Kawin didominasi laki-laki 72,91% Sedangkan kepala keluarga dengan status cerai didominasi perempuan masing-masing 3,75% untuk Cerai Hidup dan 9,75% untuk Cerai Mati. Hal ini sangat wajar karena akibat perceraian otomatis sang istri akan menjadi kepala keluarga jika terjadi pisah Kartu Keluarga.

Tabel 3.21

Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM KAWIN	438.807	2,60	201.945	1,20	640.752	3,80
2	KAWIN	12.297.136	72,91	966.869	5,73	13.264.005	78,65
3	CERAI HIDUP	320.239	1,90	632.241	3,75	952.480	5,65
4	CERAI MATI	363.948	2,16	1.644.407	9,75	2.008.355	11,91
TOTAL		13.420.130	79,57	3.445.462	20,43	16.865.592	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Secara lebih rinci pada tabel di bawah ini dapat dilihat kondisi Kepala Keluarga dan status kawin berdasarkan Kabupaten / Kota

Tabel 3.22
Kondisi Kepala Keluarga dan Status Kawin

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
3201	BOGOR	52.677	27.343	80.020	1.313.388	113.511	1.426.899	20.793	47.425
3202	SUKABUMI	22.419	8.088	30.507	708.171	68.918	777.089	18.320	41.676
3203	CIANJUR	22.579	8.661	31.240	649.725	66.854	716.579	12.575	33.779
3204	BANDUNG	26.846	11.359	38.205	940.220	71.389	1.011.609	18.829	41.041
3205	GARUT	23.317	9.391	32.708	665.023	54.587	719.610	16.183	32.179
3206	TASIKMALAYA	13.486	4.685	18.171	510.523	38.933	549.456	15.853	30.188
3207	CIAMIS	7.127	2.703	9.830	331.523	21.119	352.642	10.419	17.299
3208	KUNINGAN	8.425	2.620	11.045	305.035	19.076	324.111	8.608	13.840
3209	CIREBON	18.311	9.051	27.362	594.566	31.726	626.292	21.121	37.888
3210	MAJALENGKA	9.468	3.621	13.089	346.626	21.588	368.214	14.558	25.046
3211	SUMEDANG	6.452	2.297	8.749	323.926	22.230	346.156	10.498	18.873
3212	INDRAMAYU	18.249	8.564	26.813	480.812	44.358	525.170	19.181	32.923
3213	SUBANG	17.025	8.120	25.145	433.063	52.169	485.232	10.156	24.355
3214	PURWAKARTA	9.217	3.637	12.854	250.555	18.598	269.153	7.830	13.247
3215	KARAWANG	25.130	10.955	36.085	641.018	45.032	686.050	17.203	37.794
3216	BEKASI	28.607	14.459	43.066	800.699	67.802	868.501	9.357	24.207
3217	BANDUNG BARAT	13.448	5.044	18.492	471.066	33.452	504.518	12.994	29.439



KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
3218	PANGANDARAN	2.263	897	3.160	118.183	7.169	125.352	3.811	6.822
3271	KOTA BOGOR	14.632	6.350	20.982	255.561	17.722	273.283	5.583	13.427
3272	KOTA SUKABUMI	3.325	1.577	4.902	82.249	7.137	89.386	2.910	5.377
3273	KOTA BANDUNG	25.972	14.602	40.574	599.802	40.976	640.778	22.420	34.487
3274	KOTA CIREBON	3.742	2.398	6.140	76.166	3.887	80.053	4.486	6.483
3275	KOTA BEKASI	31.175	18.689	49.864	588.316	52.737	641.053	9.813	20.000
3276	KOTA DEPOK	21.754	11.252	33.006	446.205	30.060	476.265	10.299	18.451
3277	KOTA CIMAHI	5.612	2.797	8.409	136.599	6.948	143.547	4.668	8.534
3278	KOTA TASIKMALAYA	5.892	2.205	8.097	179.102	7.218	186.320	8.118	12.749
3279	KOTA BANJAR	1.657	580	2.237	49.014	1.673	50.687	3.653	4.712
TOTAL		438.807	201.945	640.752	12.297.136	966.869	13.264.005	320.239	632.241

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





f. Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkandengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia dapat digunakan untuk menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula kesejahteraan dari orang yang bersangkutan maupun anggota keluarganya.

Tabel di bawah menyajikan jumlah dan persentase kepala keluarga menurut pendidikan yang ditamatkan. Dari tabel tersebut tampak komposisi yang paling tinggi untuk pendidikan akhir yang dicapai kepala keluarga adalah Tamat SD/ sederajat dengan angka 40,44% dari seluruh kepala keluarga yang ada di Jawa Barat. Urutan kedua adalah SLTA/ Sederajat dengan angka 29,17% dan ketiga adalah SLTP/ Sederajat dengan angka 16,91%.

Tabel 3.23
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	Tidak/Belum Sekolah	243.059	1,44	166.363	0,99	409.422	2,43
2	Belum Tamat SD/Sederajat	175.507	1,04	107.323	0,64	282.830	1,68
3	Tamat SD/Sederajat	5.009.147	29,70	1.810.642	10,74	6.819.789	40,44
4	SLTP/Sederajat	2.346.003	13,91	506.525	3,00	2.852.528	16,91
5	SLTA/Sederajat	4.274.459	25,34	644.714	3,82	4.919.173	29,17
6	Diploma I/II	63.726	0,38	18.376	0,11	82.102	0,49
7	Akademi/Dipl.III/S. Muda	271.381	1,61	54.539	0,32	325.920	1,93
8	Diploma IV/Strata I	931.606	5,52	125.009	0,74	1.056.615	6,26
9	Strata-II	95.559	0,57	10.775	0,06	106.334	0,63
10	Strata-III	9.683	0,06	1.196	0,01	10.879	0,06
TOTAL		13.420.130	79,57	3.445.462	20,43	16.865.592	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Jika dilihat dari jumlah kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah (Tamat SD ke bawah), maka jumlahnya 7.512.041 orang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 7.469.020 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bagi keluarga di provinsi Jawa Barat masih sangat rendah namun ada peningkatan karena dipengaruhi perubahan struktur umur. Masih adanya kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah dikarenakan:

- 1) Kepala keluarga tersebut memang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan usia kepala keluarga tersebut telah berusia tua.
- 2) Kepala keluarga tersebut masih belum menyelesaikan pendidikan akan tetapi karena faktor tertentu mengharuskan penduduk tersebut menjadi kepala keluarga.
- 3) Kepala keluarga tersebut tinggal sendiri karena sedang melanjutkan pendidikannya.

g. Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Infomasi tentang karakteristik kepala keluarga merupakan informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Tabel di bawah menunjukkan jumlah dan proporsi kepala keluarga menurut kelompok pekerjaan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat mempunyai pekerjaan yang beragam. Akan tetapi pekerjaan penduduk Provinsi Jawa Barat paling banyak adalah wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Barat sangat dimungkinkan dibuka oleh pihak swasta. Kondisi ini berkaitan dengan letak strategis dari Provinsi Jawa Barat yang menjadipenyangga ibukota Negara, serta sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia yang menjadi daya Tarik bagi penduduk dari daerah lain untuk mengadu nasib. Banyaknya industri yang berdiri di Provinsi Jawa Barat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat perumahan menjadi potensi bagi para penduduk untuk membuka usaha sehingga memunculkan wiraswasta di daerah-daerah tersebut.

Tabel 3.24
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

NO	KELOMPOK KERJA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	170.273	1,01	115.681	0,69	285.954	1,70
2	APARATUR/PEJABAT NEGARA	486.657	2,89	49.614	0,29	536.271	3,18
3	TENAGA PENGAJAR	106.929	0,63	23.091	0,14	130.020	0,77
4	WIRASWASTA	10.974.989	65,07	463.162	2,75	11.438.151	67,82
5	PERTANIAN/PETERNAKAN	1.297.712	7,69	129.058	0,77	1.426.770	8,46
6	NELAYAN	63.658	0,38	191	0,00	63.849	0,38
7	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	14.939	0,09	595	0,00	15.534	0,09
8	PELAJAR/MAHASISWA	92.077	0,55	55.368	0,33	147.445	0,87
9	TENAGA KESEHATAN	19.313	0,11	6.392	0,04	25.705	0,15
10	PENSIUNAN	186.130	1,10	52.806	0,31	238.936	1,42
11	LAINNYA	7.453	0,04	2.549.504	15,12	2.556.957	15,16
TOTAL		13.420.130	79,57	3.445.462	20,43	16.865.592	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



5. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Pendudukan Menurut Pendidikan

Salah satu indikator kualitas dari penduduk adalah pendidikan yang telah ditempuh. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang dekat dengan ibukota Negara serta menjadi pusat pendidikan di Indonesia ternyata mempunyai penduduk dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Tabel dibawah ini memperlihatkan tingkat pendidikan penduduk Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.25
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	Tidak/Belum Sekolah	5.385.834	10,79	5.122.711	10,27	10.508.545	21,06
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	2.443.810	4,90	2.291.994	4,59	4.735.804	9,49
3	Tamat Sd/Sederajat	6.223.757	12,47	6.898.949	13,83	13.122.706	26,30
4	Sltp/Sederajat	3.706.675	7,43	3.786.657	7,59	7.493.332	15,02
5	Slta/Sederajat	5.980.608	11,99	4.972.745	9,97	10.953.353	21,95
6	Diploma I/II	70.417	0,14	93.945	0,19	164.362	0,33
7	Akademi/Dipl.III/S. Muda	300.586	0,60	379.770	0,76	680.356	1,36

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
8	Diploma IV/Strata I	1.046.692	2,10	1.017.358	2,04	2.064.050	4,14
9	Strata-II	99.814	0,20	63.017	0,13	162.831	0,33
10	Strata-III	9.952	0,02	4.701	0,01	14.653	0,03
TOTAL		25.268.145	50,64	24.631.847	49,36	49.899.992	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Jika diperhatikan menurut pendidikan akhir sesuai dengan data hasil registrasi kependudukan, tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan masih tergolong berpendidikan rendah. Hal ini terlihat pada data pendidikan bahwa setingkat SMP/ sederajat ke bawah sebesar 71,86%. Sementara penduduk dengan pendidikan akhir SMA/ sederajat sebesar 21,95%. Sisanya penduduk yang berpendidikan tinggi sebesar 6,18%. Tingkat pendidikan penduduk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 ini mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan data Tahun 2022. Pada Tahun 2022 penduduk Provinsi Jawa Barat yang berpendidikan dibawah SMP sebanyak 72,50%, pendidikan SMA 21,47% dan sisanya berpendidikan tinggi 6,03 % (Diploma ke atas).

Meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan tidak dengan serta merta meningkatkan tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan data pada Tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebesar 26,30 yang artinya lebih baik karena komposisi di Tahun 2022 sebesar 26,69%. Kualitas SDM sudah semestinya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, karena jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang mumpuni maka akan berdampak buruk. Apalagi sekarang ini kita telah masuk masa persaingan bukan hanya dengan sesama saudara sebangsa namun juga dengan SDM asing. Persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja semakin ketat, peningkatan pendidikan perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.



b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, masyarakat Indonesia diharuskan memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Memeluk agama dan kepercayaan dari penduduk dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, dengan demikian setiap penduduk Indonesia dibebaskan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Untuk menjamin kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah, tentunya harus ditunjang dengan sarana peribadatan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Selain itu informasi penduduk berdasarkan agama juga dapat digunakan untuk melihat potensi kerukunan kehidupan beragama dalam suatu daerah. Jika penduduk yang memeluk agama dalam suatu daerah relatif berimbang maka pada umumnya akan terjadi toleransi, akan tetapi jika ada dominasi pemeluk suatu agama maka sangat berpotensi rawan terjadinya konflik. Dengan adanya data jumlah penduduk berdasarkan agama maka dapat dibuat perencanaan pembangunan kerukunan beragama, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik agama.

Tabel dibawah ini memperlihatkan data penduduk berdasarkan agama yang dipeluk berdasarkan Kabupaten/Kota:

*Tabel 3.26
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota*

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU	LAINNYA
3201	BOGOR	5.404.285	30.665	95.706	2.540	17.136	8.478	75
3202	SUKABUMI	2.781.527	1.853	6.118	57	743	12	10
3203	CIANJUR	2.519.650	2.715	10.585	127	1.907	14	4
3204	BANDUNG	3.675.094	17.870	51.754	573	3.271	95	515
3205	GARUT	2.748.061	1.137	4.123	31	298	8	291
3206	TASIKMALAYA	1.957.450	282	402	9	10	2	66
3207	CIAMIS	1.279.043	432	1.444	8	42	120	112
3208	KUNINGAN	1.223.029	5.614	2.506	9	144	23	447
3209	CIREBON	2.427.129	2.737	7.428	72	495	12	26
3210	MAJALENGKA	1.350.010	631	3.975	36	118	0	33
3211	SUMEDANG	1.200.123	645	4.650	26	215	17	9
3212	INDRAMAYU	1.927.903	1.278	4.291	72	339	25	40
3213	SUBANG	1.626.659	1.809	7.233	35	455	13	29
3214	PURWAKARTA	1.025.695	2.212	8.196	151	502	12	0
3215	KARAWANG	2.489.386	8.483	35.040	464	5.765	190	53
3216	BEKASI	3.042.719	29.365	108.485	1.881	14.186	223	147

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU	LAINNYA
3217	BANDUNG BARAT	1.817.590	6.665	21.363	354	624	28	472
3218	PANGANDARAN	441.793	61	333	0	17	1	0
3271	KOTA BOGOR	1.053.292	21.940	42.832	1.236	7.690	399	19
3272	KOTA SUKABUMI	351.900	3.168	7.314	37	2.482	2	9
3273	KOTA BANDUNG	2.371.057	54.229	130.928	1.621	10.940	170	162
3274	KOTA CIREBON	329.490	6.399	14.220	105	2.072	57	4
3275	KOTA BEKASI	2.232.133	64.315	190.528	4.077	21.966	128	522
3276	KOTA DEPOK	1.809.829	28.964	92.069	3.232	5.230	2.003	33
3277	KOTA CIMAH	543.114	8.004	22.770	572	870	14	175
3278	KOTA TASIKMALAYA	747.123	1.869	7.988	20	693	116	6
3279	KOTA BANJAR	206.312	291	1.569	11	22	88	16
TOTAL		48.581.396	303.633	883.850	17.356	98.232	12.250	3.275

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat disetiap Kabupaten/Kota didominasi oleh pemeluk Agama Islam. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Provinsi Jawa Barat adalah salah satu pusat perkembangan Agama Islam di Indonesia. Dengan demikian pada Daerah Kabupaten/Kota yang tidak terlalu mendapatkan pengaruh dari penduduk pendatang, cenderung memeluk Agama Islam. Kondisi ini berbeda dengan daerah yang menjadi pusat perkembangan di Provinsi Jawa Barat seperti daerah penyangga ibukota dan daerah Bandung Raya. Perkembangan agama selain Agama Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan:

- a. Semakin banyaknya para pendatang kedaerah penyangga ibu kota dan Daerah Bandung Raya yang memeluk agama diluar Agama Islam.
- b. Perkembangan agama selain Agama Islam didaerah penyangga ibu kota dan Bandung Raya lebih terbuka sehingga penduduk lebih mempunyai kebebasan untuk memeluk agama lainnya.
- c. Sikap toleransi penduduk didaerah penyangga ibu kota dan daerah Bandung Raya lebih tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk didaerah tersebut lebih sering berinterkasi sehingga lebih saling memahami.

Disamping dominannya Agama Islam yang dianut oleh penduduk Provinsi Jawa Barat serta perkembangan agama selain Agama Islam didaerah penyangga ibu kota dan Bandung Raya, ada pula daerah-daerah yang menjadi pusat perkembangan agama lainnya. Daerah-daerah perkebunan yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, sebagian penduduknya memeluk Agama Kristen Katolik atau Protestan. Hal ini dikarenakan penjajah Belanda selain menguasai sumber daya alam juga memiliki misi menyebarkan Agama Kristen didaerah yang dikuasainya dengan semboyan *Glory, Gold, dan Gospel*-nya. Selain itu juga banyak juga penjajah Belanda yang menikah dengan kaum pribumi, dan memeluk agama selain Islam. Dengan demikian ada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang jauh dari perkembangan perekonomian, dengan penduduk pemeluk agama selain Islam dengan jumlah yang cukup tinggi.



Selain karena penjajahan Belanda, ada sebagian kecil didaerah diluar penyangga ibu kota dan Bandung Raya yang penduduknya memeluk agama selain Islam khususnya Agama Hindu. Kondisi ini terjadi karena menurut sejarah, daerah tersebut merupakan tempat menetapnya pasukan Majapahit setelah melakukan penyerangan ke Batavia. Pasukan Majapahit yang menyerang Batavia tidak kembali ke Majapahit tetapi menetap di tanah Sunda atau wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, mereka berbaur dan membentuk komunitas dengan memeluk agama yang dibawanya.

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah secara keseluruhan pemeluk agama berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.27
Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	ISLAM	24.616.906	49,33	23.964.490	48,03	48.581.396	97,36
2	KRISTEN	148.419	0,30	155.214	0,31	303.633	0,61
3	KATHOLIK	436.591	0,87	447.259	0,90	883.850	1,77
4	HINDU	9.068	0,02	8.288	0,02	17.356	0,03
5	BUDHA	49.204	0,10	49.028	0,10	98.232	0,20
6	KONGHUCHU	6.219	0,01	6.031	0,01	12.250	0,02
7	KEPERCAYAAN	1.738	0,00	1.537	0,00	3.275	0,01
TOTAL		25.268.145	50,64	24.631.847	49,36	49.899.992	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa setiap penduduk pada umumnya memeluk agama yang sama dengan anggota dalam satu keluarganya. Bagi penduduk Provinsi Jawa Barat, agama adalah suatu nilai yang sangat sakral. Pernikahan beda agama sangat jarang terjadi di penduduk Jawa Barat. Hal ini terjadi karena telah tertanam nilai-nilai untuk memudahkan pendidikan agama bagi anak-anaknya dikemudian hari. Kondisi tersebut yang menyebabkan perkawinan dalam penduduk di Provinsi Jawa Barat relatif dilakukan dalam satu agama. Dengan demikian komposisi pemeluk agama di Provinsi Jawa Barat relatif sama dengan jumlah keluarga dan anggota keluarga.

c. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Setiap manusia berkeinginan untuk dilahirkan dalam kondisi normal. Kenormalan ini berkaitan dengan berbagai kemudahan yang dapat dilakukan dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua manusia lahir dalam kondisi normal. Ada berbagai hambatan yang berupa disabilitas yang menghambat manusia untuk menjalankan kehidupannya. Data mengenai disabilitas yang dihadapi oleh penduduk sangat diperlukan. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang disabilitas dan jenis kedisabilitasannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Selama ini kelompok penyandang disabilitas merasa didiskriminasikan, karena di berbagai tempat umum tidak tersedia jalan khusus untuk penggunaan kursi roda, toilet khusus untuk mereka dan lain sebagainya.

Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk disabilitas berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.28

Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

NO	DISABILITAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	FISIK	9.087	13,58	7.455	11,14	16.542	24,72
2	NETRA	1.272	1,90	1.029	1,54	2.301	3,44
3	RUNGU	3.190	4,77	2.800	4,18	5.990	8,95
4	MENTAL	16.096	24,06	9.251	13,83	25.347	37,88
5	FISIK DAN MENTAL	5.363	8,02	4.578	6,84	9.941	14,86
6	LAINNYA	6.786	10,14	5.240	7,83	6.786	10,14
TOTAL		41.794	62,47	30.353	45,37	66.907	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Penduduk disabilitas di Provinsi Jawa Barat kurang dari 0,2 % dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Jawa Barat berada dalam kondisi fisik normal, sehingga Pemerintah tidak perlu terlalu banyak menyediakan fasilitas pendukung bagi penduduk disabilitas. Penurunan jumlah penduduk disabilitas di Provinsi Jawa Barat dimungkinkan karena:

- a. Penduduk yang mengalami disabilitas telah mengalami kesembuhan. Kesembuhan yang dialami karena disabilitas yang dialami hanya bersifat sementara. Selain itu dengan semakin canggihnya fasilitas kesehatan memungkinkan disabilitas tertentu dapat disembuhkan atau minimal menggunakan alat bantu tertentu sehingga penduduk yang mengalami disabilitas menjadi normal.
- b. Penduduk yang mengalami disabilitas bermigrasi ke luar daerah sehingga tidak lagi tercatat sebagai penduduk Provinsi Jawa Barat.
- c. Penduduk yang mengalami disabilitas telah dapat hidup mandiri sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Kemandirian ini menjadikan penduduk yang asalnya mengalami disabilitas mengaku menjadi penduduk normal.
- d. Penduduk yang mengalami disabilitas telah meninggal dunia.

Kondisi disabilitas yang paling banyak dialami oleh penduduk Provinsi Jawa Barat adalah disabilitas mental dengan jumlah 25.347. Disamping disabilitas mental, penduduk Provinsi Jawa Barat juga masih ada yang mengalami disabilitas fisik bahkan masih ada penduduk yang mengalami disabilitas fisik dan mental. Akan tetapi jika dilihat secara kasat mata penduduk yang mengalami disabilitas mental maupun lebih dari satu disabilitas relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya penduduk yang mengalami disabilitas sebagai berikut:

- a. Bawaan sejak lahir. Disabilitas yang dibawa sejak lahir dapat disebabkan karena faktor kesehatan maupun kecelakaan.



- b. Kecelakaan yang dialami yang menyebabkan penduduk mengalami disabilitas. Kecelakaan dapat berupa kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya.
- c. Walaupun tidak secara nyata banyak penduduk yang mengalami disabilitas yang berasal dari luar daerah “dibuang” ke daerah Jawa Barat, sehingga menjadi penduduk Provinsi Jawa Barat.

Keberadaan penduduk difabel walaupun kecil secara persentasi, tetap harus menjadi perhatian Pemerintah. Hal ini dikarenakan penduduk yang mengalami disabilitas memerlukan perlakuan yang khusus dibandingkan dengan penduduk normal. Jika penduduk yang mengalami disabilitas tidak mendapatkan perhatian yang khusus dikhawatirkan akan menjadi beban bagi penduduk lainnya dan Pemerintah. Penduduk produktif yang menjadi beban bagi penduduk lainnya secara tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Informasi mengenai penduduk yang mengalami disabilitas ini menjadi penting. Oleh karena itu informasi ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus (penyandang disabilitas), data tersebut masih memungkinkan lebih besar lagi secara faktual di lapangan karena saat pendaftaran masih dimungkinkan penduduk tidak mencantumkan jenis kecacatan yang dialaminya dikarenakan rasa malu atau karena faktor lainnya.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

Golongan darah merupakan aspek penting yang melekat pada diri seseorang. Setiap manusia pasti memiliki golongan darah tertentu. Data Golongan Darah yang dicantumkan pada KTP sangat penting untuk mengetahui dengan cepat golongan darah seseorang tanpa harus dicek terlebih dahulu. Namun sangat disayangkan, saat pendaftaran penduduk melalui SIAK, penduduk kerap kali abai dalam mengisi data golongan darah, sehingga data terkait golongan darah masih banyak yang tidak diketahui.

Tabel dibawah memperlihatkan penduduk berdasarkan golongan darah yang dimilikinya sebagai berikut:

Tabel 3.29

Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

NO	GOLONGAN DARAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	A	798.507	1,60	828.842	1,66	1.627.349	3,26
2	B	8.473	0,02	8.991	0,02	17.464	0,03
3	AB	121.435	0,24	112.577	0,23	234.012	0,47
4	O	677.988	1,36	732.338	1,47	1.410.326	2,83
5	A+	1.726	0,00	1.844	0,00	3.570	0,01
6	A-	23.712	0,05	28.915	0,06	52.627	0,11
7	B+	329.156	0,66	318.667	0,64	647.823	1,30
8	B-	3.799	0,01	3.723	0,01	7.522	0,02
9	AB+	10.766	0,02	12.490	0,03	23.256	0,05
10	AB-	1.291.500	2,59	1.201.074	2,41	2.492.574	5,00
11	O+	30.876	0,06	30.472	0,06	61.348	0,12
12	O-	25.067	0,05	27.639	0,06	52.706	0,11
13	TIDAK TAHU	21.945.140	43,98	21.324.275	42,73	43.269.415	86,71
TOTAL		25.101.104	50,64	24.471.288	49,36	49.572.392	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa masih sangat banyak penduduk yang tidak mengetahui golongan darahnya. Hal ini dapat dilihat pada angka ketidaktahuan akan golongan darah yang 86,82%. Ketidaktahuan penduduk akan golongan darah yang dimilikinya disebabkan:

- a. Penduduk tidak pernah melakukan pemeriksaan golongan darah. Kondisi tersebut dikarenakan masyarakat tidak akan melakukan pemeriksaan golongan darah, jika tidak diperlukan.
- b. Pihak pemerintah juga kurang optimal menggunakan data tentang golongan darah, sehingga tidak dapat memaksa penduduk untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Rumah Sakit ataupun Puskesmas kerap tidak pernah menanyakan data golongan darah, kecuali dalam kondisi yang kritis yang membutuhkan donor darah.

Sebetulnya data golongan darah dari penduduk ini sangat penting untuk diketahui karena akan mempengaruhi ketepatan keputusan medis yang harus dilakukan, misalnya terkait dengan suplai darah (transfusi). Selain itu jika data ini dapat diketahui oleh pihak sektor kesehatan, maka akan memudahkan siklus persediaan darah untuk tiap golongannya pada bank darah di berbagai PMI yang ada di daerah Jawa Barat.

B. Kualitas Penduduk

1. Kesehatan

Dalam menentukan arah kebijakan dibidang kesehatan setidaknya dibutuhkan data-data mengenai: Angka Kelahiran Kasar, Angka Kelahiran Umum, Angka Kelahiran Total, Angka Kelahiran Menurut Umur, Rasio Anak dan Perempuan, Angka Kematian Bayi dan Balita dan Angka Kematian Ibu.

a. Kelahiran

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator-indikator kelahiran ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.



a. Angka Kelahiran Kasar

Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk. Angka kelahiran hidup ini juga dapat menunjukkan tingkat kelahiran hidup dari suatu daerah. Selain itu, angka kelahiran hidup kasar juga dapat dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam bidang kesehatan. Hal ini berhubungan dengan kesehatan yang dimiliki oleh ibu dan bayi sewaktu dilahirkan. Kelahiran hidup dari 1000 penduduk ini memperlihatkan bahwa dengan kesehatan yang baik maka bayi akan lahir hidup. Akan tetapi disisi lain, tingginya angka kelahiran hidup secara tidak langsung juga menjadi beban.

Hal ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang harus dilakukan, berkaitan dengan penyediaan sarana kesehatan untuk bayi- bayi yang dilahirkan, termasuk sarana pendidikan yang harus disediakan jika bayi yang lahir hidup tersebut telah mencapai usia sekolah. Selanjutnya menyediakan lapangan pekerjaan jika bayi yang lahir hidup tersebut telah masuk kelompok usia produktif.

Angka kelahiran bayi hidup juga menjadi salah satu permasalahan kependudukan. Kondisi ini berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika angka kelahiran bayi hidup ini dihubungkan dengan anggota keluarga dalam suatu keluarga juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga yang bersangkutan. Banyaknya bayi yang lahir hidup dalam suatu keluarga akan menjadi beban keluarga yang bersangkutan.

Tabel 3.30
Angka Kelahiran Kasar

Kode Wil	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran	Jumlah Penduduk	CBR
32.01	BOGOR	48.625	5.495.372	8,85
32.02	SUKABUMI	25.884	2.773.554	9,33
32.03	CIANJUR	25.982	2.516.416	10,33
32.04	BANDUNG	39.188	3.723.179	10,53
32.05	GARUT	28.256	2.770.532	10,2
32.06	TASIKMALAYA	20.046	1.947.448	10,29
32.07	CIAMIS	11.167	1.272.952	8,77
32.08	KUNINGAN	13.946	1.223.209	11,4
32.09	CIREBON	27.465	2.420.953	11,34
32.10	MAJALENGKA	14.943	1.345.378	11,11
32.11	SUMEDANG	11.371	1.197.302	9,5
32.12	INDRAMAYU	13.593	1.920.505	7,08
32.13	SUBANG	14.102	1.624.856	8,68
32.14	PURWAKARTA	9.830	1.029.561	9,55
32.15	KARAWANG	24.147	2.519.882	9,58
32.16	BEKASI	30.162	3.172.833	9,51
32.17	BANDUNG BARAT	20.370	1.834.256	11,11
32.18	PANGANDARAN	3.813	440.177	8,66
32.71	KOTA BOGOR	12.573	1.122.772	11,2
32.72	KOTA SUKABUMI	3.925	361.581	10,86



Tabel 3.30
Angka Kelahiran Kasar

Kode Wil	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran	Jumlah Penduduk	CBR
32.73	KOTA BANDUNG	23.537	2.555.187	9,21
32.74	KOTA CIREBON	3.970	348.912	11,38
32.75	KOTA BEKASI	23.356	2.496.198	9,36
32.76	KOTA DEPOK	19.435	1.927.867	10,08
32.77	KOTA CIMAHI	5.208	570.829	9,12
32.78	KOTA TASIKMALAYA	8.721	752.546	11,59
32.79	KOTA BANJAR	2.438	208.135	11,71
	Jawa Barat	486.053	49.572.392	9,80

Sumber: SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Kriteria Angka Kelahiran Kasar (CBR) dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. CBR < 20, termasuk kriteria rendah
2. CBR antara 20 – 30, termasuk kriteria sedang
3. CBR > 30, termasuk kriteria tinggi

Dengan demikian CBR Kabupaten/Kota di Jawa Barat rata-rata masuk dalam kategori yang rendah. Berdasarkan data dari Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2023. Di Jawa Barat Tahun 2023 bahwa Angka Kelahiran Hidup di Jawa Barat berjumlah 486.053 jiwa.

b. Angka Kelahiran Umum

Angka Kelahiran Umum atau *General Fertility Rate/GFR* adalah banyaknya kelahiran setiap 1000 Wanita yang berusia 15- 49 tahun dalam satu tahun. Berikut adalah rumus menghitung Angka Kelahiran Umum:

$$GFR = \frac{\text{Jumlah Kelahiran}}{\text{Penduduk Wanita 15 – 49 Tahun}} \times 1000$$

- Jumlah Kelahiran = 486.053 Jiwa
- Penduduk Wanita 15-49 Tahun = 13.132.763 Jiwa

Sehingga apabila dimasukkan dalam rumus akan didapat GFR sebagai berikut:

$$GFR = \frac{486.053}{13.132.763} \times 1000 = 37,01$$

Angka 37,01 dapat dibulatkan menjadi 37 yang berarti bahwa tiap 1000 wanita yang berusia 15-49 Tahun terdapat kelahiran sebanyak ± 37 orang.

c. Rasio Anak dan Perempuan

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak dibawah lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah



kelahiran yang terjadi selama 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan diketahuinya jumlah kelahiran yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini maka akan terlihat kerapatan anak yang dilahirkan dalam suatu daerah tertentu.

Rasio anak dan perempuan juga dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana yang diperlukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu juga rasio anak dan perempuan ini juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan kependudukan bagi suatu daerah. Tingginya angka rasio ini menunjukkan bahwa disuatu daerah tingkat kelahirannya masih tinggi. Oleh karena itu, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan yang berorientasi untuk menekan pertumbuhan penduduk. Demikian juga sebaliknya, jika rasio anak dengan perempuan tersebut maka ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduknya rendah, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan untuk mempertahankan rasio tersebut. Tabel 3.25 memperlihatkan rasio anak dengan perempuan di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.31
Rasio Anak dan Perempuan

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	ANAK USIA 0-4 TAHUN	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	RASIO ANAK PEREMPUAN
3201	BOGOR	429.441	1.494.297	28,74
3202	SUKABUMI	217.132	717.289	30,27
3203	CIANJUR	204.580	635.032	32,22
3204	BANDUNG	284.456	990.255	28,73
3205	GARUT	227.702	709.768	32,08
3206	TASIKMALAYA	140.427	473.120	29,68
3207	CIAMIS	82.586	307.879	26,82
3208	KUNINGAN	89.734	306.771	29,25
3209	CIREBON	188.989	654.139	28,89
3210	MAJALENGKA	96.297	351.007	27,43
3211	SUMEDANG	81.128	292.662	27,72
3212	INDRAMAYU	124.055	516.765	24,01
3213	SUBANG	107.436	423.150	25,39
3214	PURWAKARTA	81.168	274.456	29,57
3215	KARAWANG	193.225	680.326	28,40
3216	BEKASI	250.266	890.224	28,11
3217	BANDUNG BARAT	146.965	476.953	30,81
3218	PANGANDARAN	28.491	109.197	26,09



KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	ANAK USIA 0-4 TAHUN	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	RASIO ANAK PEREMPUAN
3271	KOTA BOGOR	85.027	303.257	28,04
3272	KOTA SUKABUMI	28.183	96.479	29,21
3273	KOTA BANDUNG	173.464	678.683	25,56
3274	KOTA CIREBON	26.717	93.858	28,47
3275	KOTA BEKASI	175.477	694.549	25,26
3276	KOTA DEPOK	136.102	532.488	25,56
3277	KOTA CIMAHI	38.447	155.566	24,71
3278	KOTA TASIKMALAYA	57.634	197.079	29,24
3279	KOTA BANJAR	15.238	53.334	28,57
TOTAL		3.710.367	13.108.583	28,30

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa rasio anak dengan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah 28. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan berusia produktif terdapat 28 anak-anak berusia dibawah lima tahun. Dengan demikian setiap 100 orang perempuan harus menanggung 28 orang anak dibawah lima tahun. Selain berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur merupakan daerah yang mempunyai rasio penduduk anak-anak dengan perempuan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa di kedua daerah tersebut tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir paling tinggi di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu Kota Cimahi dan Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang mempunyai rasio anak dengan perempuan yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dikedua daerah tersebut tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir cukup rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Bagi Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sejak saat ini harus sudah mulai memikirkan dan mempersiapkan berbagai pelayanan dengan baik, baik untuk pelayanan dalam jangka pendek maupun pelayanan dalam jangka panjang, sebagai upaya menyongsong pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi tidak menjadi terabaikan penyediaan sarana yang harus dilakukan oleh Kota Cimahi dan Kabupaten Majalengka dengan rasio anak dan perempuan yang rendah. hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk bukan hanya dipengaruhi dengan kelahiran saja, tetapi juga migrasi yang mungkin saja membawa anak-anaknya.

Data yang dihimpun pada Tahun 2023 ini belum dapat memperlihatkan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR), karena setidaknya data yang dibutuhkan harus dapat menunjukkan jumlah kelahiran bayi yang dilahirkan oleh wanita pada rentang usia 15-49 Tahun. Semoga pada tahun mendatang kami dapat



menyajikan data yang lebih lengkap untuk menunjang kebijakan di bidang kesehatan yang lebih tepat dan terukur.

b. Kematian

Salah satu yang menjadi indikator dalam menentukan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal perkembangan penduduk adalah Angka Kematian yang terkait dengan Angka Kematian Kasar, Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Post Neonatal, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu. Tabel 3.27 adalah Angka Kematian dari berbagai aspek per Kabupaten/Kota yang akan menjadi salah satu kunci analisis dalam menilai perkembangan kependudukan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.32
Angka Kematian

No.	Kabupaten/Kota	Angka Kematian				
		Kematian Ibu	Kematian Neonatal	Post Neonatal	Kematian Bayi	Balita
1	BOGOR	93,78	5,1	1,0	6,1	0,5
2	SUKABUMI	93,03	6,2	1,5	7,7	0,7
3	CIANJUR	129,13	3,3	0,7	3,9	0,2
4	BANDUNG	66,56	6,0	0,8	6,9	0,2
5	GARUT	136,12	6,6	0,7	7,2	0,2
6	TASIKMALAYA	135,99	9,0	0,8	9,9	0,3
7	CIAMIS	129,55	6,4	1,2	7,5	0,7
8	KUNINGAN	132,45	8,3	1,3	9,5	0,7
9	CIREBON	94,55	5,9	0,5	6,4	0,3
10	MAJALENGKA	108,73	6,8	1,0	7,8	0,8
11	SUMEDANG	136,09	9,3	2,2	11,5	0,6
12	INDRAMAYU	85,64	7,5	0,4	7,9	-
13	SUBANG	122,38	5,6	0,3	5,9	0,0
14	PURWAKARTA	145,29	6,0	0,8	6,8	0,3
15	KARAWANG	134,19	5,0	0,6	5,5	0,0
16	BEKASI	42,77	2,0	0,3	2,3	0,1
17	BANDUNG BARAT	94,53	5,9	0,3	6,3	-

Tabel 3.32
Angka Kematian

No.	Kabupaten/Kota	Angka Kematian				
		Kematian Ibu	Kematian Neonatal	Post Neonatal	Kematian Bayi	Balita
18	PANGANDARAN	18,62	4,6	2,4	7,0	0,7
19	KOTA BOGOR	76,22	6,6	1,8	8,4	0,6
20	KOTA SUKABUMI	145,35	7,4	3,4	10,9	0,7
21	KOTA BANDUNG	65,74	3,6	0,9	4,5	0,3
22	KOTA CIREBON	171,27	10,5	1,7	12,2	0,2
23	KOTA BEKASI	85,02	3,9	0,5	4,4	0,2
24	KOTA DEPOK	66,40	4,3	1,0	5,3	0,6
25	KOTA CIMAH	59,83	6,4	1,1	7,5	0,2
26	KOTA TASIKMALAYA	192,22	7,8	2,5	10,3	1,5
27	KOTA BANJAR	183,35	9,1	4,3	13,4	4,0
	Jawa Barat	96,89	5,5	0,9	6,4	0,4

Sumber: Dinas Kesehatan Angka Sementara tahun 2023



**a. Angka Kematian Kasar**

Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*) adalah besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari Angka Kelahiran Kasar akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.

Tabel 3.33
Angka Kematian Kasar

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	ANGKA KEMATIAN KASAR
3201	BOGOR	4,86
3202	SUKABUMI	2,77
3203	CIANJUR	4,22
3204	BANDUNG	4,04
3205	GARUT	6,19
3206	TASIKMALAYA	7,95
3207	CIAMIS	5,81
3208	KUNINGAN	11,38
3209	CIREBON	4,26
3210	MAJALENGKA	12,54
3211	SUMEDANG	3,9
3212	INDRAMAYU	1,77
3213	SUBANG	4,94
3214	PURWAKARTA	4,79
3215	KARAWANG	6,61
3216	BEKASI	3,46
3217	BANDUNG BARAT	2,87
3218	PANGANDARAN	14,51
3271	KOTA BOGOR	8,27
3272	KOTA SUKABUMI	8,42
3273	KOTA BANDUNG	8,32
3274	KOTA CIREBON	8,02
3275	KOTA BEKASI	7,13



KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	ANGKA KEMATIAN KASAR
3276	KOTA DEPOK	6,95
3277	KOTA CIMAH	6,72
3278	KOTA TASIKMALAYA	7,66
3279	KOTA BANJAR	18,4
TOTAL		5,70

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa Jawa Barat memiliki rata-rata Angka Kematian Kasar sebesar 5,70 dibulatkan menjadi 6, yang artinya setiap 1000 jiwa di Jawa Barat terjadi kematian 6 jiwa.

b. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen yang mempengaruhi kematian bayi dapat berupa penyakit yang dibawa sejak lahir, kekurangan gizi sewaktu ibu sedang mengandung. Faktor endogen ini sulit untuk dilacak secara kasat mata. Faktor endogen juga berkaitan dengan gaya hidup orang tua sebelum mengandung anak, bahkan gaya hidup sebelum kedua orang tua melakukan perkawinan. Faktor endogen juga dapat saja disebabkan faktor keturunan yang mungkin saja ada jauh sebelum generasi saat ini.

Sementara itu faktor eksogen lebih berkaitan dengan lingkungan tempat bayi atau keluarga tersebut berada. Kebersihan sewaktu persalinan, kebersihan sewaktu merawat, sampai asupan gizi setelah bayi dilahirkan menjadi faktor eksogen kematian bayi. Faktor eksogen juga dipengaruhi oleh



budaya yang berkembang dalam masyarakat. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan. Tingginya Angka Kematian Bayi menggambarkan bahwa pembangunan saat ini belum optimal menyentuh kualitas untuk bayi.

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) ini yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor endogen dan faktor eksogen tadi. Pelayanan kesehatan ibu dan anak ini tidak hanya berkaitan dengan persalinan dan perawatan setelah bayi lahir. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi dimulai sebelum ibu mengandung. Kesiapan untuk mengandung haruslah sehat secara fisik dan mental. Demikian juga sewaktu mengandung perlu ada pelayanan yang dapat memastikan bahwa bayi yang dikandung beserta ibunya alam keadaan sehat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait jumlah angka kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) pada Tahun 2023 adalah 6,4/1.000 KH, artinya dari 1.000 bayi terdapat ± 6 bayi yang meninggal. Penurunan angka kematian bayi menunjukkan bahwa:

- a. Penduduk Provinsi Jawa Barat semakin sadar akan kesehatan reproduksi khususnya sewaktu hamil. Hal ini diperlihatkan dengan semakin seringnya pemeriksaan kehamilan, kelahiran pada ahlinya, dan perawatan bayi.
- b. Di Provinsi Jawa Barat semakin lengkap fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan dan proses kelahiran.
- c. Semakin mudahnya penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan dengan murah.

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) secara umum di Provinsi Jawa Barat tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi di Provinsi Jawa Barat sudah baik. Selain itu juga pasangan yang akan mendapatkan bayi maupun telah melahirkan dapat merawatnya dengan baik.



Pelayanan terhadap ibu dan anak pasca kelahiran juga berpengaruh terhadap kematian bayi pasca dilahirkan. Sulitnya akses terhadap sarana kesehatan, perlengkapan yang minim, serta tidak adanya ahli yang membantu dalam persalinan menjadi salah satu faktor penyebab kematian bayi pasca dilahirkan. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena perbedaan kondisi dari daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ada daerah-daerah yang maju dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan standar serta adanya tenaga medis yang sesuai. Sementara masih ada daerah yang masih belum lengkap sarana pelayanan kesehatan khusus untuk melahirkan dan kurangnya tenaga medis yang dapat membantu proses kelahiran.

c. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/*Neo Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dari Tabel 3.34 dapat diketahui rata-rata kematian neonatal di Jawa Barat adalah sebesar 5,5. Artinya, kematian neonatal berjumlah ± 5 per 1000 kelahiran hidup.

d. Angka Kematian Post Neonatal

Angka Kematian Post Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Dari Tabel 3.34 dapat diketahui rata-rata kematian Post Neonatal di Jawa Barat adalah sebesar 0,9. Artinya, kematian Post Neonatal berjumlah ± 1 per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

e. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia dibawah 5 (lima) tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah kematian balita rentang usia 1-4 tahun, sehingga perbandingannya pun dengan penduduk balita 1-4 tahun. Angka



kematian balita usia 1-4 tahun di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 0,4/1.000 KH. Artinya, kematian balita berjumlah ± 1 per 1000 penduduk balita usia 1-4 tahun.

f. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Kematian ibu juga dapat disebabkan karena penyakit yang diderita oleh ibu sewaktu mengandung dan melahirkan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menerangkan bahwa AKI berjumlah 96,89/100.000 KH. Artinya, kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan berjumlah ± 97 jiwa per 100.000 jiwa. Angka ini termasuk tinggi.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi. Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Jika semua ini dapat dilakukan dan tersedia, maka angka kematian ibu sewaktu mengandung dan melahirkan dapat ditekan. Selain itu yang paling penting dalam keluarga itu sudah memahami penanganan kehamilan dan proses kelahiran. Hal ini berkaitan dengan tidak selalu persalinan dapat dilakukan di tempat persalinan.

2. Pendidikan

Perkembangan derajat pendidikan penduduk di Jawa Barat ditunjukkan dengan menggunakan indikator pendidikan berupa Angka



Patisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Penduduk Jawa Barat, dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2023), perkembangan APK SMA/Sederajat Penduduk Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.28

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel 3.34
Angka Melek Huruf

Kode Wilayah	KABUPATEN / KOTA	Angka Melek Huruf (AMH)
3201	Bogor	99,24
3202	Sukabumi	99,17
3203	Cianjur	98,95
3204	Bandung	99,81
3205	Garut	99,02
3206	Tasikmalaya	99,71
3207	Ciamis	99,52
3208	Kuningan	98,29
3209	Cirebon	93,70
3210	Majalengka	96,87
3211	Sumedang	99,34
3212	Indramayu	92,52
3213	Subang	96,97
3214	Purwakarta	98,13
3215	Karawang	97,82



Kode Wilayah	KABUPATEN / KOTA	Angka Melek Huruf (AMH)
3216	Bekasi	97,94
3217	Bandung Barat	99,28
3218	Pangandaran	99,29
3271	Kota Bogor	99,69
3272	Kota Sukabumi	99,64
3273	Kota Bandung	99,87
3274	Kota Cirebon	98,23
3275	Kota Bekasi	99,40
3276	Kota Depok	99,19
3277	Kota Cimahi	99,64
3278	Kota Tasikmalaya	99,81
3279	Kota Banjar	98,95
TOTAL		98,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf tertinggi adalah Kota Bandung dengan angka mencapai 99,88 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan angka 92,34.

b. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan Program Wajib Belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor Pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.

Nilai APK yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup



anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di jenjang Sekolah Dasar atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk Sekolah Dasar. Masih adanya anak yang bersekolah di SD pada usia di atas 12 tahun dikarenakan:

- a. Akses terhadap sekolah khususnya SD secara geografis jauh sehingga orang tua merasa khawatir untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD pada usai yang semestinya.
- b. Faktor budaya. Pada budaya tertentu anak-anak dikatakan layak untuk sekolah di SD jika sudah mampu melakukan sesuatu. Demikian juga ada budaya yang mengharuskan anak-anak berhenti sekolah sementara, jika ada kegiatan yang mengharuskan keterlibatan semua anggota keluarga.
- c. Faktor ekonomi yang mengharuskan anak-anak bekerja atau membantu orang tua sehingga terlambat untuk memasuki sekolah.
- d. Ada hambatan tertentu yang memungkinkan anak-anak tidak masuk SD sesuai dengan kelompok umurnya.
- e. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Tabel 3.28 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar SD penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

*Tabel 3.35
Angka Partisipan Kasar SD*

NO	KABUPATEN / KOTA	APK
1	Kab. Bogor	105,31
2	Kab. Sukabumi	103,95
3	Kab. Cianjur	102,26
4	Kab. Bandung	101,54



NO	KABUPATEN / KOTA	APK
5	Kab. Sumedang	105,75
6	Kab. Garut	101,30
7	Kab. Tasikmalaya	101,14
8	Kab. Ciamis	100,82
9	Kab. Kuningan	102,91
10	Kab. Majalengka	104,26
11	Kab. Cirebon	104,49
12	Kab. Indramayu	100,81
13	Kab. Subang	102,05
14	Kab. Purwakarta	106,17
15	Kab. Karawang	104,67
16	Kab. Bekasi	105,01
17	Kab. Bandung Barat	97,35
18	Kab. Pangandaran	100,83
19	Kota Bandung	96,07
20	Kota Bogor	100,09
21	Kota Sukabumi	98,81
22	Kota Cirebon	99,78
23	Kota Bekasi	98,51
24	Kota Depok	96,52
25	Kota Cimahi	93,74
26	Kota Tasikmalaya	99,66
27	Kota Banjar	98,47
RATA-RATA		101,20

Sumber : Kemendikbud

Dari Tabel diatas diketahui bahwa APK SD tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Purwakarta dengan angka mencapai 106,17, sedangkan terendah adalah Kota Cimahi dengan angka 93,74. Nilai APK yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.



Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Angka Partisaipasi Kasar menunjukkan bahwa jumlah lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Dengan demikian berdasarkan Angka Partisipasi Kasar SMP ini terlihat adanya anak-anak yang putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikan SD. Angka Partisipasi Kasar SMP ini juga dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membuat rencana dalam menanggulangi angka putus sekolah pendidikan dasar. Program-program pendukung baik yang dilakukan di SD maupun program lainnya yang membantu anak yang putus sekolah, juga dapat dilakukan. Tabel 3.28 memperlihatkan Angka Partisipasi Kasar SMP Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.36
Angka Partisipan Kasar SMP

NO	KABUPATEN / KOTA	APK
1	Kab. Bogor	104,67
2	Kab. Sukabumi	98,59
3	Kab. Cianjur	104,85
4	Kab. Bandung	99,24
5	Kab. Sumedang	102,48
6	Kab. Garut	100,31
7	Kab. Tasikmalaya	101,35
8	Kab. Ciamis	102,69
9	Kab. Kuningan	103,29
10	Kab. Majalengka	99,61
11	Kab. Cirebon	76,74
12	Kab. Indramayu	75,46
13	Kab. Subang	79,85
14	Kab. Purwakarta	84,27
15	Kab. Karawang	78,22
16	Kab. Bekasi	82,93
17	Kab. Bandung Barat	81,24
18	Kab. Pangandaran	83,38
19	Kota Bandung	84,76



NO	KABUPATEN / KOTA	APK
20	Kota Bogor	80,11
21	Kota Sukabumi	81,26
22	Kota Cirebon	76,48
23	Kota Bekasi	79,66
24	Kota Depok	83,17
25	Kota Cimahi	84,73
26	Kota Tasikmalaya	84,45
27	Kota Banjar	83,89
RATA-RATA		102,24

Sumber : Kemendikbud

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa APK SMP tertinggi adalah Kabupaten Cianjur yang mencapai angka 104,85 %, dengan Kabupaten Sukabumi menjadi urutan terakhir dengan angka 98,59 %. Selain APK SD dan SMP, terdapat juga APK dari SMA. Tabel dibawah ini memperlihatkan APK SMA di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.37

Angka Partisipan Kasar SMA

NO	KABUPATEN / KOTA	APK
1	Kab. Bogor	93,33
2	Kab. Sukabumi	89,07
3	Kab. Cianjur	109,21
4	Kab. Bandung	89,99
5	Kab. Sumedang	93,64
6	Kab. Garut	109,32
7	Kab. Tasikmalaya	92,36
8	Kab. Ciamis	89,83
9	Kab. Kuningan	109,29
10	Kab. Majalengka	100,06
11	Kab. Cirebon	91,22
12	Kab. Indramayu	87,77
13	Kab. Subang	109,25



NO	KABUPATEN / KOTA	APK
14	Kab. Purwakarta	99,20
15	Kab. Karawang	91,78
16	Kab. Bekasi	110,62
17	Kab. Bandung Barat	90,43
18	Kab. Pangandaran	81,32
19	Kota Bandung	110,48
20	Kota Bogor	111,08
21	Kota Sukabumi	105,53
22	Kota Cirebon	104,96
23	Kota Bekasi	98,03
24	Kota Depok	111,45
25	Kota Cimahi	102,10
26	Kota Tasikmalaya	106,31
27	Kota Banjar	108,49
RATA-RATA		99,86

Sumber : Kemendikbud

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa APK SMA tertinggi adalah Kota Depok yang mencapai angka 113,03 %, membuat Kabupaten Pangandaran menjadi urutan terakhir dengan angka 81,32 %.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Murni penting bagi Pemerintah karena dengan adanya angka partisipasi murni ini Pemerintah dapat membuat rencana pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kelompok umur dan jenjang pendidikan. Penentuan usia untuk masuk ke jenjang SD yaitu 7 tahun, menjadi acuan prediksi Angka Partisipasi Murni SD, usia SMP 13 Tahun dan SMA 16 Tahun.



Tabel di bawah ini memperlihatkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Tabel 3.38
Angka Partisipan Murni

No	Kabupaten / Kota	SD/MI/ Paket A	SMP/MTS/ Paket B	SMA/MA/ Paket C
1	Bogor	96,29	80,05	67,01
2	Sukabumi	96,71	78,38	67,41
3	Cianjur	95,03	77,54	69,27
4	Bandung	94,93	78,16	66,39
5	Garut	99,35	82,09	69,05
6	Tasikmalaya	94,62	76,98	73,23
7	Ciamis	95,77	84,28	73,21
8	Kuningan	94,61	82,97	67,23
9	Cirebon	96,47	81,88	81,66
10	Majalengka	99,36	80,66	75,80
11	Sumedang	96,20	76,74	64,32
12	Indramayu	93,38	75,46	61,43
13	Subang	96,20	79,85	77,77
14	Kab. Purwakarta	99,61	84,27	76,84
15	Kab. Karawang	98,35	78,22	67,88
16	Kab. Bekasi	98,30	82,93	82,65
17	Kab. Bandung Barat	91,35	81,24	68,46
18	Kab. Pangandaran	94,75	83,38	60,95
19	Kota Bandung	91,56	84,76	85,33
20	Kota Bogor	93,12	80,11	81,33
21	Kota Sukabumi	90,80	81,26	78,79
22	Kota Cirebon	90,77	76,48	74,77
23	Kota Bekasi	92,69	79,66	73,52
24	Kota Depok	90,86	83,17	84,64
25	Kota Cimahi	89,17	84,73	82,26
26	Kota Tasikmalaya	93,88	84,45	83,95
27	Kota Banjar	91,70	83,89	84,97

Sumber : Kemendikbud



Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

d. Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya Angka Putus Sekolah SMA/SMK menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SMA/SMK yang dinyatakan dalam persen. Tabel dibawah ini memperlihatkan tingkat putus sekolah SD dan SMP di Provinsi Jawa Barat.

Tabel di bawah ini memperlihatkan tingkat putus sekolah SD dan SMP di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.39
Angka Penduduk Putus Sekolah SD dan SMP

No.	Kabupaten/Kota	SD (SEKOLAH DASAR)			SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
		Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%	Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%
1	Kab. Bogor	535.395	977	0,18	220.410	342	0,16
2	Kab. Sukabumi	235.709	338	0,14	83.483	124	0,15
3	Kab. Cianjur	252.818	367	0,15	98.278	186	0,19
4	Kab. Bandung	359.251	362	0,10	133.901	137	0,10
5	Kab. Sumedang	101.181	100	0,10	41.598	33	0,08
6	Kab. Garut	267.382	319	0,12	104.160	272	0,26
7	Kab. Tasikmalaya	155.206	228	0,15	63.046	47	0,07
8	Kab. Ciamis	86.797	72	0,08	37.034	13	0,04
9	Kab. Kuningan	98.241	137	0,14	40.226	52	0,13
10	Kab. Majalengka	113.447	89	0,08	39.884	19	0,05
11	Kab. Cirebon	199.502	263	0,13	80.443	51	0,06
12	Kab. Indramayu	165.063	275	0,17	61.315	76	0,12
13	Kab. Subang	141.867	207	0,15	60.219	120	0,20
14	Kab. Purwakarta	99.799	146	0,15	38.153	27	0,07

No.	Kabupaten/Kota	SD (SEKOLAH DASAR)			SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
		Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%	Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%
15	Kab. Karawang	237.752	366	0,15	87.218	51	0,06
16	Kab. Bekasi	334.593	464	0,14	122.346	84	0,07
17	Kab. Bandung Barat	158.339	196	0,12	61.221	74	0,12
18	Kab. Pangandaran	30.997	19	0,06	13.384	5	0,04
19	Kota Bandung	203.713	156	0,08	96.880	1	0,001
20	Kota Bogor	100.042	69	0,07	41.803	23	0,06
21	Kota Sukabumi	32.497	90	0,28	14.911	2	0,01
22	Kota Cirebon	33.320	22	0,07	17.508	4	0,02
23	Kota Bekasi	225.962	199	0,09	94.468	41	0,04
24	Kota Depok	158.442	105	0,07	72.064	60	0,08
25	Kota Cimahi	46.856	31	0,07	21.405	10	0,05
26	Kota Tasikmalaya	62.308	70	0,11	28.237	23	0,08
27	Kota Banjar	14.455	8	0,06	7.891	4	0,05
PROVINSI JAWA BARAT		4.450.934	5.675	0,13	1.781.486	1.881	0,11

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa Angka Putus Sekolah tertinggi Tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah Putus Sekolah adalah 977 orang atau 0,16%. Sedangkan untuk Angka Putus



Sekolah terendah Tingkat Sekolah Dasar adalah Kota Banjar dengan jumlah Putus Sekolah sebanyak 8 orang atau 0,06 %. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan Angka Putus Sekolah tertinggi dengan jumlah 342 orang atau 0,18. Sedangkan untuk kabupaten/Kota dengan Angka Putus Sekolah terendah adalah Kota Bandung dengan angka 1 orang dengan persentase 0,001.

Tabel di bawah ini memperlihatkan tingkat putus sekolah SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.40
Angka Penduduk Putus Sekolah SMA/SMK

No.	Kabupaten/Kota	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)			SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
		Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%	Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%
1	Kab. Bogor	85.595	38	0,04	132.760	159	0,12
2	Kab. Sukabumi	39.358	22	0,06	42.682	145	0,34
3	Kab. Cianjur	33.562	39	0,12	59.287	87	0,15
4	Kab. Bandung	59.814	15	0,03	55.246	56	0,10
5	Kab. Sumedang	18.021	1	0,01	26.220	11	0,04
6	Kab. Garut	51.478	85	0,17	56.768	51	0,09
7	Kab. Tasikmalaya	26.684	55	0,21	41.489	53	0,13
8	Kab. Ciamis	16.840	6	0,04	20.770	15	0,07
9	Kab. Kuningan	19.757	9	0,05	27.726	38	0,14



No.	Kabupaten/Kota	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)			SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
		Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%	Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%
10	Kab. Majalengka	18.596	15	0,08	27.130	19	0,07
11	Kab. Cirebon	24.795	21	0,08	52.313	63	0,12
12	Kab. Indramayu	20.576	27	0,13	49.546	56	0,11
13	Kab. Subang	25.683	19	0,07	36.026	66	0,18
14	Kab. Purwakarta	16.761	4	0,02	21.368	42	0,20
15	Kab. Karawang	31.297	4	0,01	61.686	90	0,15
16	Kab. Bekasi	57.604	8	0,01	71.257	104	0,15
17	Kab. Bandung Barat	29.561	55	0,19	31.488	90	0,29
18	Kab. Pangandaran	4.740	1	0,02	9.676	21	0,22
19	Kota Bandung	61.786	19	0,03	54.463	18	0,03
20	Kota Bogor	21.070	2	0,01	33.913	8	0,02
21	Kota Sukabumi	8.243	21	0,25	10.809	1	0,01
22	Kota Cirebon	12.589	2	0,02	10.771	5	0,05
23	Kota Bekasi	48.032	11	0,02	61.924	9	0,01
24	Kota Depok	31.317	7	0,02	38.653	32	0,08
25	Kota Cimahi	9.797	2	0,02	16.974	8	0,05
26	Kota Tasikmalaya	16.052	0	0,00	17.426	12	0,07
27	Kota Banjar	3.319	4	0,12	8.074	4	0,05

No.	Kabupaten/Kota	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)			SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
		Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%	Jumlah Siswa	Jumlah Putus Sekolah	%
	PROVINSI JAWA BARAT	792.927	492	0,06	1.076.445	1.263	0,12

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023





Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa Angka Putus Sekolah tertinggi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Kabupaten Garut dengan angka sebesar 85 orang atau 0,17% dan disusul oleh Kabupaten Bandung Barat dengan angka 55 orang atau 0,19%. Sedangkan untuk Angka Putus Sekolah terendah pada tingkat Sekolah Menengah Atas adalah Kota Tasikmalaya dengan dengan angka 0. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Kejuruan (SMK) Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten/Kota dengan Angka Putus Sekolah tertinggi dengan angka 159 Orang atau 0,12 % sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan Angka Putus Sekolah Terendah adalah Kota Sukabumi dengan Angka Putus Sekolah 1 Orang atau 0,01%.

e. Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

a. Jumlah Proporsi tenaga Kerja (Manpower)

Kelompok usia produktif merupakan kelompok usia yang dikategorikan sebagai tenaga kerja. Tenaga Kerja (*Manpower*) adalah seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif menghasilkan barang dan jasa. Indikator ini berguna bagi pengambilan kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Di samping itu juga dapat untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Tabel dibawah ini memperlihatkan penduduk berdasarkan pekerjaan sebagai berikut

Tabel 3.41
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Pekerjaan

NO	KELOMPOK KERJA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	6.252.937	12,53	5.401.749	10,83	11.654.686	23,36
2	APARATUR/PEJABAT NEGARA	500.187	1,00	248.105	0,50	748.292	1,50
3	TENAGA PENGAJAR	112.195	0,22	192.774	0,39	304.969	0,61
4	WIRASWASTA	12.010.516	24,07	1.954.621	3,92	13.965.137	27,99
5	PERTANIAN/PETERNAKAN	1.319.216	2,64	229.093	0,46	1.548.309	3,10
6	NELAYAN	70.004	0,14	396	0,00	70.400	0,14
7	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	15.230	0,03	1.667	0,00	16.897	0,03
8	PELAJAR/MAHASISWA	4.767.034	9,55	4.122.512	8,26	8.889.546	17,81
9	TENAGA KESEHATAN	21.238	0,04	75.519	0,15	96.757	0,19
10	PENSIUNAN	187.674	0,38	82.234	0,16	269.908	0,54
11	LAINNYA	11.914	0,02	12.323.177	24,70	12.335.091	24,72
TOTAL		25.268.145	50,64	24.631.847	49,36	49.899.992	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat mempunyai pekerjaan yang beragam. Penduduk yang mempunyai pekerjaan dengan keterangan lainnya, merupakan penduduk yang saat ini tidak bekerja, bekerja serabutan dan mengurus rumah tangga. Penduduk yang baru berhenti bekerja dan sedang mencari pekerjaan baru mencantumkan status pekerjaannya dengan lainnya. Demikian pula halnya dengan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan.

Kemudian yang menarik lagi banyaknya penduduk Provinsi Jawa Barat sebagai pelajar/mahasiswa. Tingginya penduduk yang mempunyai status sebagai pelajar/mahasiswa ini dikarenakan di Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa perguruan tinggi yang menjadi favorit di Indonesia. Hal ini menjadikan perguruan tinggi tersebut menjadi tujuan utama dari penduduk dari daerah lain untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan tinggal di Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun menjadikan penduduk Provinsi Jawa Barat banyak yang mencantumkan pekerjaannya sebagai pelajar/mahasiswa.

Di Provinsi Jawa Barat penduduk yang mencantumkan pekerjaannya sebagai pensiunan, cukup tinggi. Iklim yang menyenangkan ditambah dengan penduduk yang ramah menjadikan banyak pensiunan yang senang untuk tinggal di Provinsi Jawa Barat untuk menghabiskan masa tuanya. Para pensiunan ini bukan saja penduduk asli Provinsi Jawa Barat tetapi juga banyak yang berasal dari luar daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.42
Proporsi Tenaga Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	n	%
1	15-19	1.683.193	4,93	1.629.088	4,77	3.312.281	9,69
2	20-24	2.188.960	6,41	2.085.228	6,10	4.274.188	12,51
3	25-29	2.077.563	6,08	1.957.070	5,73	4.034.633	11,81
4	30-34	1.946.905	5,70	1.870.680	5,48	3.817.585	11,17
5	35-39	1.842.773	5,39	1.805.530	5,28	3.648.303	10,68
6	40-44	1.955.304	5,72	1.979.578	5,79	3.934.882	11,52
7	45-49	1.725.451	5,05	1.781.409	5,21	3.506.860	10,26
8	50-54	1.593.957	4,67	1.586.328	4,64	3.180.285	9,31
9	55-59	1.237.867	3,62	1.258.721	3,68	2.496.588	7,31
10	60-64	976.618	2,86	983.808	2,88	1.960.426	5,74
TOTAL		17.228.591	50	16.937.440	50	34.166.031	100

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Lebih lanjut, berikut cara penghitungan Tabel Proporsi Tenaga Kerja sebagai berikut:

Proporsi tenaga Kerja (Manpower)

$$= \frac{\text{Usia Produktif}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 = \text{Angka}$$

$$\begin{aligned} \text{Proporsi tenaga Kerja (Manpower)} &= \frac{34.166.031}{49.899.992} \times 100 \\ &= \mathbf{68,47} \end{aligned}$$

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat mencapai angka 68,47%. Jika dilihat perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan, maka dapat diketahui bahwa penduduk usia kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia kerja perempuan, selisih 0.85% sebagaimana terlihat pada Tabel 3.33.

b. Proporsi Penduduk Angkatan Kerja

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) yang aktif secara ekonomi (terkecuali ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan) angkatan kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penduduk bekerja (*employed*) dan mencari kerja/menganggur (*unemployed*). Tabel berikut memperlihatkan penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan angkatan kerja :

Tabel 3.43
Proporsi Angkatan Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	15-19	352.900	2,04	309.727	1,79	662.627	3,84
2	20-24	876.634	5,08	393.580	2,28	1.270.214	7,36
3	25-29	1.638.266	9,49	461.538	2,67	2.099.804	12,16
4	30-34	1.862.717	10,79	459.885	2,66	2.322.602	13,45
5	35-39	1.830.724	10,60	388.401	2,25	2.219.125	12,85
6	40-44	1.952.678	11,31	365.411	2,12	2.318.089	13,42
7	45-49	1.724.638	9,99	288.729	1,67	2.013.367	11,66
8	50-54	1.592.609	9,22	244.803	1,42	1.837.412	10,64
9	55-59	1.228.167	7,11	203.559	1,18	1.431.726	8,29
10	60-64	940.531	5,45	153.065	0,89	1.093.596	6,33
TOTAL		13.999.864	81,07	3.268.698	18,93	17.268.562	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Lebih lanjut, berikut cara penghitungan Tabel Proporsi Penduduk Angkatan Kerja sebagai berikut

$$\text{Angkatan Kerja} = \frac{\text{Tenaga Kerja}}{\text{Usia Produktif}} \times 100 = \text{Angka}$$

$$\text{Angkatan Kerja} = \frac{17.268.562}{34.166.031} \times 100 = \mathbf{50.54}$$

Proporsi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 50.54%. Angka tersebut dilihat dari jumlah total penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang produktif secara ekonomi (bekerja) yang berjumlah 17.268.562 jiwa dibagi jumlah total penduduk usia kerja (Usia Produktif) yang berjumlah 34.166.031 jiwa dikali 100.

Tabel 3.44
Proporsi Penduduk Tidak Bekerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	15-19	324.608	15,06	299.229	13,89	623.837	28,95
2	20-24	436.897	20,28	266.670	12,38	703.567	32,65
3	25-29	325.733	15,12	105.613	4,90	431.346	20,02
4	30-34	139.147	6,46	42.147	1,96	181.294	8,41
5	35-39	56.763	2,63	23.028	1,07	79.791	3,70
6	40-44	30.938	1,44	16.705	0,78	47.643	2,21
7	45-49	15.687	0,73	12.432	0,58	28.119	1,30
8	50-54	10.994	0,51	10.751	0,50	21.745	1,01
9	55-59	9.537	0,44	9.293	0,43	18.830	0,87
10	60-64	9.349	0,43	9.201	0,43	18.550	0,86
TOTAL		1.359.653	63,10	795.069	36,90	2.154.722	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





$$\begin{aligned} \text{Proporsi Tidak Kerja} &= \frac{\text{Tidak Bekerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100 = \text{Angka} \\ \text{Proporsi Tidak Kerja} &= \frac{2.154.722}{17.268.562} \times 100 = \mathbf{12,47} \end{aligned}$$

Penduduk tidak bekerja adalah angkatan kerja yang mencari kerja/menganggur. Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi penduduk tidak bekerja di Jawa Barat adalah sejumlah 2.154.722 orang atau 12,47% dari total angkatan kerja di Jawa Barat.

Tabel 3.45
Proporsi Penduduk Bekerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	15-19	28.292	0,19	10.498	0,07	38.790	0,26
2	20-24	439.737	2,91	126.910	0,84	566.647	3,75
3	25-29	1.312.533	8,68	355.925	2,35	1.668.458	11,04
4	30-34	1.723.570	11,40	417.738	2,76	2.141.308	14,17
5	35-39	1.773.961	11,74	365.373	2,42	2.139.334	14,15
6	40-44	1.921.740	12,72	348.706	2,31	2.270.446	15,02
7	45-49	1.708.951	11,31	276.297	1,83	1.985.248	13,14
8	50-54	1.581.615	10,46	234.052	1,55	1.815.667	12,01
9	55-59	1.218.630	8,06	194.266	1,29	1.412.896	9,35
10	60-64	931.182	6,16	143.864	0,95	1.075.046	7,11
TOTAL		12.640.211	83,63	2.473.629	16,37	15.113.840	100,00

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Lebih lanjut, berikut cara penghitungan Tabel Proporsi Penduduk Bekerja sebagai berikut

$$\text{Proporsi Berkeja} = \frac{\text{Penduduk Bekerja}}{\text{Usia Produktif}} \times 100 = \text{Angka}$$
$$\text{Proporsi Berkeja} = \frac{15.113.840}{34.166.031} \times 100 = \mathbf{44.23}$$

Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Proporsi Penduduk Bekerja di Jawa Barat adalah sejumlah 44.23% dari total penduduk penduduk usia kerja.

c. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari kerja dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Indikator ini untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Tabel 3.46
Angka Partisipan Kerja

NO	KELOMPOK UMUR	TIDAK BEKERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANKATAN KERJA	TENAGA KERJA	APAK
1	15-19	623.837	38.790	662.627	3.273.436	3.312.281	20,01
2	20-24	703.567	566.647	1.270.214	3.707.494	4.274.188	29,72
3	25-29	431.346	1.668.458	2.099.804	2.366.131	4.034.633	52,04
4	30-34	181.294	2.141.308	2.322.602	1.676.209	3.817.585	60,84
5	35-39	79.791	2.139.334	2.219.125	1.508.886	3.648.303	60,83
6	40-44	47.643	2.270.446	2.318.089	1.664.283	3.934.882	58,91
7	45-49	28.119	1.985.248	2.013.367	1.521.282	3.506.860	57,41
8	50-54	21.745	1.815.667	1.837.412	1.363.173	3.180.285	57,78
9	55-59	18.830	1.412.896	1.431.726	1.071.253	2.496.588	57,35
10	60-64	18.550	1.075.046	1.093.596	832.977	1.960.426	55,78
TOTAL		2.154.722	15.113.840	17.268.562	18.985.124	34.166.031	50,54

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APAK Provinsi Jawa Barat adalah 50,54%. Hal ini menunjukkan bahwa dari penduduk usia 15-64 tahun, sebanyak 50,54% merupakan penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari kerja. Perbedaan antara penduduk produktif dengan angkatan kerja terjadi karena masih adanya penduduk usia produktif yang masih belum bekerja karena masih melanjutkan pendidikannya atau masih mencari pekerjaannya.

Sementara itu dilihat secara keseluruhan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat yang masuk dunia kerja hanya sekitar 50.54% dari seluruh jumlah penduduk usia produktif. Hal ini dikarenakan:

- 1) Penduduk usia produktif tersebut masih melanjutkan pendidikannya sehingga tidak masuk ke dunia kerja.
- 2) Penduduk usia produktif tersebut bekerja pada usaha keluarga dan tidak mendapatkan penghasilan dari hasil kerjanya.
- 3) Ada hambatan tertentu yang menjadikan penduduk usia produktif tersebut tidak dapat bekerja.

3. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pada ketentuan umumnya disebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Tabel 3.47
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

KODE WIL	KAB/KOTA	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
3201	Bogor	7	160	2	13	5	4	151	3
3202	Sukabumi	0	615	0	0	0	0	0	512
3203	Cianjur	0	112	3	8	3	0	2	1
3204	Bandung	0	0	0	0	0	0	0	13
3205	Garut	5	854	65	74	545	36	8	2.656
3206	Tasikmalaya	53	172	0	0	1	0	0	417
3207	Ciamis	127	404	25	15	1.135	20	1.543	66.070
3208	Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0
3209	Cirebon	0	0	0	0	51	0	0	23
3210	Majalengka	2	736	7	0	0	0	0	3.174
3211	Sumedang	3	477	0	0	40	0	0	12.175
3212	Indramayu	0	488	92	5	8	0	27	912
3213	Subang	7	112	24	2	36	0	1	303
3214	Purwakarta	1	45	0	65	65	93	93	2.204
3215	Karawang	0	1	0	0	0	0	0	0
3216	Bekasi	1	1	0	2	2	0	1	178
3217	Bandung Barat	2	357	40	0	594	0	0	1.773
3218	Pangandaran	33	1.080	30	1	259	2	6	3.433
3271	Kota Bogor	18	90	50	16	147	53	4	495
3272	Kota Sukabumi	50	264	41	27	106	41	28	1.814



KODE WIL	KAB/KOTA	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
3273	Kota Bandung	0	53	0	4	160	0	0	265
3274	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0
3275	Kota Bekasi	0	1	0	0	0	0	1	0
3276	Kota Depok	9	91	78	36	77	2	12	496
3277	Kota Cimahi	0	48	0	0	0	0	0	0
3278	Kota Tasikmalaya	2	3.309	25	15	396	20	1	3.415
3279	Kota Banjar	18	455	48	3	180	19	9	9.145
TOTAL		338	9.925	530	286	3.810	290	1.887	109.477

KODE WIL	KAB/KOTA	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
3201	Bogor	189	2	2	2	2	3	2	253
3202	Sukabumi	193	0	12	0	0	0	0	0
3203	Cianjur	25	0	1	0	1	0	0	0
3204	Bandung	1	0	0	0	0	0	0	0
3205	Garut	5.314	133	437			247	205	703
3206	Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0
3207	Ciamis	1.698	81	100	54	2	1.177	369	65
3208	Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0
3209	Cirebon	135	0	0	0	1	0	0	0



KODE WIL	KAB/KOTA	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
3210	Majalengka	4.658	0	32	13	0	0	0	0
3211	Sumedang	6.186	0	5	3	0	0	0	1
3212	Indramayu	707	285	0	0	0	0	0	22
3213	Subang	716	3	0	1	35	1	5	0
3214	Purwakarta	751	493	29	12	86	0	0	1.188
3215	Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0
3216	Bekasi	6	0	0	0	1	0	0	0
3217	Bandung Barat	5.788	2	2	2	27	13	0	0
3218	Pangandaran	1.689	10	2	4	56	2	47	4
3271	Kota Bogor	727	17	178	185	22	43	285	35
3272	Kota Sukabumi	995	2	25	56	140	74	56	4
3273	Kota Bandung	1.291	12	3	37	48	5	16	24
3274	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0
3275	Kota Bekasi	1	0	0	0	0	4	0	0
3276	Kota Depok	1.077	0	255	168	155	0	0	28
3277	Kota Cimahi	161	0	0	0	0	0	0	0
3278	Kota Tasikmalaya	0	0	84		0	0	10	0
3279	Kota Banjar	1.040	4	0	2	6	21	43	29
TOTAL		33.348	1.044	1.167	539	582	1.590	1.038	2.356



KODE WIL	KAB/KOTA	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24
3201	Bogor	142	2	2	2	2	2	3	181
3202	Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0
3203	Cianjur	138	21	0	0	0	0	322	0
3204	Bandung	0	0	0	0	0	0	4	8
3205	Garut	106	10	40	18	2.912	1.405	11.199	1.462.934
3206	Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0
3207	Ciamis	42	21	24	6	1.410	0	13.022	196.525
3208	Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	0
3209	Cirebon	0	0	0	0	0	0	9	90
3210	Majalengka	0	0	0	0	1.073	0	0	330.818
3211	Sumedang	0	0	0	0	100	0	77	2
3212	Indramayu	0	0	18	50	0	0	0	0
3213	Subang	0	0	0	0	28	6	295	1.386
3214	Purwakarta	2	0	35	0	670	137	20	103.088
3215	Karawang	0	0	0	0	0	0	0	0
3216	Bekasi	0	0	0	0	0	0	160	473
3217	Bandung Barat	38	0	0	0	2	13	205	318
3218	Pangandaran	1	0	27	6	1.531	0	1.136	30.461
3271	Kota Bogor	15	0	1	0	127	563	50	13.755
3272	Kota Sukabumi	26	5	3	1	160	0	1.495	25.459
3273	Kota Bandung	7	0	0	1	3	0	373	35



KODE WIL	KAB/KOTA	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24
3274	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0
3275	Kota Bekasi	0	0	0	0	30	6	0	94
3276	Kota Depok	0	1	0	0	4.392	374	866	305.449
3277	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0
3278	Kota Tasikmalaya	0	6	0	0	0	0	0	0
3279	Kota Banjar	17	0	17	0	10	0	660	33.663
TOTAL		534	66	167	84	12.450	2.506	29.896	2.504.739

KODE WIL	KAB/KOTA	F25	F26	JUMLAH
3201	Bogor	0	0	1.136
3202	Sukabumi	0	0	1.332
3203	Cianjur	4	0	641
3204	Bandung	0	0	26
3205	Garut	153	280	1.490.339
3206	Tasikmalaya	0	0	643
3207	Ciamis	197	116	284.248
3208	Kuningan	0	0	0
3209	Cirebon	0	0	309
3210	Majalengka	0	1	340.514
3211	Sumedang	0	0	19.069
3212	Indramayu	0	0	2.614



KODE WIL	KAB/KOTA	F25	F26	JUMLAH
3213	Subang	19	0	2.980
3214	Purwakarta	0	0	109.077
3215	Karawang	0	0	1
3216	Bekasi	1	0	826
3217	Bandung Barat	1	0	9.177
3218	Pangandaran	8	0	39.828
3271	Kota Bogor	35	0	16.911
3272	Kota Sukabumi	63	0	30.935
3273	Kota Bandung	5	0	2.342
3274	Kota Cirebon	0	0	0
3275	Kota Bekasi	0	0	137
3276	Kota Depok	321	0	313.887
3277	Kota Cimahi	0	0	209
3278	Kota Tasikmalaya	0	0	7.283
3279	Kota Banjar	0	0	45.389
TOTAL		807	397	2.719.853

Sumber: Dinas Sosial Data Sementara PPKS Tahun 2023





Keterangan :

F1	:	ANAK BALITA TELANTAR	F14	:	KELOMPOK MINORITAS
F2	:	ANAK TERLANTAR	F15	:	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)
F3	:	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	F16	:	ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)
F4	:	ANAK JALANAN	F17	:	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
F5	:	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN (ADK)	F18	:	KORBAN TRAFFICKING
F6	:	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	F19	:	KORBAN TINDAK KEKERASAN
F7	:	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	F20	:	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS)
F8	:	LANJUT USIA TELANTAR	F21	:	KORBAN BENCANA ALAM
F9	:	PENYANDANG DISABILITAS	F22	:	KORBAN BENCANA SOSIAL
F10	:	TUNA SUSILA	F23	:	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI
F11	:	GELANDANGAN	F24	:	FAKIR MISKIN / RUMAH TANGGA MISKIN
F12	:	PENGEMIS	F25	:	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS
F13	:	PEMULUNG	F26	:	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Sumber: Dinas Sosial Data Sementara PPKS Tahun 2023

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis PPKS terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah keluarga fakir miskin / rumah tangga miskin dengan jumlah mencapai 2.504.739 orang. Dari jumlah se-provinsi



tersebut, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan PPKS keluarga fakir miskin terbanyak adalah Kabupaten Garut dengan jumlah mencapai 1.462.934 jiwa yang berarti menjadi urutan terbesar teratas, dan Kabupaten Majalengka dengan urutan terbesar ke-2 lebih dari 330.818 jiwa.

C. Mobilitas

Salah satu faktor dalam menganalisis perkembangan penduduk suatu wilayah selain kuantitas dan kualitas Penduduk yang ditinjau dari berbagai indikator yakni kesehatan, ekonomi dan sosial, yang tak kalah pentingnya adalah data terkait Mobilitas Penduduk atau dikenal dengan istilah Migrasi Penduduk. Dalam bidang Administrasi Kependudukan dikenal dengan istilah Pindah dan Datang. Pada sub Bab Mobilitas Penduduk ini akan dibahas terlebih dahulu dari kedatangan penduduk ke wilayah Jawa Barat baik akibat dari perpindahan Kabupaten/Kota yang masih di wilayah Jawa Barat maupun yang datang dari luar provinsi Jawa Barat.

1. Migrasi Masuk

Data migrasi diperoleh dari *Database* SIAK Kabupaten/Kota dari Proses Kedatangan Penduduk. Berikut Tabel Mutasi Masuk Antar Kabupaten/Kota:

Tabel 3.48

Jumlah Penduduk berdasarkan Migrasi Masuk Antar Kabupaten/Kota

KODE	WILAYAH	MASUK ANTAR KAB/KOTA		
		LK	PR	JML
32.01	KAB. BOGOR	39.167	38.501	77.668
32.02	KAB. SUKABUMI	10.464	9.721	20.185
32.03	KAB. CIANJUR	9.509	8.846	18.355
32.04	KAB. BANDUNG	21.004	19.933	40.937
32.05	KAB. GARUT	10.542	9.330	19.872
32.06	KAB. TASIKMALAYA	8.700	8.049	16.749
32.07	KAB. CIAMIS	6.529	6.369	12.898
32.08	KAB. KUNINGAN	5.396	4.843	10.239
32.09	KAB. CIREBON	9.717	8.774	18.491
32.10	KAB. MAJALENGKA	5.341	5.023	10.364



KODE	WILAYAH	MASUK ANTAR KAB/KOTA		
		LK	PR	JML
32.11	KAB. SUMEDANG	6.653	6.056	12.709
32.12	KAB. INDRAMAYU	6.644	6.267	12.911
32.13	KAB. SUBANG	8.405	8.194	16.599
32.14	KAB. PURWAKARTA	5.286	4.948	10.234
32.15	KAB. KARAWANG	16.276	15.788	32.064
32.16	KAB. BEKASI	39.012	39.656	78.668
32.17	KAB. BANDUNG BARAT	11.914	11.288	23.202
32.18	KAB. PANGANDARAN	2.470	2.340	4.810
32.71	KOTA BOGOR	10.284	9.697	19.981
32.72	KOTA SUKABUMI	3.414	3.448	6.862
32.73	KOTA BANDUNG	17.778	17.803	35.581
32.74	KOTA CIREBON	2.968	2.810	5.778
32.75	KOTA BEKASI	24.552	26.053	50.605
32.76	KOTA DEPOK	21.318	21.687	43.005
32.77	KOTA CIMAHI	6.000	5.891	11.891
32.78	KOTA TASIKMALAYA	6.180	5.935	12.115
32.79	KOTA BANJAR	1.613	1.531	3.144
TOTAL		317.136	308.781	625.917

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Migrasi masuk antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2023 berjumlah 625.917 jiwa. Didominasi oleh daerah Bandung Raya dan daerah penyangga ibu kota Negara, 5 Kabupaten/Kota teratas adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan:

1. Daerah penyangga ibu kota dan Bandung Raya merupakan daerah industri yang menarik tenaga kerja dari luar daerah untuk mencari pekerjaan.
2. Di daerah penyangga ibu kota dan Bandung Raya, banyak terdapat sarana pendidikan, sehingga banyak menarik minat dari pelajar untuk melanjutkan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
3. Selain daerah penyangga dan Bandung Raya, wilayah Provinsi Jawa Barat juga menjadi buruan karena iklim yang nyaman untuk tinggal



sehingga dengan demikian banyak penduduk untuk tinggal di Provinsi Jawa Barat.

4. Wilayah Provinsi Jawa Barat juga selain daerah industri, pendidikan, juga ditambah dengan tanahnya yang subur sehingga banyak penduduk dari luar yang melakukan usaha pertanian di Provinsi Jawa Barat.

2. Migrasi Keluar

Data Migrasi Keluar di Jawa Barat tidak terlalu berbeda dengan Migrasi Masuk antar Kabupaten/Kota pada Tabel sebelumnya. Terlihat hampir berimbang jumlahnya yakni 578.540 orang selama periode Januari hingga Desember Tahun 2023. Berikut rincian Migrasi Keluar antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.52

Jumlah Penduduk berdasarkan Migrasi Keluar Antar Kabupaten/Kota

KODE	WILAYAH	PINDAH ANTAR KAB/KOTA		
		LK	PR	JML
32.01	KAB. BOGOR	26.089	26.992	53.081
32.02	KAB. SUKABUMI	12.485	12.979	25.464
32.03	KAB. CIANJUR	11.777	12.557	24.334
32.04	KAB. BANDUNG	19.742	19.512	39.254
32.05	KAB. GARUT	12.784	12.935	25.719
32.06	KAB. TASIKMALAYA	11.566	11.175	22.741
32.07	KAB. CIAMIS	6.922	7.041	13.963
32.08	KAB. KUNINGAN	5.754	5.586	11.340
32.09	KAB. CIREBON	10.489	9.726	20.215
32.10	KAB. MAJALENGKA	5.228	4.968	10.196
32.11	KAB. SUMEDANG	6.488	6.078	12.566
32.12	KAB. INDRAMAYU	7.789	8.301	16.090
32.13	KAB. SUBANG	8.327	8.593	16.920
32.14	KAB. PURWAKARTA	4.722	4.896	9.618
32.15	KAB. KARAWANG	11.450	11.459	22.909
32.16	KAB. BEKASI	20.412	20.213	40.625
32.17	KAB. BANDUNG BARAT	11.006	10.854	21.860
32.18	KAB. PANGANDARAN	2.152	2.283	4.435



KODE	WILAYAH	PINDAH ANTAR KAB/KOTA		
		LK	PR	JML
32.71	KOTA BOGOR	8.020	8.026	16.046
32.72	KOTA SUKABUMI	3.357	3.395	6.752
32.73	KOTA BANDUNG	21.979	21.722	43.701
32.74	KOTA CIREBON	2.804	2.739	5.543
32.75	KOTA BEKASI	28.393	28.277	56.670
32.76	KOTA DEPOK	15.914	15.859	31.773
32.77	KOTA CIMAH	7.025	6.831	13.856
32.78	KOTA TASIKMALAYA	4.674	4.621	9.295
32.79	KOTA BANJAR	1.786	1.788	3.574
TOTAL		289.134	289.406	578.540

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

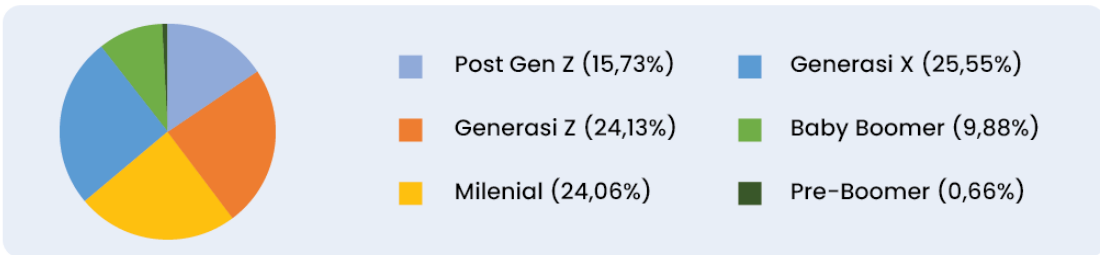
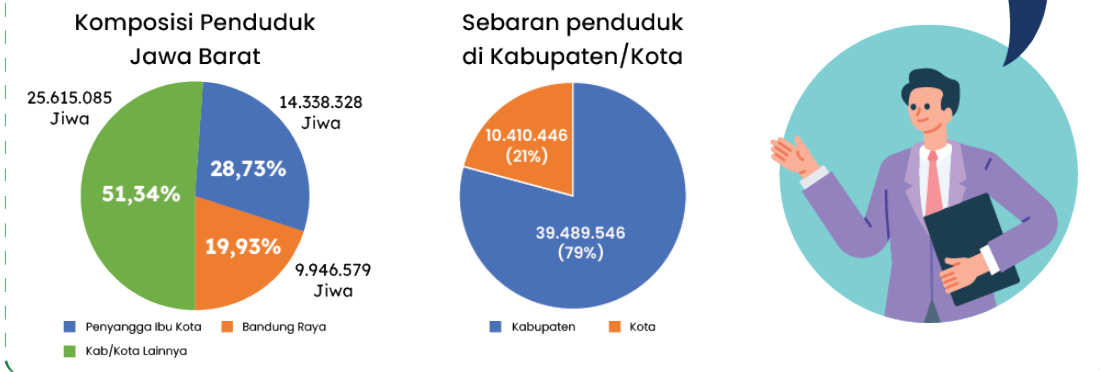
Hal yang menyebabkan terjadinya perpindahan dikarenakan beberapa hal:

1. Penduduk kembali ke tempat asal karena tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan.
2. Penduduk ke tempat asal karena telah menyelesaikan pendidikannya.
3. Penduduk tersebut keluar dari Provinsi Jawa Barat karena dialih tugaskan ke tempat lain.



Sebaran Populasi Jawa Barat

Sebaran penduduk di daerah penyangga Ibu Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak **14.338.328 Jiwa (28,73%)** dari total seluruh penduduk Jawa Barat.



5 Kota Terpadat di Jawa Barat



Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)



APAK Jawa Barat

50,54%

← Migrasi Masuk

Migrasi masuk antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 berjumlah **625.917 jiwa**, didominasi daerah Bandung Raya dan daerah penyangga ibu kota Negara. 5 Kabupaten/Kota teratas adalah Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kab. Bandung.

→ Migrasi Keluar

Selama tahun 2023 ada **578.540 jiwa** penduduk yang meninggalkan Provinsi Jawa Barat dan menetap di provinsi lain.





BAB IV

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan merupakan bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia. Dokumen tersebut selain sebagai bukti status legal seseorang, juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanahan, program bantuan pemerintah, dan lain-lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai instansi pelaksana yang diamanatkan oleh Undang Undang Administrasi Kependudukan, selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan fungsi stelsel aktif petugas dalam melayani masyarakat sebagai Warga Negara untuk memiliki dokumen kependudukan tersebut. Adapun Dokumen Kependudukan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah/Datang bagi penduduk yang pindah domisili dan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan lain-lain).

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah/keluarga tersebut. Kartu Keluarga yang dimaksud adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan melalui SIAK dengan nomor KK yang terdiri atas komposisi 6 digit Awal Kode Wilayah domisili, 6 digit berikutnya tanggal pembuatan KK, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut penerbitan di hari yang sama. Sebagai contoh Nomor KK : 3204082304130004, ini berarti : 320408 : Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung, Kecamatan Bojongsong; 230413 : Tanggal 23 Bulan April Tahun 2013; 0004 : Urutan yang terbentuk otomatis oleh sistem (urutan ke-4).

Tabel 4.1. memperlihatkan kepemilikan kartu keluarga oleh keluarga sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tabel Keluarga yang Sudah Terdaftar (Pemilik Kartu Keluarga)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	KARTU KELUARGA				JUMLAH KEPALA KELUARGA
		MEMILIKI		BELUM MEMILIKI		
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	1.758.535	99,77	4.121	0,23	1.762.656
3202	SUKABUMI	968.825	99,81	1.882	0,19	970.707
3203	CIANJUR	879.068	99,53	4.155	0,47	883.223
3204	BANDUNG	1.237.596	99,68	3.950	0,32	1.241.546
3205	GARUT	902.842	99,47	4.767	0,53	907.609
3206	TASIKMALAYA	717.024	99,58	3.027	0,42	720.051
3207	CIAMIS	460.759	99,84	748	0,16	461.507
3208	KUNINGAN	416.710	99,52	1.998	0,48	418.708
3209	CIREBON	827.972	99,69	2.534	0,31	830.506
3210	MAJALENGKA	484.546	99,37	3.065	0,63	487.611
3211	SUMEDANG	438.044	99,40	2.628	0,60	440.672
3212	INDRAMAYU	701.199	99,45	3.852	0,55	705.051
3213	SUBANG	614.828	99,16	5.188	0,84	620.016
3214	PURWAKARTA	347.483	99,68	1.115	0,32	348.598
3215	KARAWANG	882.662	99,46	4.833	0,54	887.495
3216	BEKASI	1.013.836	99,26	7.597	0,74	1.021.433



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	KARTU KELUARGA				JUMLAH KEPALA KELUARGA
		MEMILIKI		BELUM MEMILIKI		
		N	%	N	%	
3217	BANDUNG BARAT	630.730	99,71	1.846	0,29	632.576
3218	PANGANDARAN	161.749	99,61	634	0,39	162.383
3271	KOTA BOGOR	357.868	99,75	911	0,25	358.779
3272	KOTA SUKABUMI	119.127	99,86	169	0,14	119.296
3273	KOTA BANDUNG	836.755	99,64	2.987	0,36	839.742
3274	KOTA CIREBON	115.253	99,90	119	0,10	115.372
3275	KOTA BEKASI	796.636	99,69	2.472	0,31	799.108
3276	KOTA DEPOK	616.753	99,89	674	0,11	617.427
3277	KOTA CIMAH	187.382	99,75	476	0,25	187.858
3278	KOTA TASIKMALAYA	252.127	99,87	317	0,13	252.444
3279	KOTA BANJAR	73.143	99,90	75	0,10	73.218
TOTAL		16.799.452	99,61	66.140	0,39	16.865.592

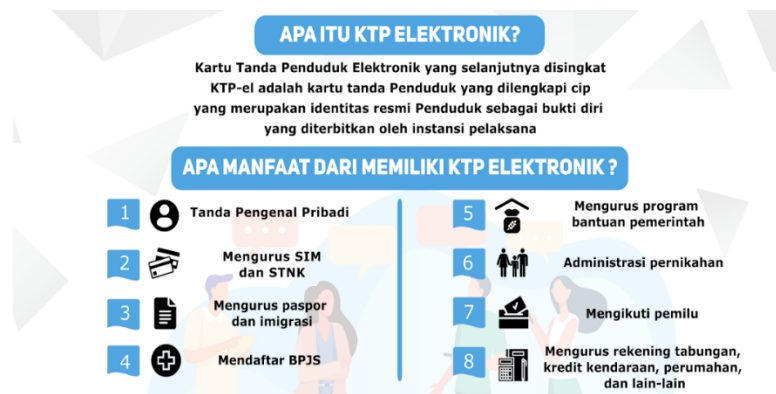
Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Berdasarkan Tabel 4.1. terlihat bahwa jumlah Kepala Keluarga di Provinsi Jawa Barat yang telah mempunyai Kartu Keluarga pada Tahun 2023 sebanyak 14,202,968 keluarga.

B. Kepemilikan KTP Elektronik

Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el) merupakan selain Hak Warga Negara, juga merupakan syarat untuk menikmati layanan pelayanan publik. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019.



Gambar 4.1

KTP Elektronik

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

Di Indonesia sendiri dikenal dengan jargon yang diusung dalam program KTP-el adalah 1 (satu) KTP 1 (satu) Identitas atau pada dunia internasional dikenal dengan istilah *Single Identity Number* (SIN) yang mengantarkan masyarakat untuk memiliki identitas tunggal.

Tabel 4.2
Jumlah Kepemilikan KTP Elektronik

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WKTP	REKAM	% SUDAH PEREKAMAN	BELUM REKAM	KEPEMILIKAN KTP-eI
3201	KAB. BOGOR	5.558.885	3.984.804	3.984.804	100,00	-	3.925.875
3202	KAB. SUKABUMI	2.790.320	2.019.713	2.003.590	99,20	16.123	1.968.223
3203	KAB. CIANJUR	2.535.002	1.799.508	1.799.508	100,00	-	1.789.731
3204	KAB. BANDUNG	3.749.172	2.718.013	2.679.824	98,59	38.189	2.647.139
3205	KAB. GARUT	2.753.949	1.940.344	1.920.233	98,96	20.111	1.818.489
3206	KAB. TASIKMALAYA	1.958.221	1.470.704	1.449.612	98,57	21.092	1.443.294
3207	KAB. CIAMIS	1.281.201	986.639	959.926	97,29	26.713	957.459
3208	KAB. KUNINGAN	1.231.772	921.370	900.879	97,78	20.491	896.712
3209	KAB. CIREBON	2.437.899	1.797.066	1.775.263	98,79	21.803	1.770.706
3210	KAB. MAJALENGA	1.354.803	1.020.453	997.325	97,73	23.128	992.413
3211	KAB. SUMEDANG	1.205.685	914.609	906.070	99,07	8.539	894.048
3212	KAB. INDRAMAYU	1.933.948	1.454.019	1.438.757	98,95	15.262	1.427.368
3213	KAB. SUBANG	1.636.233	1.237.123	1.222.740	98,84	14.383	1.219.377
3214	KAB. PURWAKARTA	1.036.768	747.494	736.212	98,49	11.282	732.720
3215	KAB. KARAWANG	2.539.381	1.844.662	1.844.662	100,00	-	1.825.995
3216	KAB. BEKASI	3.197.006	2.273.805	2.273.805	100,00	-	2.244.173
3217	KAB. BANDUNG BARAT	1.847.096	1.335.858	1.326.305	99,28	9.553	1.318.481
3218	KAB. PANGANDARAN	442.205	341.503	332.252	97,29	9.251	331.305
3271	KOTA BOGOR	1.127.408	826.409	808.929	97,88	17.480	790.919
3272	KOTA SUKABUMI	364.912	266.941	260.037	97,41	6.904	258.876

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WKTP	REKAM	% SUDAH PEREKAMAN	BELUM REKAM	KEPEMILIKAN KTP-el
3273	KOTA BANDUNG	2.569.107	1.931.771	1.888.631	97,77	43.140	1.882.246
3274	KOTA CIREBON	352.347	259.685	252.656	97,29	7.029	252.064
3275	KOTA BEKASI	2.513.669	1.871.636	1.833.294	97,95	38.342	1.830.711
3276	KOTA DEPOK	1.941.360	1.439.450	1.418.811	98,57	20.639	1.412.051
3277	KOTA CIMAHI	575.519	433.752	426.205	98,26	7.547	421.715
3278	KOTA TASIKMALAYA	757.815	560.212	555.617	99,18	4.595	549.150
3279	KOTA BANJAR	208.309	157.368	155.206	98,63	2.162	151.765
TOTAL		49.899.992	36.554.911	36.151.153	98,90	403.758	35.753.005

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Pada tabel 4.2 sudah banyak warga Jawa Barat yang masih sudah melakukan perekaman sebesar 36.151.153 atau 98,90% menyisakan 1,10 % atau sekitar 403.758 orang penduduk Jawa Barat yang belum melakukan perekaman. Diantaranya sudah melakukan perekaman namun belum di cetak karena masih dalam daftar antrian cetak di Kabupaten/Kota masing-masing. Alangkah efektif dan efisiennya ketika seluruh penduduk telah memiliki KTP-el dan seluruh pelayanan publik menyesuaikan prosedur pelayanannya dengan mewajibkan identitasnya adalah melalui NIK KTP-el, sebagaimana yang telah dilakukan diberbagai sektor diantaranya Perbankan, Jaminan Sosial (BPJS), Pajak, dan lain sebagainya.

C. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Akta Pencatatan Sipil merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang orang yang lain. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil penduduk Jawa Barat yang tercatat dalam *Database* SIAK antara lain:

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran Identitas awal yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi dasar hukum keperdataan seseorang dengan orang tuanya. Kepemilikan jumlah Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 telah mencapai 93,74%.

Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 18 di Provinsi Jawa Barat dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Kepemilikan Akta Lahir

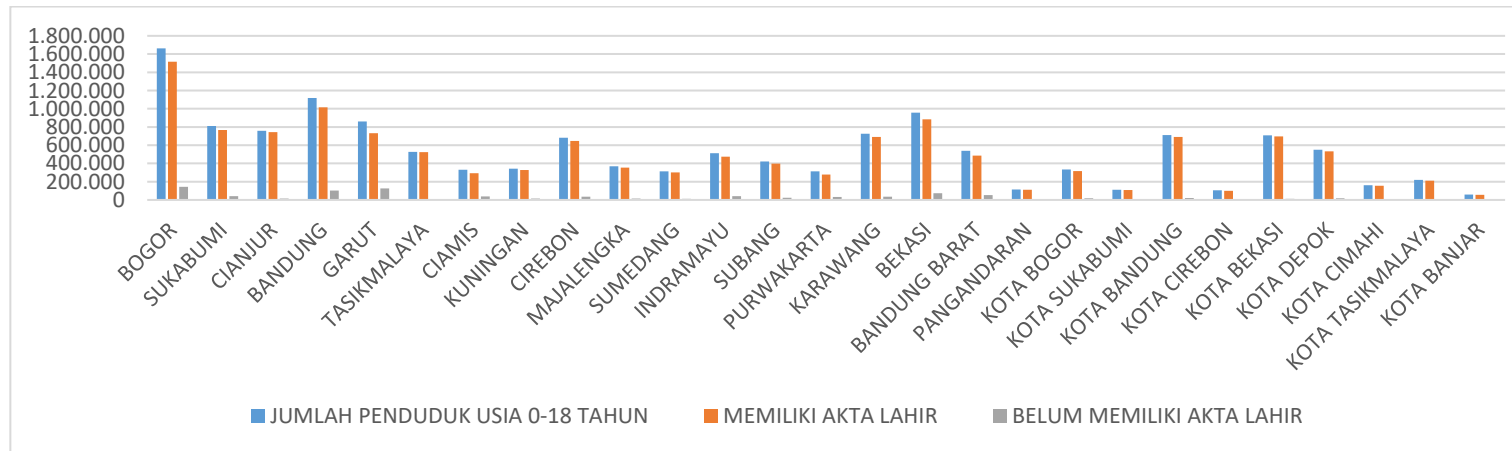
KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	(%)
3201	KAB. BOGOR	1.661.670	144.945	1.516.725	91,28
3202	KAB. SUKABUMI	810.651	42.541	768.110	94,75
3203	KAB. CIANJUR	757.150	13.883	743.267	98,17
3204	KAB. BANDUNG	1.117.355	102.036	1.015.319	90,87
3205	KAB. GARUT	859.747	126.687	733.060	85,26
3206	KAB. TASIKMALAYA	527.441	2.785	524.656	99,47
3207	KAB. CIAMIS	330.770	39.234	291.536	88,14
3208	KAB. KUNINGAN	342.337	14.022	328.315	95,90
3209	KAB. CIREBON	682.766	36.550	646.216	94,65
3210	KAB. MAJALENGKA	368.980	15.347	353.633	95,84
3211	KAB. SUMEDANG	312.372	11.699	300.673	96,25
3212	KAB. INDRAMAYU	513.293	39.876	473.417	92,23
3213	KAB. SUBANG	422.068	22.977	399.091	94,56
3214	KAB. PURWAKARTA	312.432	33.306	279.126	89,34
3215	KAB. KARAWANG	725.642	35.064	690.578	95,17
3216	KAB. BEKASI	958.306	74.059	884.247	92,27



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	(%)
3217	KAB. BANDUNG BARAT	539.049	51.725	487.324	90,40
3218	KAB. PANGANDARAN	113.944	2.407	111.537	97,89
3271	KOTA BOGOR	335.044	17.989	317.055	94,63
3272	KOTA SUKABUMI	110.184	740	109.444	99,33
3273	KOTA BANDUNG	710.113	20.468	689.645	97,12
3274	KOTA CIREBON	104.469	5.753	98.716	94,49
3275	KOTA BEKASI	708.521	12.610	695.911	98,22
3276	KOTA DEPOK	550.177	17.570	532.607	96,81
3277	KOTA CIMAHI	160.371	3.959	156.412	97,53
3278	KOTA TASIKMALAYA	219.555	7.955	211.600	96,38
3279	KOTA BANJAR	57.581	385	57.196	99,33
TOTAL		14.311.988	896.572	13.415.416	93,74

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Gambar 4.2

Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran Per Kabupaten/Kota

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

2. Akta Kematian

Administrasi kependudukan bukan saja dibutuhkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), yang masih hidup namun juga berlaku, untuk yang telah meninggal dunia. Fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus Akta Kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan Akta Kelahiran. Masyarakat perlu segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan Akta Kematian. Karena terkait status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun pribadi. Terlebih beberapa tahun kedepan, Akta Kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris (intinya agar mempermudah urusan administrasi, bagi keluarga yang ditinggalkan).

Pelaporan kematian penduduk di Jawa Barat yang dilaporkan selama Tahun 2023 berjumlah 1.176.823 jiwa, yang terdiri dari 691.991 kematian penduduk laki-laki dan 484.832 kematian penduduk perempuan. Jika pelaporan kematian



ini tidak berjalan dengan benar, maka Biodata Almarhum akan tetap terdaftar dalam *database* kependudukan, sehingga akan selalu muncul masalah mengenai jumlah penduduk yang tidak sesuai antara *de facto* dengan *de jure*. Kondisi saat ini, kesadaran masyarakat membuat akta kematian masih kurang. Selain akta kematian mempunyai banyak fungsi dengan kaitan persoalan penentuan hukum privat maupun publik, kepemilikan Akta Kematian jika dikaitkan dengan pelaporan kematian akan mendukung pendataan penduduk yang lebih akurat dari sisi jumlah penduduk.

Tabel 4.4
Jumlah Kepemilikan Akta Kematian

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
3201	KAB. BOGOR	42.194	22.436	64.630
3202	KAB. SUKABUMI	29.320	20.158	49.478
3203	KAB. CIANJUR	21.056	10.405	31.461
3204	KAB. BANDUNG	29.779	18.697	48.476
3205	KAB. GARUT	26.046	19.669	45.715
3206	KAB. TASIKMALAYA	20.185	16.963	37.148
3207	KAB. CIAMIS	24.987	18.134	43.121
3208	KAB. KUNINGAN	26.902	23.288	50.190
3209	KAB. CIREBON	23.228	15.975	39.203
3210	KAB. MAJALENGKA	48.577	42.879	91.456
3211	KAB. SUMEDANG	7.313	6.555	13.868
3212	KAB. INDRAMAYU	9.203	6.769	15.972



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
3213	KAB. SUBANG	24.781	17.187	41.968
3214	KAB. PURWAKARTA	16.324	12.779	29.103
3215	KAB. KARAWANG	27.844	21.524	49.368
3216	KAB. BEKASI	19.719	9.962	29.681
3217	KAB. BANDUNG BARAT	15.507	9.363	24.870
3218	KAB. PANGANDARAN	17.631	13.853	31.484
3271	KOTA BOGOR	19.150	12.202	31.352
3272	KOTA SUKABUMI	9.954	8.143	18.097
3273	KOTA BANDUNG	65.176	43.255	108.431
3274	KOTA CIREBON	14.211	11.547	25.758
3275	KOTA BEKASI	52.584	29.534	82.118
3276	KOTA DEPOK	56.980	41.400	98.380
3277	KOTA CIMAHI	14.343	10.008	24.351
3278	KOTA TASIKMALAYA	20.107	14.600	34.707
3279	KOTA BANJAR	8.890	7.547	16.437
TOTAL		691.991	484.832	1.176.823

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023





Kegunaan dari Akta Kematian ini ialah :

- a. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
- b. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
- c. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya
- d. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

3. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Perkawinan pada umumnya hanya diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan Buku Nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka. Tahun 2023 yang tercatat dalam *database* berjumlah 24.742.767 penduduk berstatus kawin dengan jumlah kepemilikan Akta Perkawinan berjumlah 12.402.438 (59,96 %) sedangkan yang belum memiliki Akta Perkawinan berjumlah 9.906.495 (40,04 %).

Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Kepemilikan Akta Kawin

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERKAWINAN	AKTA KAWIN			
			MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	2.663.888	1.579.167	59,28	1.084.721	40,72
3202	SUKABUMI	1.421.786	461.648	32,47	960.138	67,53
3203	CIANJUR	1.285.932	533.619	41,50	752.313	58,50
3204	BANDUNG	1.885.500	1.270.344	67,37	615.156	32,63
3205	GARUT	1.337.855	931.635	69,64	406.220	30,36
3206	TASIKMALAYA	1.009.537	590.506	58,49	419.031	41,51
3207	CIAMIS	667.068	455.929	68,35	211.139	31,65
3208	KUNINGAN	613.438	253.842	41,38	359.596	58,62
3209	CIREBON	1.188.703	910.616	76,61	278.087	23,39
3210	MAJALENGKA	692.416	476.833	68,87	215.583	31,13
3211	SUMEDANG	648.068	396.094	61,12	251.974	38,88
3212	INDRAMAYU	969.478	641.842	66,20	327.636	33,80
3213	SUBANG	874.673	449.329	51,37	425.344	48,63
3214	PURWAKARTA	504.265	264.021	52,36	240.244	47,64
3215	KARAWANG	1.283.521	759.396	59,17	524.125	40,83
3216	BEKASI	1.623.501	817.317	50,34	806.184	49,66

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERKAWINAN	AKTA KAWIN			
			MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3217	BANDUNG BARAT	941.964	440.554	46,77	501.410	53,23
3218	PANGANDARAN	237.420	161.522	68,03	75.898	31,97
3271	KOTA BOGOR	515.778	306.981	59,52	208.797	40,48
3272	KOTA SUKABUMI	166.410	116.755	70,16	49.655	29,84
3273	KOTA BANDUNG	1.217.626	923.915	75,88	293.711	24,12
3274	KOTA CIREBON	154.207	117.475	76,18	36.732	23,82
3275	KOTA BEKASI	1.202.322	757.106	62,97	445.216	37,03
3276	KOTA DEPOK	906.940	620.208	68,38	286.732	31,62
3277	KOTA CIMAHI	274.387	212.059	77,28	62.328	22,72
3278	KOTA TASIKMALAYA	357.412	301.382	84,32	56.030	15,68
3279	KOTA BANJAR	98.672	86.177	87,34	12.495	12,66
TOTAL		24.742.767	14.836.272	59,96	9.906.495	40,04

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023

4. Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan identitas sebagai dasar hukum seseorang yang telah berpisah dengan pasangan resmi suami isteri. Dengan akta ini seseorang sudah tidak memiliki hak saling menuntut satu sama lain berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri.

Tabel 4.6
Jumlah Kepemilikan Akta Cerai

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERCERAIAN	AKTA CERAI			
			MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	73.345	31.210	42,55	42.135	57,45
3202	SUKABUMI	64.406	7.898	12,26	56.508	87,74
3203	CIANJUR	49.882	12.574	25,21	37.308	74,79
3204	BANDUNG	64.130	34.398	53,64	29.732	46,36
3205	GARUT	50.817	19.747	38,86	31.070	61,14
3206	TASIKMALAYA	48.810	17.160	35,16	31.650	64,84
3207	CIAMIS	29.239	19.741	67,52	9.498	32,48
3208	KUNINGAN	24.638	12.322	50,01	12.316	49,99
3209	CIREBON	60.838	42.021	69,07	18.817	30,93
3210	MAJALENGKA	41.505	24.557	59,17	16.948	40,83
3211	SUMEDANG	31.319	16.351	52,21	14.968	47,79
3212	INDRAMAYU	54.891	41.010	74,71	13.881	25,29
3213	SUBANG	36.434	14.397	39,52	22.037	60,48

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERCERAIAN	AKTA CERAI			
			MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3214	PURWAKARTA	22.842	8.557	37,46	14.285	62,54
3215	KARAWANG	58.523	14.249	24,35	44.274	75,65
3216	BEKASI	36.885	12.295	33,33	24.590	66,67
3217	BANDUNG BARAT	44.731	14.464	32,34	30.267	67,66
3218	PANGANDARAN	11.225	7.924	70,59	3.301	29,41
3271	KOTA BOGOR	20.483	9.431	46,04	11.052	53,96
3272	KOTA SUKABUMI	9.128	4.288	46,98	4.840	53,02
3273	KOTA BANDUNG	62.071	45.111	72,68	16.960	27,32
3274	KOTA CIREBON	11.535	8.321	72,14	3.214	27,86
3275	KOTA BEKASI	32.798	22.327	68,07	10.471	31,93
3276	KOTA DEPOK	31.078	22.836	73,48	8.242	26,52
3277	KOTA CIMAHI	14.150	8.638	61,05	5.512	38,95
3278	KOTA TASIKMALAYA	21.721	13.915	64,06	7.806	35,94
3279	KOTA BANJAR	8.610	7.205	83,68	1.405	16,32
TOTAL		1.016.034	492.947	48,52	523.087	51,48

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Berdasarkan data Tabel 4.5 diatas, pada Tahun 2023 yang tercatat dalam *database* berjumlah 1.016.034 penduduk yang melakukan perceraian dengan jumlah kepemilikan Akta Perceraian berjumlah 492.947 (48,52 %) sedangkan yang belum memiliki Akta Perkawinan berjumlah 523.087 (51,48 %).

5. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Seluruh anak diharapkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kartu Identitas Anak, dengan tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang KIA, ada 2 jenis KIA, yakni:

- a. KIA untuk anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun.
- b. KIA untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.

Tabel 4.7

Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	USIA 0-17	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	KEPEMI LIKAN (%)
3201	KAB. BOGOR	1.582.547	1.113.971	468.576	29,61
3202	KAB. SUKABUMI	789.185	485.184	304.001	38,52
3203	KAB. CIANJUR	736.946	344.943	392.003	53,19
3204	KAB. BANDUNG	1.073.474	684.549	388.925	36,23
3205	KAB. GARUT	835.022	626.605	208.417	24,96
3206	KAB. TASIKMALAYA	509.789	201.479	308.310	60,48
3207	KAB. CIAMIS	311.962	200.395	111.567	35,76
3208	KAB. KUNINGAN	327.310	166.222	161.088	49,22
3209	KAB. CIREBON	662.713	478.250	184.463	27,83
3210	KAB. MAJALENGKA	352.035	142.325	209.710	59,57
3211	KAB. SUMEDANG	300.999	176.669	124.330	41,31



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	USIA 0-17	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	KEPEMILIKAN (%)
3212	KAB. INDRAMAYU	495.763	342.770	152.993	30,86
3213	KAB. SUBANG	413.527	264.933	148.594	35,93
3214	KAB. PURWAKARTA	301.275	159.229	142.046	47,15
3215	KAB. KARAWANG	696.985	327.016	369.969	53,08
3216	KAB. BEKASI	924.086	504.264	419.822	45,43
3217	KAB. BANDUNG BARAT	521.306	386.637	134.669	25,83
3218	KAB. PANGANDARAN	107.387	45.869	61.518	57,29
3271	KOTA BOGOR	318.114	170.079	148.035	46,54
3272	KOTA SUKABUMI	103.845	40.473	63.372	61,03
3273	KOTA BANDUNG	672.865	336.287	336.578	50,02
3274	KOTA CIREBON	98.781	54.478	44.303	44,85
3275	KOTA BEKASI	673.690	375.976	297.714	44,19
3276	KOTA DEPOK	523.959	147.086	376.873	71,93
3277	KOTA CIMAHI	150.776	9.481	141.295	93,71
3278	KOTA TASIKMALAYA	207.744	107.231	100.513	48,38
3279	KOTA BANJAR	54.237	7.246	46.991	86,64
TOTAL		13.746.322	7.899.647	5.846.675	42,53

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2023



Kepemilikan Dokumen Kependudukan Warga Jawa Barat



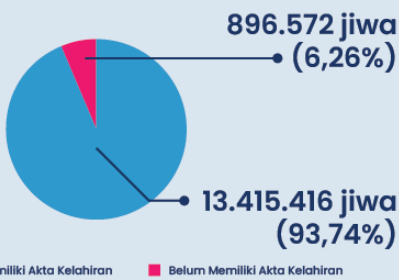
Kartu Keluarga (KK)



KTP elektronik



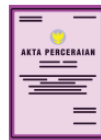
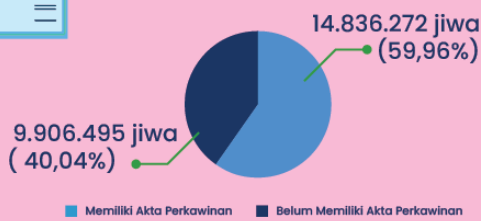
Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun



Kepemilikan Akta Kematian Usia 0-18 Tahun



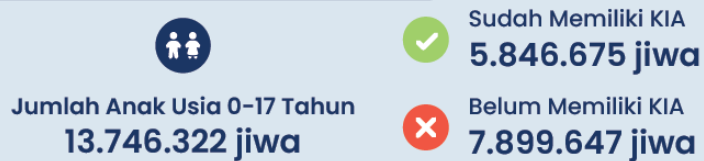
Kepemilikan Akta Perkawinan



Kepemilikan Akta Perceraian



Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)





BAB V

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari aspek kependudukan. Hal ini disebabkan penduduk merupakan subjek sekaligus objek pada pembangunan. Sebagai subjek karena yang bertindak sebagai pemangku kebijakan adalah bagian dari penduduk, demikian pula yang menjadi objek adalah penduduk pula yang lebih besar jumlahnya dibanding dengan subjek (pelaku) rencana pembangunan. Oleh karena itu, data kependudukan yang akurat menjadi prasyarat mutlak dalam perencanaan pembangunan tersebut. Kesalahan atas data tersebut akan berakibat fatal bahkan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan.

Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat memiliki angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Sebesar 1,82. Angka ini terjadi penurunan dari Tahun 2022 dengan angka 1,92. Hal ini dikarenakan menggunakan metode perbandingan penduduk 9 (sembilan) tahun sebelumnya. Angka LPP mencerminkan angka sebenarnya karena faktor penentunya hanya dari satu perspektif yakni administrasi kependudukan. Namun, itulah fakta yang dapat disajikan berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam *database* SIAK. Angka LPP sebesar 1,82 sebagaimana yang telah dicantumkan sebelumnya akan berbeda dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Idealnya ada kolaborasi metodologi yang dilakukan oleh BPS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga saling melengkapi. Di masa yang akan datang perlu diupayakan kerjasama sinergitas dalam penyajian data tersebut agar lebih akurat.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan struktur penduduk muda/*expansive*, dengan struktur penduduk muda lebih besar dibandingkan kelompok usia di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk usia 5--9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Selain itu dalam jangka panjang penduduk Provinsi Jawa Barat akan memperlihatkan



semakin besarnya umur produktif. Dengan demikian dalam masa 10 tahun ke depan Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan bonus demografi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar demografi, bonus demografi sebagai suatu keuntungan jika secara kualitas penduduk tersebut baik. Kualitas dan kuantitas yang baik tentunya akan menjadi potensi bagi pengembangan daerah, di lain pihak bonus demografi menjadi hambatan jika kualitas penduduk muda tersebut tidak dapat menjawab tantangan zaman yang sudah mengarah kepada perkembangan Industri 5.0, dengan kondisi ini dapat menjadi beban bagi Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan daerahnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau Tahun 2021;
4. Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, 2010;
5. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2019;
6. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2020;
7. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2021;
8. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2022;
9. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2023;
10. <https://jabarprov.go.id>
11. <https://disdukcapil.jabarprov.go.id>
12. <https://satudata.jabarprov.go.id>
13. <https://bps.go.id>

SUMBER GAMBAR

freepik.com
iconscout.com
sketchvalley.com



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat



(022) 2031044



Jl. Ciumbuleuit No.2, Kota Bandung, Jawa Barat 40131



disdukcapil.jabarprov.go.id